

Yth.
Direksi Bank Perekonomian Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/SEOJK.03/2024
TENTANG
PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sehubungan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai panduan penggunaan standar akuntansi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
3. Laporan keuangan yang wajib disusun oleh BPR adalah laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

II. PENETAPAN PEMBERLAKUAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

1. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang efektif pada posisi laporan keuangan 1 Januari 2025.

2. Memperhatikan keselarasan dengan karakteristik operasional BPR, standar akuntansi keuangan yang digunakan saat ini oleh BPR adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Dengan tidak berlakunya SAK ETAP pada tanggal 1 Januari 2025 maka BPR ditetapkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat sebagai standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan BPR. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat dapat dipergunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
5. Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, panduan akuntansi atas transaksi keuangan BPR menggunakan Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

1. Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat PA BPR berisi penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi industri BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
2. PA BPR memuat penjelasan, perlakuan akuntansi, dan contoh transaksi yang di dalamnya mengandung pertimbangan (*judgement*) sesuai dengan konteks dan kondisi dalam contoh. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
3. PA BPR merupakan acuan atau panduan dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang diterapkan oleh BPR. Hal yang tidak dijabarkan dalam PA BPR, mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
4. Dalam hal terdapat perubahan pada standar akuntansi keuangan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan BPR harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. PA BPR sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/SEOJK.03/2024
TENTANG
PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 7 -
1.1. PENDAHULUAN	- 7 -
1.1.1. LATAR BELAKANG	- 7 -
1.1.2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	- 7 -
1.1.3. ACUAN PENYUSUNAN.....	- 8 -
1.1.4. KEDUDUKAN	- 8 -
1.1.5. KETENTUAN LAIN-LAIN	- 9 -
1.1.6. KAITAN PERHITUNGAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN KUALITAS ASET (PPKA) DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN).....	- 9 -
1.2. PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	- 9 -
1.3. TATA CARA PENYESUAIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	- 10 -
1.4. LAPORAN KEUANGAN.....	- 10 -
1.4.1. KETENTUAN UMUM.....	- 10 -
1.4.2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	- 14 -
1.4.3. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN	- 16 -
1.5. PRINSIP DASAR PERLAKUAN AKUNTANSI	- 17 -
1.5.1. PRINSIP UMUM	- 17 -
1.5.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	- 20 -
1.5.3. PENYAJIAN	- 23 -
1.5.4. PENGUNGKAPAN	- 24 -
1.5.5. SALING HAPUS	- 24 -
BAB II KAS.....	- 25 -
2.1. KAS DALAM MATA UANG RUPIAH.....	- 25 -
2.1.1. DEFINISI.....	- 25 -
2.1.2. PENJELASAN	- 25 -
2.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 25 -
2.1.4. ILUSTRASI JURNAL.....	- 25 -
2.1.5. CONTOH KASUS	- 25 -
2.2. KAS DALAM VALUTA ASING.....	- 26 -
2.2.1. DEFINISI.....	- 26 -
2.2.2. DASAR PENGATURAN	- 26 -
2.2.3. PENJELASAN	- 26 -
2.2.4. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 26 -
2.2.5. ILUSTRASI JURNAL.....	- 26 -
2.2.6. CONTOH KASUS	- 27 -
BAB III SURAT BERHARGA	- 28 -
3.1. DEFINISI	- 28 -
3.2. PENJELASAN	- 28 -
3.3. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 28 -
3.4. ILUSTRASI JURNAL.....	- 28 -
3.5. CONTOH KASUS	- 30 -
BAB IV PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 33 -

4.1.	DEFINISI	- 33 -
4.2.	PENJELASAN	- 33 -
4.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 33 -
4.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 34 -
4.5.	CONTOH KASUS	- 35 -
BAB V KREDIT YANG DIBERIKAN		- 40 -
5.1.	PEMBERIAN KREDIT.....	- 40 -
5.1.1.	DEFINISI	- 40 -
5.1.2.	PENJELASAN	- 41 -
5.1.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 43 -
5.1.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 45 -
5.1.5.	CONTOH KASUS	- 49 -
5.2.	RESTRUKTURISASI KREDIT.....	- 60 -
5.2.1.	DEFINISI	- 60 -
5.2.2.	PENJELASAN	- 60 -
5.2.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 60 -
5.2.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 60 -
5.2.5.	CONTOH KASUS	- 61 -
5.3.	HAPUS BUKU KREDIT.....	- 64 -
5.3.1.	DEFINISI	- 64 -
5.3.2.	PENJELASAN	- 64 -
5.3.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 64 -
5.3.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 65 -
5.3.5.	CONTOH KASUS	- 65 -
BAB VI PENYERTAAN MODAL.....		- 66 -
6.1.	DEFINISI	- 66 -
6.2.	DASAR PENGATURAN	- 66 -
6.3.	PENJELASAN	- 66 -
6.4.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 66 -
6.5.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 67 -
6.6.	CONTOH KASUS	- 68 -
BAB VII AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH		- 70 -
7.1.	DEFINISI	- 70 -
7.2.	DASAR PENGATURAN	- 70 -
7.3.	PENJELASAN	- 70 -
7.4.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 71 -
7.5.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 71 -
7.6.	CONTOH KASUS	- 72 -
BAB VIII ASET TETAP DAN INVENTARIS		- 73 -
8.1	DEFINISI	- 73 -
8.2	DASAR PENGATURAN	- 73 -
8.3	PENJELASAN	- 73 -
8.4	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 75 -
8.5	ILUSTRASI JURNAL.....	- 77 -

8.6	CONTOH KASUS	- 79 -
BAB IX PROPERTI TERBENGKALAI		- 84 -
9.1.	DEFINISI	- 84 -
9.2.	DASAR PENGATURAN	- 84 -
9.3.	PENJELASAN	- 84 -
9.4.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 84 -
9.5.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 85 -
9.6.	CONTOH KASUS	- 86 -
BAB X ASET TAKBERWUJUD		- 88 -
10.1.	DEFINISI	- 88 -
10.2.	PENJELASAN	- 88 -
10.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 88 -
10.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 89 -
10.5.	CONTOH KASUS	- 89 -
BAB XI ASET LAINNYA		- 90 -
11.1.	DEFINISI	- 90 -
11.2.	PENJELASAN	- 90 -
11.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 90 -
11.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 90 -
11.5.	CONTOH KASUS	- 91 -
BAB XII CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI.....		- 92 -
12.1.	DEFINISI	- 92 -
12.2.	DASAR PENGATURAN	- 92 -
12.3.	ALUR PEMBENTUKAN CKPN	- 93 -
12.4.	PENJELASAN	- 94 -
12.5.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 99 -
12.6.	PERHITUNGAN PD	- 99 -
12.6.1	PERHITUNGAN PD DENGAN <i>NET FLOW</i>	- 99 -
12.6.2	PERHITUNGAN PD DENGAN <i>MIGRATION ANALYSIS</i>	- 101 -
12.7.	PERHITUNGAN LGD.....	- 103 -
12.7.1.	PERHITUNGAN LGD DENGAN <i>EXPECTED RECOVERIES</i>	- 103 -
12.7.2.	PERHITUNGAN LGD DENGAN <i>COLLATERAL SHORTFALL</i>	- 104 -
12.8.	PERHITUNGAN CKPN	- 105 -
12.9.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 106 -
12.10.	CONTOH KASUS	- 106 -
BAB XIII SIMPANAN		- 109 -
13.1.	SIMPANAN PIHAK KETIGA BUKAN BANK	- 109 -
13.1.1.	DEFINISI	- 109 -
13.1.2.	PENJELASAN	- 109 -
13.1.3.	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 109 -
13.1.4.	ILUSTRASI JURNAL.....	- 110 -
13.1.5.	CONTOH KASUS	- 110 -
13.2.	SIMPANAN DARI BANK LAIN	- 111 -
13.2.1.	DEFINISI	- 111 -

13.2.2. PENJELASAN	- 111 -
13.2.3. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 111 -
13.2.4. ILUSTRASI JURNAL.....	- 112 -
13.2.5. CONTOH KASUS	- 112 -
BAB XIV LIABILITAS SEGERA.....	- 113 -
14.1. DEFINISI	- 113 -
14.2. PENJELASAN	- 113 -
14.3. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 113 -
14.4. ILUSTRASI JURNAL.....	- 113 -
14.5. CONTOH KASUS	- 114 -
BAB XV UTANG.....	- 115 -
15.1. UTANG BUNGA	- 115 -
15.1.1. DEFINISI	- 115 -
15.1.2. PENJELASAN	- 115 -
15.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 115 -
15.1.4. ILUSTRASI JURNAL.....	- 115 -
15.1.5. CONTOH KASUS	- 115 -
15.2. UTANG PAJAK.....	- 115 -
15.2.1. DEFINISI	- 115 -
15.2.2. DASAR PENGATURAN	- 115 -
15.2.3. PENJELASAN	- 116 -
15.2.4. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 116 -
15.2.5. ILUSTRASI JURNAL.....	- 116 -
BAB XVI PINJAMAN	- 117 -
16.1. DEFINISI	- 117 -
16.2. DASAR PENGATURAN	- 117 -
16.3. PENJELASAN	- 117 -
16.4. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 117 -
16.5. ILUSTRASI JURNAL.....	- 118 -
16.6. CONTOH KASUS	- 119 -
BAB XVII DANA SETORAN MODAL	- 123 -
17.1. DEFINISI	- 123 -
17.2. DASAR PENGATURAN	- 123 -
17.3. PENJELASAN	- 123 -
17.4. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 123 -
17.5. ILUSTRASI JURNAL.....	- 123 -
17.6. CONTOH KASUS	- 124 -
BAB XVIII LIABILITAS IMBALAN KERJA	- 125 -
18.1. DEFINISI	- 125 -
18.2. DASAR PENGATURAN	- 125 -
18.3. PENJELASAN	- 126 -
18.4. PERLAKUAN AKUNTANSI	- 126 -
18.5. ILUSTRASI JURNAL.....	- 128 -

18.6.	CONTOH KASUS	- 128 -
BAB XIX	LIABILITAS LAINNYA	- 129 -
19.1	DEFINISI	- 129 -
19.2	PENJELASAN	- 129 -
19.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 129 -
19.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 129 -
19.5	CONTOH KASUS	- 129 -
BAB XX	MODAL.....	- 131 -
20.1	DEFINISI	- 131 -
20.2	DASAR PENGATURAN	- 131 -
20.3	PENJELASAN	- 131 -
20.4	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 132 -
20.5	ILUSTRASI JURNAL.....	- 133 -
20.6	CONTOH KASUS	- 133 -
BAB XXI	SALDO LABA	- 135 -
21.1	DEFINISI.....	- 135 -
21.2	DASAR PENGATURAN DAN PENJELASAN	- 135 -
21.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 135 -
21.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 135 -
BAB XXII	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL.....	- 137 -
22.1	PENDAPATAN OPERASIONAL.....	- 137 -
22.1.1	DEFINISI	- 137 -
22.1.2	PENJELASAN	- 137 -
22.1.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 138 -
22.1.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 138 -
22.1.5	CONTOH KASUS	- 139 -
22.2	BEBAN OPERASIONAL	- 140 -
22.2.1	DEFINISI	- 140 -
22.2.2	PENJELASAN	- 140 -
22.2.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 142 -
22.2.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 143 -
22.2.5	CONTOH KASUS	- 144 -
BAB XXIII	PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL	- 145 -
23.1	PENDAPATAN NONOPERASIONAL.....	- 145 -
23.1.1	DEFINISI.....	- 145 -
23.1.2	PENJELASAN	- 145 -
23.1.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 145 -
23.1.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 146 -
23.1.5	CONTOH KASUS	- 146 -
23.2	BEBAN NONOPERASIONAL.....	- 147 -
23.2.1	DEFINISI.....	- 147 -
23.2.2	PENJELASAN	- 147 -
23.2.3	PERLAKUAN AKUNTANSI	- 147 -

23.2.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 148 -
23.2.5	CONTOH KASUS	- 148 -
BAB XXIV BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK TANGGUHAN -		149 -
24.1	DEFINISI	- 149 -
24.2	DASAR PENGATURAN	- 149 -
24.3	PENJELASAN	- 149 -
24.4	ILUSTRASI JURNAL.....	- 150 -
24.5	CONTOH KASUS	- 150 -
BAB XXV PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		- 153 -
25.1.	DEFINISI	- 153 -
25.2.	PENJELASAN	- 153 -
BAB XXVI LAPORAN ARUS KAS		- 154 -
26.1.	PENDAHULUAN	- 154 -
26.2.	DASAR PENGATURAN	- 154 -
26.3.	PENJELASAN	- 156 -
26.4.	ILUSTRASI LAPORAN ARUS KAS	- 157 -
BAB XXVII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		- 159 -
27.1.	PENDAHULUAN	- 159 -
27.1.	DASAR PENGATURAN	- 159 -
27.3.	PENJELASAN	- 159 -
BAB XXVIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		- 160 -
28.1.	PENDAHULUAN	- 160 -
28.2.	DASAR PENGATURAN	- 161 -
28.3.	PENJELASAN	- 163 -
28.4.	UNSUR-UNSUR	- 165 -
28.5.	PENGUNGKAPAN	- 167 -
Lampiran : Panduan Penyesuaian Atas Pos-Pos Laporan Keuangan dan Penyajian Komparatif Di Tahun Penerapan Awal.....		- 175 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas BPR yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil dari penatagunaan oleh manajemen (*stewardship of management*) dan akuntabilitas manajemen (*accountability of management*) atas pengelolaan sumber daya BPR.

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Kepatuhan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik, yang dapat membantu menurunkan risiko salah saji ataupun kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pihak-pihak yang berkepentingan karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Namun demikian, dalam beberapa hal BPR perlu dan dapat menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), yang efektif pada posisi laporan keuangan 1 Januari 2025. SAK EP menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang selama ini menjadi salah satu acuan BPR dalam menyusun laporan keuangan.

Sejalan dengan pemberlakuan SAK EP dimaksud, maka diperlukan penyesuaian atas Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR dengan mengacu pada SAK EP sebagai salah satu panduan bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan.

1.1.2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dari penyusunan Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR (untuk selanjutnya disebut PA BPR) diantaranya adalah:

- a. Membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu:
 - 1) Pengambilan keputusan ekonomi
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, antara lain:
 - a) nasabah;
 - b) investor;

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c) kreditur;
 - d) pemegang saham;
 - e) masyarakat;
 - f) Otoritas Jasa Keuangan;
 - g) Bank Indonesia;
 - h) Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - i) Pemerintah.
- 2) Penilaian prospek arus kas
- Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat bergantung pada kemampuan BPR untuk menghasilkan kas dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, dan pembayaran dividen. Persepsi dari pengguna laporan keuangan yang berkepentingan atas kemampuan BPR akan memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap BPR. Nasabah, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka perkirakan akan terjadi pada BPR yang bersangkutan.
- 3) Pemberian informasi atas sumber daya ekonomi
- Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi BPR, kewajiban BPR untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut.
- b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan BPR.
 - c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangan. Adapun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PA BPR ini tidak menghalangi BPR untuk memberikan informasi tambahan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR.

PA BPR ini menjadi acuan bagi seluruh BPR dalam menyusun laporan keuangannya.

1.1.3. ACUAN PENYUSUNAN

Acuan yang digunakan dalam menyusun PA BPR ini adalah:

- a. SAK EP;
- b. ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan
- d. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

1.1.4. KEDUDUKAN

- a. Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat penyusunan panduan ini. PA BPR bukan merupakan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR.

- b. Jika terdapat pengaturan dalam PA BPR ini yang bertentangan dengan SAK EP yang berlaku, maka laporan keuangan BPR mengacu pada SAK EP yang berlaku.
- c. Jika terdapat perubahan SAK EP di kemudian hari, maka penyusunan laporan keuangan BPR harus mengacu pada SAK EP yang berlaku.

1.1.5. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Ilustrasi jurnal, pos, dan contoh yang digunakan dalam PA BPR tidak bersifat mengikat dan berfungsi untuk membantu BPR dalam mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing.
- b. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam PA BPR ini menggambarkan akuntansi secara manual dan tidak terdapat transaksi antar kantor atau cabang.
- c. Transaksi BPR yang dicantumkan dalam PA BPR ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BPR.
- d. PA BPR ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR.
- e. Surat Bank Indonesia Nomor 13/48/DKBU tanggal 19 Januari 2011 perihal Batasan Materialitas Pendapatan Provisi Kredit dan Biaya Pendirian dalam penerapan SAK ETAP, pedoman, atau ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa tingkat materialitas pendapatan provisi kredit yang dapat diakui langsung sebagai pendapatan dalam periode berjalan (*cash basis*) adalah provisi untuk kredit dengan *plafond* sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lagi menjadi acuan sejak SEOJK ini berlaku.

1.1.6. KAITAN PERHITUNGAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN KUALITAS ASET (PPKA) DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

1.2. PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi dan pilihan dimaksud diatur dalam PA BPR ini atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka BPR mengikuti pilihan sesuai dengan PA BPR ini atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pedoman pencatatan aset keuangan menggunakan SAK EP Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar dan Bab 12 Isu terkait Instrumen Keuangan Lain.
- c. Penyajian laba rugi dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan laporan tunggal agar informasi yang disampaikan lebih komprehensif.
- d. Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

1.3. TATA CARA PENYESUAIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- a. Pada awal penerapan, BPR mulai menerapkan ketentuan dalam PA BPR ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK EP;
 - 2) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau liabilitas apabila SAK EP ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
 - 3) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, liabilitas, atau komponen ekuitas dalam SAK ETAP sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, liabilitas, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK EP;
 - 4) menerapkan SAK EP ini dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui; dan
 - 5) dampak penyesuaian di atas diakui secara langsung pada saldo laba periode sajian paling awal.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 35.7 dan 35.8)
- b. Pada awal penerapan, BPR tidak mengubah secara retrospektif akuntansi yang diterapkan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya untuk transaksi tertentu (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 35.9) serta dapat menggunakan satu atau lebih pengecualian dalam menyusun laporan keuangan pertama kalinya sesuai SAK EP (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 35.10).
- c. Khusus untuk penyajian kembali instrumen keuangan dasar seperti kredit dan surat berharga, jika tidak praktis bagi BPR untuk melakukan penyesuaian atau perhitungan dimaksud pada awal penerapan sesuai SAK EP, maka:
 - 1) BPR menghitung suku bunga efektif sesuai SAK EP pada periode paling awal sepanjang praktis untuk dilakukan; dan
 - 2) BPR mengungkapkan mengenai informasi ketidakpraktisan tersebut dalam laporan keuangan.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 35.11)
Tambahan CKPN yang perlu dibentuk BPR karena perubahan standar dari SAK ETAP menjadi SAK EP menjadi beban pada tahun penerapan awal SAK EP.
- d. Kondisi praktis atau tidak praktis sebagaimana huruf b ditentukan oleh masing-masing BPR. Kondisi tidak praktis yaitu ketika BPR tidak dapat menerapkan suatu persyaratan pada SAK EP setelah melakukan segala upaya yang wajar untuk melakukannya.
- e. Panduan penyesuaian atas pos-pos laporan keuangan dan informasi laporan keuangan komparatif sebagaimana Lampiran 1 PA BPR.

1.4. LAPORAN KEUANGAN

1.4.1. KETENTUAN UMUM

- a. Komponen laporan keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b. Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.
- c. Tanggung jawab atas laporan keuangan
Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- d. Mata uang pelaporan
 - 1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - 2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- e. Kelangsungan usaha
 - 1) Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen BPR membuat penilaian tentang kemampuan BPR untuk melanjutkan kelangsungan usaha. BPR dianggap memiliki kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi BPR atau menghentikan operasi.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.8)
 - 2) Jika manajemen BPR menyadari terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan BPR untuk melanjutkan kelangsungan usaha, maka BPR mengungkapkan ketidakpastian tersebut.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.9)
- f. Periode pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal BPR baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, BPR dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:
 - 1) fakta tersebut;
 - 2) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) fakta bahwa jumlah komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.10)
- g. Kebijakan akuntansi
 - 1) BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36)

- 2) Kebijakan akuntansi BPR harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, mencakup semua hal yang material, dan sesuai dengan SAK EP.
- 3) Dalam hal SAK EP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:
 - a) relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan; dan
 - b) dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - (1) secara tepat merepresentasikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BPR;
 - (2) menggambarkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa, atau kondisi, dan bukan hanya bentuk hukumnya (*substance over form*);
 - (3) bersifat netral, yaitu bebas dari bias;
 - (4) pertimbangan sehat; dan
 - (5) lengkap dalam seluruh hal yang material.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.4)

- 4) Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen harus mempertimbangkan:
 - a) persyaratan dan pedoman dalam SAK EP mengenai hal-hal yang serupa dan terkait;
 - b) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep dari pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban serta prinsip *pervasive* (mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari SAK EP); dan
 - c) persyaratan dan pedoman dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengenai hal-hal yang serupa dan terkait.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.5 dan 10.6)

h. Perubahan akuntansi

- 1) BPR memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali SAK EP secara spesifik mensyaratkan atau mengizinkan kategorisasi pos-pos serupa dengan kebijakan yang berbeda. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.7)
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) BPR mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika:
 - (1) dipersyaratkan oleh SAK EP; atau
 - (2) akan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.8)

- b) BPR mencatat perubahan kebijakan akuntansi yang diakibatkan oleh perubahan persyaratan SAK EP sesuai dengan ketentuan transisi (jika ada) dan mencatat seluruh perubahan lainnya secara retrospektif. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.11)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c) BPR menerapkan kebijakan akuntansi yang baru pada periode pelaporan sebelumnya (periode yang menjadi informasi komparatif) sepanjang penerapan retrospektif tersebut praktis. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.12)
 - d) Jika penerapan retrospektif tidak praktis, BPR menerapkan kebijakan akuntansi baru terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode kebijakan tersebut dapat diterapkan (contoh: periode berjalan) dan membuat penyesuaian terkait saldo awal dari komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.12)
- 3) Perubahan estimasi akuntansi
- a) Perubahan estimasi akuntansi merupakan penyesuaian jumlah aset atau liabilitas berdasarkan penilaian terkini dan perkiraan manfaat dan kewajiban masa depan dari aset dan liabilitas dimaksud. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.15)
 - b) Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan bukan merupakan koreksi atas kesalahan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.15)
 - c) Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif dengan memasukkan dampak perubahan tersebut dalam laba rugi pada:
 - (1) periode perubahan, jika perubahan hanya memengaruhi periode tersebut; atau
 - (2) periode perubahan dan periode masa depan, jika perubahan memengaruhi keduanya.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.16)
- 4) Kesalahan periode sebelumnya
- a) Kesalahan periode sebelumnya timbul dari kegagalan untuk menggunakan informasi yang andal atau penyalahgunaan informasi yang andal. Contoh kesalahan antara lain kesalahan matematis, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.19 dan 10.20)
 - b) Sepanjang praktis, BPR mengoreksi kesalahan yang material pada periode sebelumnya secara retrospektif dengan:
 - (1) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode laporan sebelumnya dimana kesalahan terjadi; atau
 - (2) jika kesalahan terjadi sebelum periode sebelumnya, maka BPR menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas untuk periode laporan yang paling awal.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.21)
 - c) Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan pada periode sebelumnya, BPR menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas pada periode laporan dimana penyajian kembali dapat diterapkan (mungkin merupakan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

periode berjalan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 10.22)

- i. Informasi komparatif
 - 1) Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
 - 2) Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.14)
- j. Materialitas dan agregasi
 - 1) Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - 2) Pos-pos yang jumlahnya material disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan selama memiliki sifat atau fungsi yang serupa.
 - 3) Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau penghilangan informasi (*omission*), atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.15 dan 3.16)

1.4.2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- a. Laporan keuangan BPR untuk tujuan umum terdiri dari:
 - 1) laporan posisi keuangan;
 - 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - 3) laporan perubahan ekuitas;
 - 4) laporan arus kas; dan
 - 5) catatan atas laporan keuangan.
- b. BPR membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada otoritas dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan BPR yang menyediakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan
 - a) Posisi keuangan BPR dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan BPR di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, distribusi imbal hasil dan arus kas, serta kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan BPR tergambar dalam laporan posisi keuangan.
 - b) Laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR pada tanggal tertentu - akhir periode pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 4.1)
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- a) Kinerja BPR diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi selama periode pelaporan yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas BPR dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas BPR dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja BPR tergambar dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
 - b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan keuangan yang menyajikan seluruh *item* penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode pelaporan.
 - c) Posisi keuntungan atau kerugian atas jenis laba/rugi yang sama disajikan secara net.
 - d) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara umum terdiri atas:
 - (1) pendapatan dan beban operasional;
 - (2) laba (rugi) operasional;
 - (3) pendapatan dan beban nonoperasional;
 - (4) laba (rugi) nonoperasional;
 - (5) laba (rugi) tahun berjalan sebelum pajak;
 - (6) taksiran pajak penghasilan;
 - (7) pendapatan pajak tangguhan;
 - (8) jumlah laba (rugi) tahun berjalan;
 - (9) penghasilan komprehensif lain;
 - (10) penghasilan komprehensif lain setelah pajak; dan
 - (11) total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- a) Informasi perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan BPR. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas.
 - b) Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi BPR untuk periode pelaporan, penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah investasi oleh pemilik, dan dividen serta distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik selama periode tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 6.2)
- 4) Laporan Arus Kas
- a) Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan BPR menghasilkan arus kas serta kebutuhan BPR untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas selama periode pelaporan. Informasi ini bermanfaat untuk menilai arus kas

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas.
- b) Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan
- a) Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas, diperlukan suatu penjelasan yang relevan. Penjelasan tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan-laporan di atas. Catatan atas laporan keuangan menyediakan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan.
 - b) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK EP yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk pemahaman laporan keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 8.2)

1.4.3. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- a. bersifat historis, yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
- b. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
- c. tidak terhindarkan dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
- d. hanya melaporkan informasi yang material;
- e. bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil;
- f. lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- g. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar BPR.

1.5. PRINSIP DASAR PERLAKUAN AKUNTANSI

1.5.1. PRINSIP UMUM

a. Aset

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B)
- 2) Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:
 - a) kas;
 - b) surat berharga;
 - c) penempatan pada bank lain;
 - d) kredit yang diberikan;
 - e) penyertaan modal;
 - f) agunan yang diambil alih;
 - g) aset tetap dan inventaris;
 - h) properti terbengkalai;
 - i) aset takberwujud;
 - j) aset lainnya; dan
 - k) CKPN.

Adapun pos-pos di atas yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

- 3) BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37)

b. Liabilitas

- 1) Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B)
- 2) Pos-pos liabilitas yang umum dimiliki oleh BPR antara lain:
 - a) simpanan;
 - b) liabilitas segera;
 - c) utang;
 - d) pinjaman;
 - e) dana setoran modal;
 - f) liabilitas imbalan kerja; dan
 - g) liabilitas lainnya.
- 3) Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:
 - a) BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b) kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- c) nilai liabilitas dapat diukur secara andal.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.39)
- c. Ekuitas
 - 1) Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4)
 - 2) Pos-pos ekuitas yang umum dimiliki oleh BPR antara lain:
 - a) modal; dan
 - b) saldo laba.
- d. Instrumen keuangan
 - 1) Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3)
 - 2) BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A)
 - 3) Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A)
 - 4) Contoh instrumen keuangan yang memenuhi definisi liabilitas namun diklasifikasikan sebagai ekuitas antara lain:
 - a) Instrumen dengan fitur opsi jual (*puttable instrument*), yang memiliki seluruh fitur sebagai berikut:
 - (1) memberikan hak kepada pemegang instrumen atas bagian prorata dari aset neto BPR saat BPR dilikuidasi;
 - (2) instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari kelas instrumen lain;
 - (3) tidak mencakup kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset kepada entitas lain; dan
 - (4) total arus kas ekspektasian (*expected cash flow*) yang dapat diatribusikan pada instrumen didasarkan pada laba rugi, perubahan aset neto yang diakui, atau perubahan nilai wajar aset neto yang diakui atau belum diakui.
 - b) Instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lainnya jika instrumen tersebut mensyaratkan kewajiban BPR untuk menyerahkan bagian prorata dari aset neto BPR saat BPR dilikuidasi.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.4)
 - 5) Contoh instrumen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas dan bukan ekuitas antara lain:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- a) Instrumen yang memiliki jumlah maksimum (*ceiling*) dalam distribusi aset neto ketika BPR dilikuidasi. Contoh: bagian prorata aset neto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), namun batas atas pembagian adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka instrumen tersebut tidak diklasifikasikan sebagai ekuitas.
- b) Instrumen dengan fitur opsi jual yang memenuhi syarat:
 - (1) pemegang instrumen memiliki hak atas jumlah yang diukur pada basis lain (sebagai contoh, terdapat peraturan lainnya selain SAK EP untuk mengukur instrumen tersebut); atau
 - (2) diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam laporan keuangan entitas anak. Dalam hal ini, instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk.
- c) Instrumen mewajibkan BPR untuk membuat pembayaran kepada pemegang instrumen sebelum likuidasi, seperti dividen wajib.
- d) Saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk menebus saham dengan jumlah tetap atau jumlah yang dapat ditentukan pada tanggal tertentu.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.5)
- e. Penghasilan dan beban
 - 1) Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41)
 - 2) Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42)
 - 3) Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila BPR tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan. BPR dapat tidak melakukan amortisasi atas biaya transaksi dan mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
- f. Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- g. Dalam hal BPR melakukan kegiatan di bidang pasar modal (contoh: melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal), maka BPR harus mengikuti pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di pasar modal.
- h. Dalam hal pos-pos dalam laporan keuangan memiliki perlakuan akuntansi spesifik, maka hal tersebut dijelaskan pada masing-masing bab terkait pos-pos dimaksud pada PA BPR ini.

1.5.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- a. Pengakuan adalah proses memasukkan ke dalam laporan keuangan, *item* yang memenuhi definisi aset, liabilitas, penghasilan, atau beban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) kemungkinan besar (*probable*) bahwa setiap manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan *item* tersebut akan mengalir ke atau dari BPR; dan
 - 2) *item* tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara andal.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.27)
- b. Pada saat pengakuan awal aset, BPR tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas aset, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:
 - 1) pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan; atau
 - 2) pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.
- c. Pengukuran merupakan proses untuk menentukan jumlah moneter dimana BPR mengukur aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam laporan keuangannya. Pengukuran melibatkan pemilihan dasar pengukuran yang diatur dalam SAK EP ini. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.33)
- d. Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika BPR:
 - 1) menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut;
 - 2) melakukan penempatan dengan suku bunga di luar suku bunga pasar; dan/atau
 - 3) melakukan penempatan secara diskonto atau premium.

PENGUKURAN ASET NONKEUANGAN DAN LIABILITAS NONKEUANGAN

BPR melakukan pengukuran atas aset nonkeuangan dan liabilitas nonkeuangan dengan pendekatan sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pengukuran Awal	Pengukuran Selanjutnya	Penyajian
Biaya historis	Aset Nonkeuangan: 1. Model biaya (mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan); atau 2. Model revaluasi (mana yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan).	1. Sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model biaya; atau 2. Sebesar jumlah revaluasian dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model revaluasi.
	Liabilitas Nonkeuangan: Estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban.	Estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban.
Nilai wajar	Nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.	Sebesar nilai wajar.

- a. Pengukuran pada pengakuan awal
Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46)
- b. Pengukuran selanjutnya
 - 1) Aset nonkeuangan
 - a) Sebagian besar aset nonkeuangan yang pada awalnya diakui BPR pada biaya historis, selanjutnya diukur dengan dasar pengukuran lainnya. Sebagai contoh:
 - (1) BPR mengukur aset tetap dengan:
 - (a) model biaya: diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau
 - (b) model revaluasi: diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan.
 - (2) BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.49)
 - b) SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- (1) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar;
 - (2) properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan
 - (3) aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi.
- (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50)
- 2) Liabilitas selain liabilitas keuangan
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51)

PENGUKURAN ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
BPR melakukan pengukuran atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pendekatan sebagai berikut:

Pengukuran Awal	Pengukuran Selanjutnya	Penyajian
Biaya historis	Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan: Biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>).	Sebesar biaya perolehan diamortisasi.

- a. Pengukuran pada pengakuan awal
- Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46)
- b. Pengukuran selanjutnya
- 1) BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk:
 - a) investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan
 - b) saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47)
- 2) Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- 3) Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari:
 - a) jumlah saat pengakuan awal;
 - b) dikurangi setiap pelunasan pokok;
 - c) ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - d) dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan).(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

1.5.3. PENYAJIAN

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BPR disertai pengungkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.2)
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. Saldo transaksi disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama BPR dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi - transaksi lainnya.
- f. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- g. Pada setiap lembar laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa "Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan".
- h. Konsistensi penyajian
 - 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BPR (sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku);
 - b) setelah penelaahan atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi yang berbeda akan lebih tepat untuk digunakan; atau
 - c) dipersyaratkan oleh SAK EP.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.11)
 - 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka BPR mereklasifikasi jumlah komparatif (informasi pada periode sebelumnya) kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- a) Jika BPR melakukan reklasifikasi, BPR mengungkapkan sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.
 - b) Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, BPR mengungkapkan alasannya.
- (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.12 dan 3.13)
- i. Selain memenuhi ketentuan di atas, penyajian laporan keuangan BPR mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.4. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan pos-pos keuangan dalam laporan keuangan BPR mengacu pada Bab XXVIII tentang Catatan atas Laporan Keuangan.

1.5.5. SALING HAPUS

- a. BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- b. Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- c. Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

BAB II
KAS

2.1. KAS DALAM MATA UANG RUPIAH

2.1.1. DEFINISI

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

2.1.2. PENJELASAN

- a. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan.
- b. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*), dan mata uang emas.

2.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI
Pengakuan dan Pengukuran

Kas diakui dan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian

Kas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

2.1.4. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat penerimaan setoran		
Db.	Kas	
Kr.	Rekening yang dituju	
Pada saat penarikan		
Db.	Rekening yang ditarik	
Kr.	Kas	
Pada saat pengeluaran		
Db.	Aset ... /Beban ...	
Kr.	Kas	
Pada saat penerimaan pemasukan		
Db.	Kas	
Kr.	Pendapatan ...	

Dalam penerapan *core banking system* di BPR, penjurnalan mutasi kas pada umumnya dilakukan pada akhir hari (*end of day process*).

2.1.5. CONTOH KASUS

BPR menerima setoran tabungan dari nasabah A senilai Rp1.000.000 dan penarikan dari nasabah B senilai Rp750.000 maka BPR mencatat setoran dimaksud sebagai berikut:

Pada saat penerimaan setoran		
Db.	Kas	Rp1.000.000
Kr.	Tabungan a.n. nasabah A	Rp1.000.000
Pada saat penarikan tabungan		
Db.	Tabungan a.n. nasabah B	Rp750.000
Kr.	Kas	Rp750.000

Dalam penerapan *core banking system* di BPR, penjurnalan mutasi kas pada umumnya dilakukan pada akhir hari (*end of day process*) dimana mutasi pada rekening nasabah dilakukan per transaksi sedangkan jurnal mutasi pada kas diakumulasikan per hari sebagai mutasi masuk atau mutasi keluar.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BPR membayarkan pembelian aset inventaris kantor senilai Rp5.000.000, maka BPR mencatat setoran dimaksud sebagai berikut:

Pada saat pembelian aset inventaris kantor		
Db.	Aset inventaris kantor	Rp5.000.000
Kr.	Kas	Rp5.000.000

2.2. KAS DALAM VALUTA ASING

2.2.1. DEFINISI

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. DASAR PENGATURAN

SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing.

2.2.3. PENJELASAN

BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2.2.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7)
- b. Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua.
- c. Selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs penutup dengan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian (operasional) dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Penyajian

Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

2.2.5. ILUSTRASI JURNAL

Ilustrasi jurnal transaksi pertukaran uang (*money changer*) dan *mark-to-market* kas dalam valuta asing dilakukan pada akhir bulan.

Pada saat perolehan		
Db.	Kas dalam valuta asing	
Kr.	Kas	
Pada saat penjualan kas dalam valuta asing		
Db.	Kas	
Kr.	Kas dalam valuta asing	
Db/Kr.	Pendapatan/beban operasional – keuntungan/kerugian transaksi valuta asing	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pada saat penilaian akhir periode pelaporan (keuntungan)	
Db.	Kas dalam valuta asing
Kr.	Pendapatan operasional – keuntungan selisih kurs valuta asing
Pada saat penilaian akhir periode pelaporan (kerugian)	
Db.	Beban operasional – kerugian selisih kurs valuta asing
Kr.	Kas dalam valuta asing

2.2.6. CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2025 BPR membeli valuta asing dalam bentuk USD senilai USD1.000 dengan *spot rate* Rp15.600/USD. Pada tanggal 10 Januari 2025, BPR melakukan penjualan USD 200 dengan kurs Rp15.800/USD. Pada akhir periode pelaporan yaitu tanggal 31 Januari 2025, nilai *spot rate* menjadi Rp15.700/USD serta diasumsikan BPR masih memiliki USD800. BPR mencatat transaksi dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Keuntungan/Kerugian Mark to Market

Nominal (a)	Saat Pembelian 1 Januari 2025		Akhir Periode Pelaporan 31 Januari 2025		Keuntungan / Kerugian Mark to Market (f) = (e) – (c)
	Rate (b)	Nilai dalam Rupiah (c) = (a) x (b)	Rate (d)	Nilai dalam Rupiah (e) = (a) x (d)	
USD1.000	Rp15.600	Rp15.600.000			
USD800	Rp15.600	Rp12.480.000	Rp15.700	Rp12.560.000	Rp80.000

Pada saat perolehan		
Db.	Kas dalam valuta asing	Rp15.600.000
Kr.	Kas	Rp15.600.000
Pada saat penjualan		
Db.	Kas (USD200xRp15.700)	Rp3.140.000
Db.	Kas dalam valuta asing (USD200xRp15.600)	Rp3.120.000
Kr.	Pendapatan operasional – Keuntungan transaksi valuta asing	Rp20.000
Pada saat penilaian akhir periode pelaporan		
Db.	Kas dalam valuta asing	Rp80.000
Kr.	Pendapatan operasional – keuntungan selisih kurs valuta asing	Rp80.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB III
SURAT BERHARGA

3.1. DEFINISI

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.

3.2. PENJELASAN

- a. Contoh surat berharga yang dapat dimiliki oleh BPR antara lain Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, atau Obligasi Pemerintah Daerah.
- b. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- d. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
- e. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- f. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- g. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan melalui pasar modal domestik. (Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal).
- h. Bagi BPR yang memiliki surat berharga berdasarkan prinsip syariah, maka perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

3.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*.
- b. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif.
- c. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penyajian

Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

3.4. ILUSTRASI JURNAL

- a. Surat berharga dengan sistem diskonto:

Pada saat membeli

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Surat berharga
Kr.	Kas/Rekening
Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan	
Db./Kr.	Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga – Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
Amortisasi diskonto dan biaya transaksi	
Db.	Surat berharga
Kr.	Pendapatan bunga
Pada saat jatuh tempo	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Surat berharga

b. Surat berharga dengan sistem bunga (*at par*):

Pada saat membeli	
Db.	Surat berharga
Kr.	Kas/Rekening
Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan	
Db./Kr.	Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga – Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
Perhitungan bunga dan amortisasi biaya transaksi	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual) – Surat berharga
Db./Kr.	Surat berharga
Kr.	Pendapatan surat berharga (<i>bunga amortised</i>)
Pada saat realisasi penerimaan bunga	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga
Pada saat jatuh tempo	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Surat berharga

c. Surat berharga dengan sistem bunga (*at discount/at premium*):

Pada saat membeli	
Db.	Surat berharga
Kr.	Kas/Rekening (sebesar harga pembelian)
Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan	
Db./Kr.	Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga – Surat berharga
Kr./Db.	Kas/Rekening (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi diskonto (<i>premium</i>) dan biaya transaksi	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual) – Surat berharga
Db./Kr.	Surat Berharga
Kr.	Pendapatan bunga – Surat berharga

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pada saat penerbit menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.	
Pada saat realisasi penerimaan bunga	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga
Pada saat jatuh tempo	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Surat berharga

- d. Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab XII tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

3.5. CONTOH KASUS

- a. Surat Berharga dalam Klasifikasi Biaya Perolehan Diamortisasi dengan Sistem Bunga (*at par*)
Pada tanggal 1 Februari 2025, BPR “SLS” membeli obligasi sebesar Rp200.000.000 dengan kupon bunga sebesar 7% pada 100. Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2026. Untuk membeli obligasi dimaksud, BPR “SLS” membayar *brokerage fee* sebesar Rp2.000.000 yang merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Suku bunga efektif yaitu sebesar 0.5%.

Tanggal	Pembayaran Pokok dan Bunga	Saldo Awal Arus Kas	Beban Bunga Sesuai Suku Bunga Efektif	Beban Bunga sesuai Kupon	Pembayaran Pokok	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas
a	b	c	d = f x EIR	e = p x i	f	g = d+e	f = c + g
01/02/2025	- 202,000,000		-	-	-	-	202,000,000
28/02/2025	1,166,667	202,000,000	1,004,509	- 1,166,667	-	- 162,157	201,837,843
31/03/2025	1,166,667	201,837,843	1,003,703	- 1,166,667	-	- 162,964	201,674,879
30/04/2025	1,166,667	201,674,879	1,002,893	- 1,166,667	-	- 163,774	201,511,105
31/05/2025	1,166,667	201,511,105	1,002,078	- 1,166,667	-	- 164,588	201,346,517
30/06/2025	1,166,667	201,346,517	1,001,260	- 1,166,667	-	- 165,407	201,181,110
31/07/2025	1,166,667	201,181,110	1,000,437	- 1,166,667	-	- 166,229	201,014,880
31/08/2025	1,166,667	201,014,880	999,611	- 1,166,667	-	- 167,056	200,847,824
30/09/2025	1,166,667	200,847,824	998,780	- 1,166,667	-	- 167,887	200,679,938
31/10/2025	1,166,667	200,679,938	997,945	- 1,166,667	-	- 168,722	200,511,216
30/11/2025	1,166,667	200,511,216	997,106	- 1,166,667	-	- 169,561	200,341,655
31/12/2025	1,166,667	200,341,655	996,263	- 1,166,667	-	- 170,404	200,171,251
31/01/2026	201,166,667	200,171,251	995,415	- 1,166,667	- 200,000,000	- 171,251	0

$p = \text{pokok}, i = \text{suku bunga kontraktual}$

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembelian surat berharga pada tanggal 1 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga	Rp200.000.000
Kr.	Kas/Rekening	Rp200.000.000

- 2) Biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga	Rp2.000.000
Kr.	Kas/Rekening	Rp2.000.000

- 3) Pengakuan bunga dan amortisasi biaya transaksi pada tanggal 28 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga	Rp1.166.667
Kr.	Surat berharga	Rp162.157
Kr.	Pendapatan bunga - Surat berharga	Rp1.004.509

- 4) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening	Rp1.166.667
-----	--------------	-------------

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga	Rp1.166.667
-----	---	-------------

Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi biaya dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal angka 3) dan 4) di atas.

- 5) Pada saat jatuh tempo tanggal 31 Januari 2026, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening	Rp200.000.000
Kr.	Surat berharga	Rp200.000.000

- b. Surat Berharga dalam Klasifikasi Biaya Perolehan Diamortisasi dengan Sistem Bunga (*at discount*)

Pada tanggal 1 Februari 2025, BPR “SLS” membeli obligasi sebesar Rp100.000.000 dengan kupon bunga sebesar 8% pada 99,425. Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2026. Untuk membeli obligasi dimaksud, BPR “SLS” membayar *brokerage fee* sebesar Rp500.000 yang diatribusikan secara langsung. Asumsi jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari. Suku bunga efektif yaitu sebesar 0.67%.

Tanggal	Pembayaran Pokok dan Bunga	Saldo Awal Arus Kas	Beban Bunga Sesuai Suku Bunga Efektif	Beban Bunga sesuai Kupon	Pembayaran Pokok	Diskonto yang belum diamortisasi	Saldo Akhir Arus Kas
a	b	c	d = f x EIR	e = p x i	f	g = d + e	h
01/02/2025	- 99.925.000		-	-	-	-	99.925.000
28/02/2025	666.667	99.925.000	672.689	- 666.667	-	6.022	99.931.022
31/03/2025	666.667	99.931.022	672.729	- 666.667	-	6.062	99.937.084
30/04/2025	666.667	99.937.084	672.770	- 666.667	-	6.103	99.943.188
31/05/2025	666.667	99.943.188	672.811	- 666.667	-	6.144	99.949.332
30/06/2025	666.667	99.949.332	672.852	- 666.667	-	6.186	99.955.518
31/07/2025	666.667	99.955.518	672.894	- 666.667	-	6.227	99.961.745
31/08/2025	666.667	99.961.745	672.936	- 666.667	-	6.269	99.968.015
30/09/2025	666.667	99.968.015	672.978	- 666.667	-	6.312	99.974.326
31/10/2025	666.667	99.974.326	673.021	- 666.667	-	6.354	99.980.680
30/11/2025	666.667	99.980.680	673.063	- 666.667	-	6.397	99.987.077
31/12/2025	666.667	99.987.077	673.107	- 666.667	-	6.440	99.993.517
31/01/2026	100.666.667	99.993.517	673.150	- 666.667	- 100.000.000	6.483	0

p = pokok, i = suku bunga kontraktual

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembelian Surat Berharga pada tanggal 1 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga	Rp99.925.000
Kr.	Kas/Rekening	Rp99.925.000

- 2) Pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 28 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan bunga dan amortisasi diskon		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga	Rp666.667
Db.	Surat berharga	Rp6.022
Kr.	Pendapatan bunga - Surat berharga	Rp672.689
Pembayaran kupon obligasi		
Db.	Kas/Rekening	Rp666.667
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat berharga Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi diskon dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal di atas.	Rp666.667

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi biaya dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal angka 2) di atas.

- 3) Pada saat jatuh tempo tanggal 31 Januari 2026, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening	Rp100.000.000
Kr.	Surat berharga	Rp100.000.000

- c. Surat Berharga tanpa Bunga (*Zero Coupon Bond*) dalam Klasifikasi Biaya Perolehan Diamortisasi

Pada tanggal 1 Februari 2025, BPR “LAM” membeli surat berharga tanpa bunga (*zero coupon bond*) dengan nilai Rp200.000.000 dan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan yang dimiliki hingga tanggal 31 Juli 2025. Surat utang dimaksud dibeli dengan harga Rp190.000.000. Untuk membeli obligasi dimaksud, BPR “LAM” membayar *brokerage fee* sebesar Rp1.000.000 yang merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan.

Tanggal	Pembayaran Pokok dan Bunga	Saldo Awal Arus Kas	Beban Bunga Sesuai Suku Bunga Efektif	Beban Bunga sesuai Kontraktual	Pokok	Diskonto yang belum diamortisasi	Saldo Akhir Arus Kas
a	b	c	d = f x EIR	e = p x i	f	g = d+e	f = c + g
01/02/2025	- 191,000,000	191,000,000	-	-	-	-	191,000,000
28/02/2025	-	192,471,370	1,471,370	-	-	1,471,370	192,471,370
31/03/2025	-	193,954,076	1,482,705	-	-	1,482,705	193,954,076
30/04/2025	-	195,448,203	1,494,127	-	-	1,494,127	195,448,203
31/05/2025	-	196,953,840	1,505,637	-	-	1,505,637	196,953,840
30/06/2025	-	198,471,076	1,517,236	-	-	1,517,236	198,471,076
31/07/2025	200,000,000	- 0	1,528,924	-	- 200,000,000	1,528,924	- 0

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembelian surat berharga *zero coupon bond* pada tanggal 1 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Pembelian surat berharga <i>zero coupon bond</i>		
Db.	Surat berharga	Rp190.000.000
Kr.	Kas/Rekening	Rp190.000.000
Biaya transaksi yang dapat diatribusikan		
Db.	Surat berharga	Rp1.000.000
Kr.	Kas/Rekening	Rp1.000.000

- 2) Pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 28 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan bunga dan amortisasi diskon		
Db.	Surat berharga	Rp1.471.370
Kr.	Pendapatan bunga - Surat berharga	Rp1.471.370
	Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi diskon dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal di atas.	

- 3) Pada saat jatuh tempo tanggal 31 Juli 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan bunga dan amortisasi diskon		
Db.	Surat berharga	Rp1.528.924
Kr.	Pendapatan bunga - Surat berharga	Rp1.528.924
Surat Berharga jatuh tempo		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp200.000.000
Kr.	Surat berharga	Rp200.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB IV

PENEMPATAN PADA BANK LAIN

4.1. DEFINISI

- a. Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.
- b. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.

4.2. PENJELASAN

- a. Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- b. Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. *Deposit on call* merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- d. Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- e. Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

4.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto.
- b. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penyajian

- a. Penempatan pada bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
- b. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN.
- c. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*off-setting account*) dari penempatan tersebut.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- d. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

4.4. ILUSTRASI JURNAL

a. Umum

Pada saat penempatan pada bank lain	
Db.	Penempatan pada bank lain
Kr.	Kas/Rekening BPR
Pada saat pengakuan pendapatan bunga (tanpa diskonto)	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain
Pada saat pengakuan pendapatan bunga (dengan diskonto)	
Db.	Penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain
Pengakuan pendapatan bunga dibalik jika bank lain menunggak atau terdapat penurunan kualitas	
Db.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain
Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab XII tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada bank lain (tanpa diskonto)	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain
Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada bank lain (dengan diskonto)	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Penempatan pada bank lain
Pada saat penarikan/pencairan penempatan pada bank lain	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Penempatan pada bank lain

- b. Pada saat BPR mengakui pendapatan bunga lebih dari realisasi di rekening koran, BPR melakukan jurnal balik atas selisih tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan bunga dibalik jika BPR menerima kurang dari yang diperkirakan sebelumnya, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain

- c. Ketika BPR mencairkan penempatan pada bank lain sebelum jatuh tempo, BPR melakukan jurnal balik dan mengakui denda/*penalty* (jika ada), dicatat dalam jurnal:

Pengakuan pendapatan bunga dibalik jika BPR menerima kurang dari yang diperkirakan sebelumnya, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain
Pengakuan sanksi administratif berupa denda/ <i>penalty</i> namun belum dibayarkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban nonoperasional – Beban lainnya
Kr.	Liabilitas segera – Denda/ <i>penalty</i>

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pembayaran denda/ <i>penalty</i> , dicatat dalam jurnal	
Db.	Liabilitas segera – Denda/ <i>penalty</i>
Kr.	Kas/rekening

d. Penempatan pada Sertifikat Deposito

1)	Penempatan sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
	Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito
	Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito
	Kr.	Kas/Rekening BPR
2)	Penerimaan bunga sertifikat deposito serta pengakuan bunga dan amortisasi diskon, dicatat dalam jurnal:	
	Pembayaran bunga sertifikat deposito	
	Db.	Kas/Rekening
	Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Sertifikat deposito
	Pengakuan bunga dan amortisasi diskon	
	Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Sertifikat deposito
	Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito
	Kr.	Pendapatan bunga - Sertifikat deposito
3)	Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
	1) Pengakuan bunga dan amortisasi diskon	
	Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Sertifikat deposito
	Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito
	Kr.	Pendapatan bunga - Sertifikat deposito
	2) Pencairan sertifikat deposito	
	Db.	Kas/Rekening BPR
	Kr.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito

4.5. CONTOH KASUS

a.	Penempatan Deposito	
	Pada tanggal 1 Juni 2025, BPR “MAS” menempatkan deposito di Bank “LSA” sebesar Rp100.000.000 dengan suku bunga 8%. BPR “MAS” bermaksud untuk memiliki deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2026. Tidak terdapat biaya transaksi.	
	Asumsi:	
	1) Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.	
	2) Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.	
	Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:	
	1) Penempatan deposito pada tanggal 1 Juni 2025, dicatat dalam jurnal:	
	Db.	Penempatan pada bank lain – Deposito
	Kr.	Kas/Rekening BPR
		Rp100.000.000 Rp100.000.000
	2) Tanggal 30 Juni 2025, pada saat pengakuan bunga, dicatat dalam jurnal:	
	Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain
	Kr.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain (Rp100.000.000 x 8% x 30/360)
		Rp666.666 Rp666.666

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 3) Tanggal 1 Juli 2025, pada saat penerimaan bunga deposito, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening BPR	Rp666.666
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain	Rp666.666

Jurnal pengakuan bunga dan penerimaan bunga deposito bulanan dicatat sebagaimana angka 2) dan 3).

- 4) Dalam hal BPR melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo dan terkena denda sebesar Rp50.000 pada tanggal 31 Juli 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan pendapatan bunga dibalik jika bank menerima kurang dari yang diperkirakan sebelumnya, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain	Rp22.222
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain (Rp666.666- Rp Rp644.444 (sebagai contoh, berkurang satu hari dari ekspektasi))	Rp22.222
Pengakuan denda/ <i>penalty</i> namun belum dibayarkan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban nonoperasional – Beban lainnya	Rp50.000
Kr.	Liabilitas segera – Denda/ <i>penalty</i>	Rp50.000
Pembayaran denda/ <i>penalty</i> , dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas segera – Denda/ <i>penalty</i>	Rp50.000
Kr.	Kas/rekening	Rp50.000
Pencairan deposito, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp100.000.000
Kr.	Penempatan pada bank lain - Deposito	Rp100.000.000

b. Penempatan Giro

Pada tanggal 1 Juni 2025, BPR “ADM” menempatkan giro di Bank “ASA” sebesar Rp100.000.000 dengan suku bunga yang pada umumnya 1%. Tidak terdapat biaya transaksi.

Asumsi:

- 1) Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.
- 2) Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penempatan giro pada tanggal 1 Juni 2025, dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada bank lain – Giro	Rp100.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR	Rp100.000.000

- 2) Tanggal 30 Juni 2025, pada saat pengakuan bunga berdasarkan estimasi rekening koran, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain	Rp83.333
Kr.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain (Rp100.000.000 x 1% x 30/360)	Rp83.333

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 3) Sesuai mutasi rekening koran, mengingat terdapat fluktuasi saldo, pendapatan bunga seharusnya sebesar Rp83.333 menjadi Rp75.000 karena terdapat perubahan saldo menjadi Rp90.000.000. Atas penyesuaian tersebut, BPR melakukan penyesuaian sebagai berikut:

Db.	Pendapatan bunga – Penempatan pada bank lain	Rp8.333
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain (Rp100.000.000 x 1% x 30/360) - (Rp90.000.000 x 1% x 30/360)	Rp8.333

- 4) Tanggal 1 Juli 2025, pada saat pencairan giro dan penerimaan bunga giro, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening BPR	Rp100.075.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Penempatan pada bank lain (Rp83.334- Rp8.334)	Rp75.000
Kr.	Penempatan pada bank lain	Rp100.000.000

- c. Penempatan Sertifikat Deposito
Pada tanggal 1 Februari 2025, BPR “DEF” menempatkan sertifikat deposito di Bank “DTD” sebesar Rp200.000.000 dengan suku bunga 8% pada Rp198.000.000. BPR “DEF” bermaksud untuk memiliki sertifikat deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2025. Tidak terdapat biaya transaksi.

- Asumsi:
1) Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.
2) Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.

Tanggal	Beban Bunga Sesuai Suku Bunga Efektif	Beban Bunga sesuai Kontraktual	Pokok	Pokok dan Bunga	Diskonto yang belum diamortisasi	Saldo Akhir Arus Kas
a	b = g x EIR	c = p x i	d	e	f = c + d	g
2/1/2025	-	-	-	198,000,000	-	198,000,000
2/28/2025	1,659,749	1,333,333	-	1,333,333	326,416	198,326,416
3/31/2025	1,662,485	1,333,333	-	1,333,333	329,152	198,655,568
4/30/2025	1,665,245	1,333,333	-	1,333,333	331,911	198,987,479
5/31/2025	1,668,027	1,333,333	-	1,333,333	334,694	199,322,173
6/30/2025	1,670,832	1,333,333	-	1,333,333	337,499	199,659,672
7/31/2025	1,673,662	1,333,333	200,000,000	201,333,333	340,328	0

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penempatan sertifikat deposito pada tanggal 1 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito	Rp198.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR	Rp198.000.000

- 2) Pembayaran bunga sertifikat deposito serta pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 28 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan bunga dan amortisasi diskon		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Sertifikat deposito	Rp1.333.333
Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito	Rp326.416
Kr.	Pendapatan bunga - Sertifikat deposito	Rp1.659.749

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi diskon dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal di atas.	
Pembayaran bunga sertifikat deposito		
Db.	Kas/Rekening	Rp1.333.333
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Sertifikat deposito	Rp1.333.333

3) Pada saat jatuh tempo tanggal 31 Juli 2025, dicatat dalam jurnal:

Pengakuan bunga dan amortisasi diskon		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Sertifikat deposito	Rp1.333.333
Db.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito	Rp340.328
Kr.	Pendapatan bunga - sertifikat deposito	Rp1.673.662
Pencairan sertifikat deposito		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp200.000.000
Kr.	Penempatan pada bank lain - Sertifikat deposito	Rp200.000.000
Pembayaran bunga sertifikat deposito		
Db.	Kas/Rekening	Rp1.333.333
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Sertifikat deposito	Rp1.333.333

d. Penempatan Deposito dengan Penerimaan Hadiah pada Awal Transaksi

Pada tanggal 1 Juni 2025, BPR “ABS” menempatkan deposito di Bank “TUR” sebesar Rp1.000.000.000 dengan suku bunga kontraktual sebesar 1,2%. Selain itu BPR “ABS” menerima hadiah atas penempatan deposito berupa kendaraan bermotor dengan nilai wajar sebesar Rp24.000.000 pada tanggal transaksi. BPR “ABS” bermaksud untuk memiliki deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2026. Tidak terdapat biaya transaksi.

Asumsi:

- 1) Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.
- 2) Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.

Tanggal	Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas	Bunga Efektif	Bunga Kontraktual	Penempatan	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas
a	b	c	d = f x EIR	e = p x i	f	g = d+e	f = c + g
01/02/2025	- 976,000,000		-	-	-	-	976,000,000
28/02/2025	1,000,000	976,000,000	2,966,783	- 1,000,000	-	1,966,783	977,966,783
31/03/2025	1,000,000	977,966,783	2,972,761	- 1,000,000	-	1,972,761	979,939,544
30/04/2025	1,000,000	979,939,544	2,978,758	- 1,000,000	-	1,978,758	981,918,302
31/05/2025	1,000,000	981,918,302	2,984,773	- 1,000,000	-	1,984,773	983,903,075
30/06/2025	1,000,000	983,903,075	2,990,806	- 1,000,000	-	1,990,806	985,893,881
31/07/2025	1,000,000	985,893,881	2,996,858	- 1,000,000	-	1,996,858	987,890,738
31/08/2025	1,000,000	987,890,738	3,002,927	- 1,000,000	-	2,002,927	989,893,666
30/09/2025	1,000,000	989,893,666	3,009,016	- 1,000,000	-	2,009,016	991,902,682
31/10/2025	1,000,000	991,902,682	3,015,123	- 1,000,000	-	2,015,123	993,917,805
30/11/2025	1,000,000	993,917,805	3,021,248	- 1,000,000	-	2,021,248	995,939,053
31/12/2025	1,000,000	995,939,053	3,027,392	- 1,000,000	-	2,027,392	997,966,445
31/01/2026	1,001,000,000	997,966,445	3,033,555	- 1,000,000	- 1,000,000,000	2,033,555	0

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1. Penempatan deposito pada tanggal 1 Juni 2025, dicatat dalam jurnal:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Db. Penempatan pada bank lain - Deposito Kr. Kas/Rekening BPR	Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000
2.	Penerimaan hadiah atas penempatan deposito pada tanggal 1 Juni 2025, dicatat dalam jurnal:	
	Db. Aset tetap dan inventaris Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima - Penempatan pada bank lain	Rp24.000.000 Rp24.000.000
3.	Tanggal 30 Juni 2025, pada saat pengakuan bunga, dicatat dalam jurnal:	
	Db. Pendapatan bunga yang akan diterima - Penempatan pada bank lain Db. Penempatan pada bank lain - Deposito Kr. Pendapatan bunga - Penempatan pada bank lain	Rp1.000.000 Rp1.966.783 Rp2.966.783
4.	Tanggal 1 Juli 2025, pada saat penerimaan bunga deposito, dicatat dalam jurnal:	
	Db. Kas/Rekening BPR Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima - Penempatan pada bank lain	Rp1.000.000 Rp1.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB V

KREDIT YANG DIBERIKAN

5.1. PEMBERIAN KREDIT

5.1.1. DEFINISI

- a. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.
- b. Kredit Sindikasi (*Syndicated Loans*) adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.
- c. Kredit *Channeling* (penerusan kredit):
 - 1) Kredit *Channeling* adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. BPR tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut BPR menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.
 - 2) Kredit *Channeling* tidak diakui sebagai kredit yang diberikan, tetapi dicatat di rekening administratif (*off-balance sheet*) dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada praktiknya kredit *chanelling* tersebut BPR tidak memiliki kewenangan memutus pemberian kredit.
- d. Kredit *Executing* (pengelolaan kredit) adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari BPR. Dalam hal ini BPR bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung BPR, ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- e. Kredit yang Dijamin adalah bagian kredit yang dananya berasal dari BPR dan risiko kredit dijamin oleh pemerintah, asuransi kredit atau pihak lain.
- f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
- g. Plafon adalah jumlah maksimum Kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/Kredit.
- h. Kelonggaran Tarik adalah fasilitas Kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur dari Plafon yang tersedia.
- i. Pokok Kredit adalah saldo Kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).
- j. Kewajiban Debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada BPR berupa Pokok Kredit ditambah tagihan bunga, denda (*penalty*), dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- k. Bunga Kredit Kontraktual adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas Kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- l. Provisi Kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat Kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- m. Denda (*penalty*) adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo, termasuk imbalan atas pembayaran atau pelunasan dipercepat dari jatuh tempo.
- n. *Commitment Fee* adalah biaya yang harus dibayar debitur atas bagian Kredit yang telah diberikan namun belum digunakan.

5.1.2. PENJELASAN

- a. Kredit berdasarkan pengertiannya memiliki unsur-unsur antara lain:
 - 1) persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;
 - 2) aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar Plafon yang disepakati;
 - 3) jangka waktu tertentu;
 - 4) pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan;
 - 5) risiko;
 - 6) jaminan dan/atau agunan (jika ada);
 - 7) tujuan pemakaian Kredit yang jelas dan sesuai dengan peraturan internal BPR dan eksternal seperti peraturan pemerintah; dan
 - 8) besaran nilai Kredit dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari peminjam.
- b. Jenis Kredit menurut penggunaannya, antara lain Kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.
- c. Suku bunga efektif yang dihitung berdasarkan arus kas kontraktual pada dasarnya tidak dapat diubah sampai dengan seluruh Kewajiban Debitur dibayar lunas, termasuk ketika BPR memberikan keringanan suku bunga melalui restrukturisasi Kredit atau melakukan revisi estimasi pembayaran atau penerimaan bunga dan pokok. Ketentuan penetapan suku bunga efektif sebagai berikut:
 - 1) Kredit dengan suku bunga tetap memiliki satu suku bunga efektif yang dihitung pada awal pemberian Kredit.
 - 2) Kredit dengan suku bunga tetap dan penyaluran secara bertahap (*multi-disburse*) memiliki 3 (tiga) kemungkinan perlakuan akuntansi, yaitu:
 - a) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang telah diketahui, maka BPR dapat menghitung suku bunga efektifnya.
 - b) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi dengan andal, yang memiliki rekening terpisah untuk setiap tahapan penarikan kredit, maka BPR dapat menghitung suku bunga efektif pada setiap tahapan penarikan kredit; atau
 - c) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi dengan andal, yang memiliki 1 rekening

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

untuk seluruh tahapan penarikan Kredit, maka BPR dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi.

- 3) Apabila BPR memberikan Kredit dengan skema bunga meningkat atau menurun (*step up/down*) yang telah diketahui sejak awal (sudah diperjanjikan), maka hal tersebut sudah harus diperhitungkan pada saat perhitungan awal arus kas untuk menentukan suku bunga efektif.
 - 4) Kredit dengan suku bunga mengambang, perhitungan suku bunga efektif didasarkan pada arus kas dengan menggunakan suku bunga yang diestimasi pada awal pemberian Kredit. Selanjutnya, suku bunga efektif akan disesuaikan pada saat penyesuaian suku bunga berikutnya. Suku bunga efektif akan berubah setiap kali dilakukan perubahan estimasi arus kas masa datang yang dihasilkan dari perubahan tingkat suku bunga. Amortisasi pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung dilanjutkan dengan menggunakan suku bunga efektif yang baru.
- d. Dalam menghitung suku bunga efektif, BPR harus memperhatikan secara cermat biaya transaksi yang meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian Kredit) yang harus diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. Jenis-jenis pendapatan dan beban tersebut antara lain:
- 1) *fee* yang terkait dengan jangka waktu Kredit, antara lain *fee* (seperti *origination fee*) dan Provisi Kredit yang tertuang dalam perjanjian Kredit, sepanjang *fee*/provisi tersebut secara langsung timbul pada saat pemberian/pembelian Kredit (akuisisi aset). Jika *fee*/Provisi Kredit diterima sekaligus untuk Kredit dengan penarikan secara bertahap maka *fee*/provisi tersebut dialokasikan secara proporsional sesuai jumlah penarikan Kredit dalam setiap tahap; dan
 - 2) biaya yang dikeluarkan BPR dalam rangka pemberian/pembelian Kredit antara lain *fee* atau imbalan yang dibayarkan kepada *developer*, biaya materai, karyawan atau pihak lain untuk setiap aplikasi Kredit yang disetujui.
- e. BPR dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
- 1) kredit dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi (contoh: kredit yang bersifat *revolving* seperti kredit modal kerja, dan kredit dengan penyaluran secara bertahap dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak dapat ditentukan secara andal serta hanya memiliki 1 rekening untuk seluruh tahapan penarikan Kredit); dan
 - 2) besarnya biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan dan perbedaan suku bunga kredit dan suku bunga pasar atas kredit sejenis yang besarnya material.
- Amortisasi biaya transaksi atas kredit yang tidak memiliki jangka waktu tetap dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur kredit.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- f. Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:
 - 1) Kredit yang termasuk kategori *performing* diakui secara akrual;
 - 2) Kredit yang termasuk kategori *non-performing* diakui secara kas.

Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *performing* digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *non-performing* harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo dan apabila masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga.
- g. Pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit *non-performing*, maka BPR membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur dan bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- h. BPR harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi.
- i. Dalam laporan keuangan, BPR dapat menghentikan pengakuan (*derecognition*) atas Kredit jika dan hanya jika:
 - 1) BPR tidak lagi memiliki hak kontraktual atas arus kas masa datang dari Kredit tersebut; atau
 - 2) BPR telah mentransfer Kredit tersebut dimana transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

5.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI Pengakuan dan Pengukuran

- a. Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi.
- b. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif.
- c. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
- d. Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai “kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya, yaitu:
 - 1) Kredit modal kerja akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran.
 - 2) Kredit investasi, Kredit modal kerja (KMK) Plafon menurun, atau Kredit konsumsi akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap (tidak bertambah) pada saat setoran diterima.
- e. Untuk Kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai tercatat (*carrying amount*) pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan nilai Kredit yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo, yaitu jika BPR:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 1) menerima pendapatan (di luar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian Kredit tersebut;
 - 2) memberikan Kredit dengan suku bunga di luar suku bunga pasar (misalnya 5% (lima persen), sedangkan suku bunga pasar untuk Kredit sejenis adalah 8% (delapan persen)). Dalam menentukan suku bunga pasar, BPR dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku di BPR, misalnya *base lending rate* ditambah *risk premium* dan *profit margin* untuk Kredit sejenis.
- f. Selisih antara nilai tercatat Kredit (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai Kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo Kredit diamortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif.
- g. BPR dapat mengakui sekaligus pendapatan provisi dan biaya transaksi yang tidak material.
- h. Pada saat menghitung biaya perolehan diamortisasi, BPR yang memberikan kredit dengan perjanjian suku bunga *flat* melakukan konversi arus kas cicilan pokok dan bunga dari suku bunga *flat* ke suku bunga anuitas. Angka yang dipergunakan dalam tabel perhitungan biaya perolehan diamortisasi adalah angka arus kas cicilan pokok dan bunga suku bunga anuitas. Contoh tabel perhitungan suku bunga efektif sebagaimana bagian 5.1.5 - Contoh Kasus. Meskipun secara akuntansi BPR harus membuat tabel angsuran dengan suku bunga efektif, sistem BPR kepada nasabah masih tetap dapat menggunakan suku bunga *flat* sesuai dengan tujuan bisnis.

Penyajian

- a. Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
- b. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.
- c. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.
- d. Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.
- e. Apabila BPR terlebih dahulu menerima pembayaran provisi sedangkan kredit baru ditarik nasabah melewati periode akhir bulan pelaporan, maka saldo "Kredit yang Diberikan" akan bernilai negatif. Saldo dimaksud dapat disajikan di sisi kewajiban lainnya.

5.1.4. ILUSTRASI JURNAL

- a. Pemberian Kredit secara langsung oleh BPR
- 1) Pada saat penandatanganan perjanjian kredit:
- | | |
|--|--|
| Menerima provisi dari debitur | |
| Db. | Kas/Rekening debitur |
| Kr. | Kredit yang diberikan |
| Pembayaran beban yang dapat diatribusikan | |
| Db. | Kredit yang diberikan |
| Kr. | Kas/Rekening debitur |
| Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit di rekening administratif | |
| Db. | Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan |
| Kr. | Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik |
- 2) Pada saat pencairan kredit kepada debitur:
- | | |
|--|--|
| Pencairan kredit | |
| Db. | Kredit yang diberikan |
| Kr. | Kas/Rekening debitur |
| Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal di rekening administratif untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum ditarik debitur. | |
| Db. | Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik |
| Kr. | Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan |
- 3) Pada saat pengakuan pendapatan bunga, BPR melakukan amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur:
- | | |
|----------------------------|--|
| Pengakuan pendapatan bunga | |
| Db. | Pendapatan bunga kredit yang akan diterima (bunga kontraktual) |
| Db/Kr. | Kredit yang diberikan |
| Kr. | Pendapatan bunga |
- Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.
- 4) Pada saat menerima setoran dari debitur:
- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Db. | Kas/Rekening |
| Db/Kr. | Pendapatan bunga yang akan diterima |
| Db/Kr. | Kredit yang diberikan |
- 5) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab XII tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- 6) Jika kondisi debitur *default* dan BPR dapat melakukan klaim kepada perusahaan asuransi:
- a) Klaim kepada perusahaan asuransi dan BPR tidak memiliki kewajiban subrograsi untuk menagih kepada nasabah atas nama perusahaan asuransi:
- | | |
|---|------------------------|
| Pada saat mengajukan klaim, dicatat dalam jurnal: | |
| Db. | Tagihan klaim asuransi |
| Kr. | Kredit yang diberikan |
| Pada saat pencadangan CKPN atas tagihan klaim asuransi, dicatat dalam jurnal: | |

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Beban kerugian penurunan nilai - Tagihan klaim asuransi
Kr.	CKPN - Tagihan klaim asuransi
Pada saat BPR menerima klaim, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Tagihan klaim asuransi
Db.	CKPN- Tagihan klaim asuransi
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai - Tagihan klaim asuransi

- b) Apabila BPR tidak mereklasifikasi Kredit menjadi tagihan klaim asuransi dan terdapat kewajiban subrogasi kepada perusahaan asuransi:

Pada saat BPR mengirimkan tagihan klaim kepada perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Tidak ada pencatatan jurnal.	
Pada saat BPR menerima hasil klaim asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	CKPN – Kredit yang diberikan
Kr.	Kredit yang diberikan (jumlah yang diklaim kepada perusahaan asuransi)
Kewajiban subrogasi BPR, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening administratif – kewajiban subrogasi
Kr.	Rekening administratif kontra - kewajiban subrogasi

Ketika debitur melakukan pembayaran (pasca penerimaan klaim dari perusahaan asuransi):

Pembayaran untuk porsi BPR, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Kredit yang Diberikan
Pembayaran untuk porsi perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening perusahaan asuransi
Kr.	Rekening perantara
Pembayaran kepada perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening perantara
Kr.	Rekening perusahaan asuransi
Melakukan pembalikan atas kewajiban subrogasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening administratif kontra – kewajiban subrogasi
Kr.	Rekening administratif - kewajiban subrogasi

b. Pemberian Kredit *Channeling*

- 1) BPR menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. BPR hanya bertindak sebagai administrator terhadap Kredit yang diberikan oleh pihak ketiga, tidak terdapat aliran dana masuk atau keluar melalui BPR, sehingga BPR tidak mencatat aset maupun kewajiban keuangan:

a) Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyediaan dana

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
b) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit, dengan debitur, dicatat dalam jurnal:	
- BPR tidak menerima provisi kredit karena BPR berada dalam posisi tidak menerima manfaat dan risiko atas kredit. - BPR tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun BPR mencatat sebagai kredit alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.	
c) Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
Kr.	Kas/Rekening debitur
Bersamaan dengan jurnal ini, BPR mencatat pada rekening administratif, yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	
d) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:	
BPR tidak melakukan penjurnalan.	
e) Pada saat menyelesaikan pembayaran bunga dan/atau pokok kredit setelah dikurangi dengan <i>fee</i> penerusan kredit kepada penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
Kr.	Kas/Rekening penyedia dana
f) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:	
(1) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
(2) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

- 2) BPR menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. BPR bertindak sebagai administrator dan menerima dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit mengurangi kewajiban keuangannya (risiko kredit ditanggung oleh pihak ketiga)

a) Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening penyediaan dana
Kr.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
b) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit, dengan debitur, dicatat dalam jurnal	
BPR tidak menerima provisi kredit karena BPR berada dalam posisi tidak menerima manfaat dan risiko atas kredit.	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

• BPR tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun BPR mencatat sebagai kredit alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.	
c) Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
Kr.	Kas/Rekening debitur
Bersamaan dengan jurnal ini, BPR mencatat pada rekening administratif, yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	
d) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:	
BPR tidak melakukan penjurnalan.	
e) Pada saat menerima pembayaran bunga kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kewajiban lain – Setoran bunga kredit <i>chanelling</i>
Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	
f) Pada saat menerima pembayaran pokok kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Kewajiban lain – Setoran bunga kredit <i>chanelling</i>
Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	
g) Pada saat menyelesaikan pembayaran bunga dan/atau pokok kredit setelah dikurangi dengan <i>fee</i> penerusan kredit kepada penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban lain - Setoran bunga Kredit <i>channeling</i>
Db.	Kewajiban lain - Setoran pokok kredit <i>channeling</i>
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
Kr.	Kas/Rekening penyedia dana
h) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:	
(1) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
(2) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

- 3) BPR tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan.
- a) Penarikan kredit sudah dilakukan oleh debitur langsung ke penyedia dana, BPR hanya diminta untuk mengadministrasikannya.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b) Pada saat menerima perintah untuk membukukan bukti penarikan kredit, BPR mencatat pada rekening administratif yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.
- c) Tata cara pembukuan lainnya sama seperti apabila BPR menerima dana dari penyedia dana, yaitu

(1) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:	
BPR tidak melakukan penjurnalan.	
(2) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:	
(a) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
(b) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

- 4) BPR hanya melakukan *referral* kepada debitur.

Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:	
a) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit
b) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

5.1.5. CONTOH KASUS

- a. Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Tetap
Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR “RST” memberikan Kredit kepada debitur “JKL” dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:
Plafon Kredit : Rp145.000.000
Jangka waktu : 1 tahun atau 12 bulan
Jenis Kredit : Modal Kerja
Bunga : 15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi : 1,5% atau Rp2.175.000
Beban BPR yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp2.000.000.
Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan BPR sebesar $Rp144.825.000 = Rp145.000.000 - Rp2.175.000 + Rp2.000.000$. Asumsi:
1) Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
2) Pembayaran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan.
(Lihat Tabel 1 dan Tabel 2)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 1: Mutasi Rekening Koran

Transaksi	Tanggal	Pembayaran Pokok	Bunga	Cicilan Bulanan	Amortisasi Provisi dan Biaya	Saldo Pinjaman Flat	Saldo Provisi
0	1-Sep-23					145,000,000	175,000
1	30-Sep-23	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	132,916,667	160,417
2	31-Oct-23	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	120,833,333	145,833
3	30-Nov-23	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	108,750,000	131,250
4	31-Dec-23	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	96,666,667	116,667
5	31-Jan-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	84,583,333	102,083
6	29-Feb-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	72,500,000	87,500
7	31-Mar-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	60,416,667	72,917
8	30-Apr-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	48,333,333	58,333
9	31-May-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	36,250,000	43,750
10	30-Jun-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	24,166,667	29,167
11	31-Jul-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	12,083,333	14,583
12	31-Aug-24	12,083,333	1,812,500	13,895,833	14,583	0	0

Cicilan pokok *flat* sebesar Rp13.083.333 (Rp145.000.000/12)
Bunga sebesar Rp1.812.500 (Rp145.000.000*15%/12)

Tabel 2: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – Biaya Perolehan Diamortisasi (Konversi *Flat to Anuitas*)

Transaksi	Tanggal	Saldo Pokok Awal	Cicilan Bulanan	Bunga Anuitas	Cicilan Pokok Anuitas	Saldo Pokok Akhir
0	1-Sep-23		(145,000,000)			145,000,000
1	30-Sep-23	145,000,000	13,895,833	3,216,893	10,678,941	134,321,059
2	31-Oct-23	134,321,059	13,895,833	2,979,975	10,915,858	123,405,201
3	30-Nov-23	123,405,201	13,895,833	2,737,802	11,158,031	112,247,170
4	31-Dec-23	112,247,170	13,895,833	2,490,256	11,405,578	100,841,592
5	31-Jan-24	100,841,592	13,895,833	2,237,218	11,658,616	89,182,977
6	29-Feb-24	89,182,977	13,895,833	1,978,566	11,917,267	77,265,710
7	31-Mar-24	77,265,710	13,895,833	1,714,176	12,181,658	65,084,052
8	30-Apr-24	65,084,052	13,895,833	1,443,920	12,451,913	52,632,139
9	31-May-24	52,632,139	13,895,833	1,167,669	12,728,165	39,903,974
10	30-Jun-24	39,903,974	13,895,833	885,288	13,010,545	26,893,429
11	31-Jul-24	26,893,429	13,895,833	596,643	13,299,190	13,594,239
12	31-Aug-24	13,594,239	13,895,833	301,595	13,594,239	0

Tabel 3: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – Biaya Perolehan Diamortisasi (Konversi *Anuitas to Effective*)

Periode	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
01/01/2025	- 144,825,000		-	-	-	-	144,825,000
31/01/2025	13,895,833	144,825,000	3,241,673.43	- 10,678,941	- 3,216,893	24,781	134,170,840
28/02/2025	13,895,833	134,170,840	3,003,197.29	- 10,915,858	- 2,979,975	23,222	123,278,204
31/03/2025	13,895,833	123,278,204	2,759,383.24	- 11,158,031	- 2,737,802	21,581	112,141,754
30/04/2025	13,895,833	112,141,754	2,510,111.82	- 11,405,578	- 2,490,256	19,856	100,756,032
31/05/2025	13,895,833	100,756,032	2,255,260.85	- 11,658,616	- 2,237,218	18,043	89,115,460
30/06/2025	13,895,833	89,115,460	1,994,705.46	- 11,917,267	- 1,978,566	16,140	77,214,332
31/07/2025	13,895,833	77,214,332	1,728,317.96	- 12,181,658	- 1,714,176	14,142	65,046,817
31/08/2025	13,895,833	65,046,817	1,455,967.81	- 12,451,913	- 1,443,920	12,048	52,606,951
30/09/2025	13,895,833	52,606,951	1,177,521.53	- 12,728,165	- 1,167,669	9,853	39,888,639
31/10/2025	13,895,833	39,888,639	892,842.69	- 13,010,545	- 885,288	7,554	26,885,649
30/11/2025	13,895,833	26,885,649	601,791.77	- 13,299,190	- 596,643	5,149	13,591,607
31/12/2025	13,895,833	13,591,607	304,226.15	- 13,594,239	- 301,595	2,632	0

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Januari 2025, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit, dicatat dalam jurnal:

Pencatatan provisi yang dibebankan kepada debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp2.175.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp2.175.000
Pencatatan biaya transaksi terkait penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit		
Db.	Kredit yang diberikan	Rp2.000.000
Kr.	Kas/Rekening penyedia jasa	Rp2.000.000

- 2) Pada saat pencairan kredit dan pembukuan rekening administratif untuk fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah, dicatat dalam jurnal:

Saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit		
--	--	--

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp145.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik	Rp145.000.000
Saat pencairan kredit seluruhnya kepada debitur		
Db.	Kredit yang diberikan	Rp145.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp145.000.000
Db.	Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik	Rp145.000.000
Kr.	Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp145.000.000

- 3) Tanggal 31 Januari 2025, pada saat pembebanan bunga kepada debitur dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif, dicatat dalam jurnal:

Pada saat pembebanan tagihan bunga kepada debitur		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Kredit yang diberikan	Rp3.216.893
Db.	Kredit yang diberikan	Rp24.781
Kr.	Pendapatan bunga - Kredit yang diberikan	Rp3.241.673

Jurnal pembebanan bunga kepada debitur dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif setiap bulannya sama dengan jurnal angka 3) di atas sesuai dengan Tabel 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.

- 4) Tanggal 5 Februari 2025, pada saat pembayaran bunga dan pokok oleh debitur:

Pada saat menerima setoran bunga dari debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp.13.895.833
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit yang Diberikan	Rp3.216.893
Kr.	Kredit yang Diberikan	Rp10.678.941

b. Kredit Channeling

Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR “ADM” melakukan penerusan kredit (*channeling*) kepada debitur “ASA” dengan data sesuai perjanjian kredit antara BUK dengan debitur sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp145.000.000
Jangka waktu : 1 tahun atau 12 bulan
Jenis Kredit : Modal Kerja
Bunga : 15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi : 1,5% atau Rp2.175.000

Beban BPR yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp2.000.000. Pelunasan Kredit dilakukan di akhir periode Kredit.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan BPR sebesar $Rp144.825.000 = Rp145.000.000 + Rp2.000.000 - Rp2.175.000$. Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).

Atas penerusan kredit tersebut, BPR mendapatkan *fee* sebesar 10% dari plafon kredit (Rp2.900.000)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 1: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – Biaya Perolehan Diamortisasi

Periode	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
a	b	c	d=c x EIR	e	f= p x i	g = d - f	h
01/01/2025	- 144.825.000		-	-	-	-	144.825.000
31/01/2025	1.812.500	144.825.000	1.826.099	-	1.812.500	13.599	144.838.599
28/02/2025	1.812.500	144.838.599	1.826.271	-	1.812.500	13.771	144.852.370
31/03/2025	1.812.500	144.852.370	1.826.445	-	1.812.500	13.945	144.866.315
30/04/2025	1.812.500	144.866.315	1.826.620	-	1.812.500	14.120	144.880.435
31/05/2025	1.812.500	144.880.435	1.826.798	-	1.812.500	14.298	144.894.734
30/06/2025	1.812.500	144.894.734	1.826.979	-	1.812.500	14.479	144.909.212
31/07/2025	1.812.500	144.909.212	1.827.161	-	1.812.500	14.661	144.923.874
31/08/2025	1.812.500	144.923.874	1.827.346	-	1.812.500	14.846	144.938.720
30/09/2025	1.812.500	144.938.720	1.827.533	-	1.812.500	15.033	144.953.753
31/10/2025	1.812.500	144.953.753	1.827.723	-	1.812.500	15.223	144.968.976
30/11/2025	1.812.500	144.968.976	1.827.915	-	1.812.500	15.415	144.984.391
31/12/2025	146.812.500	144.984.391	1.828.109	- 145.000.000	1.812.500	15.609	0

Suku bunga efektif: 1,26% per bulan

Keterangan:

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Tabel 2: Mutasi Rekening Koran Debitur

Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran Bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur
j	k	l	m = k+l	n	o = p x i	p	q = n + o + p	r = m + q
01/01/2025	-	145.000.000	145.000.000	-	-	-	-	145.000.000
31/01/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
28/02/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/03/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
30/04/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/05/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
30/06/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/07/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/08/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
30/09/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/10/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
30/11/2025	145.000.000	-	145.000.000	-	1.812.500	1.812.500	-	145.000.000
31/12/2025	145.000.000	- 145.000.000	-	-	1.812.500	1.812.500	-	-

- 1) Skema 1: BPR menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. BPR hanya bertindak sebagai administrator terhadap kredit yang diberikan oleh pihak ketiga, tidak terdapat aliran dana masuk atau keluar melalui BPR, sehingga BPR tidak mencatat aset maupun kewajiban keuangan

a) Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening penyediaan dana	Rp145.000.000
Kr.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)	Rp145.000.000
b) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit, dengan debitur, dicatat dalam jurnal		
- BPR tidak menerima provisi kredit karena BPR berada dalam posisi tidak menerima manfaat dan risiko atas kredit. - BPR tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun BPR mencatat		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

sebagai kredit alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.		
c) Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)	Rp145.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp145.000.000
Bersamaan dengan jurnal ini, BPR mencatat pada rekening administratif, yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.		
d) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur serta penerimaan pembayaran bunga dan pokok, dicatat dalam jurnal:		
BPR tidak melakukan penjurnalan.		
e) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:		
(1) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit	Rp2.900.000
(2) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000

- 2) Skema 2: BPR menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. BPR bertindak sebagai administrator dan menerima dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit mengurangi kewajiban keuangannya (risiko kredit ditanggung oleh pihak ketiga)

a) Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyediaan dana	Rp145.000.000
Kr.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)	Rp145.000.000
b) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit, dengan debitur, dicatat dalam jurnal		
- BPR tidak menerima provisi kredit karena BPR berada dalam posisi tidak menerima manfaat dan risiko atas kredit. - BPR tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun BPR mencatat sebagai kredit alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.		
c) Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)	Rp145.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitor Bersamaan dengan jurnal ini, BPR mencatat pada rekening administratif, yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	Rp145.000.000
d) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitor, dicatat dalam jurnal:		
BPR tidak melakukan penjurnalan.		
e) Pada tanggal 31 Januari 2025, saat menerima pembayaran bunga kredit dari debitor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitor	Rp1.812.500
Kr.	Kewajiban lain – Setoran bunga kredit <i>chanelling</i> Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	Rp1.812.500
f) Pada tanggal 31 Desember 2025, saat menerima pembayaran pokok kredit dari debitor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening	Rp145.000.000
Kr.	Kewajiban lain – Setoran bunga kredit <i>chanelling</i> Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif yaitu rekening kredit alihan dengan pengelolaan penagihan.	Rp145.000.000
g) Pada saat menyelesaikan pembayaran bunga dan/atau pokok kredit setelah dikurangi dengan <i>fee</i> penerusan kredit kepada penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban lain - Setoran bunga Kredit <i>channeling</i>	Rp1.812.500
Db.	Kewajiban lain - Setoran pokok kredit <i>channeling</i>	Rp145.000.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit	Rp2.900.000
Kr.	Kas/Rekening penyedia dana (Rp145.000.000+Rp1.812.500-Rp2.900.000)	Rp143.923.500
h) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:		
(1) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit	Rp2.900.000
(2) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp2.900.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000
-----	--	-------------

- 3) Skema 3: BPR tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan.

a) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur serta penerimaan pembayaran bunga dan pokok, dicatat dalam jurnal:		
BPR tidak melakukan penjurnalan.		
b) Apabila <i>fee</i> harus ditagihkan kepada penyedia dana:		
(1) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit	Rp2.900.000
(2) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000

- 4) Skema 4: BPR hanya melakukan *referral* kepada debitur.

a) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit	Rp2.900.000
b) Pada saat menerima <i>fee</i> kredit <i>channeling</i> dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp2.900.000
Kr.	Pendapatan <i>fee</i> penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)	Rp2.900.000

- c. Kredit dengan Suku Bunga Kontraktual *Flat* dan Dilakukan Konversi ke Perhitungan Bunga EIR
Pada tanggal 1 September 2025 BPR memberikan kredit kepada nasabah dengan plafon sebesar Rp60.000.000, tingkat suku bunga 6%, biaya provisi Rp600.000 dengan jangka waktu 30 bulan. Nasabah membayar angsuran pokok dan bunga secara bulanan.
(Lihat Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 1: Angsuran Kontraktual

Transaksi	Tanggal	Pembayaran Pokok	Bunga	Cicilan Bulanan	Amortisasi Provisi	Saldo Pinjaman Flat	Saldo Provisi
0	1-Sep-25					60,000,000	600,000
1	30-Sep-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	58,000,000	580,000
2	29-Oct-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	56,000,000	560,000
3	27-Nov-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	54,000,000	540,000
4	26-Dec-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	52,000,000	520,000
5	24-Jan-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	50,000,000	500,000
6	22-Feb-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	48,000,000	480,000
7	23-Mar-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	46,000,000	460,000
8	21-Apr-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	44,000,000	440,000
9	20-May-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	42,000,000	420,000
10	18-Jun-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	40,000,000	400,000
11	17-Jul-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	38,000,000	380,000
12	15-Aug-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	36,000,000	360,000
13	13-Sep-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	34,000,000	340,000
14	12-Oct-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	32,000,000	320,000
15	10-Nov-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	30,000,000	300,000
16	9-Dec-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	28,000,000	280,000
17	7-Jan-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	26,000,000	260,000
18	5-Feb-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	24,000,000	240,000
19	6-Mar-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	22,000,000	220,000
20	4-Apr-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	20,000,000	200,000
21	3-May-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	18,000,000	180,000
22	1-Jun-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	16,000,000	160,000
23	30-Jun-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	14,000,000	140,000
24	29-Jul-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	12,000,000	120,000
25	27-Aug-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	10,000,000	100,000
26	25-Sep-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	8,000,000	80,000
27	24-Oct-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	6,000,000	60,000
28	22-Nov-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	4,000,000	40,000
29	21-Dec-27	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	2,000,000	20,000
30	19-Jan-28	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	-	-

Tabel 2: Konversi Perhitungan Flat ke Anuitas

KONVERSI KE TABEL ANUITAS						
Pinjaman Pokok		60,000,000		Tenor Kredit	30 bulan	
Bunga Flat		6%	0.50%	Cicilan Pokok	2,000,000	
Provisi 1%		600,000		Cicilan Bunga	300,000	
Cicilan bulan		2,300,000		Suku Bunga Anuitas		0.93%
Transaksi	Tanggal	Saldo Pokok Awal	Cicilan Bulanan	Bunga Anuitas	Cicilan Pokok Anuitas	Saldo Pokok Akhir
0	1-Sep-25		(60,000,000)			60,000,000
1	30-Sep-25	60,000,000	2,300,000	555,898	1,744,102	58,255,898
2	29-Oct-25	58,255,898	2,300,000	539,739	1,760,261	56,495,637
3	27-Nov-25	56,495,637	2,300,000	523,430	1,776,570	54,719,067
4	26-Dec-25	54,719,067	2,300,000	506,970	1,793,030	52,926,037
5	24-Jan-26	52,926,037	2,300,000	490,358	1,809,642	51,116,395
6	22-Feb-26	51,116,395	2,300,000	473,592	1,826,408	49,289,987
7	23-Mar-26	49,289,987	2,300,000	456,670	1,843,330	47,446,656
8	21-Apr-26	47,446,656	2,300,000	439,592	1,860,408	45,586,248
9	20-May-26	45,586,248	2,300,000	422,355	1,877,645	43,708,603
10	18-Jun-26	43,708,603	2,300,000	404,959	1,895,041	41,813,562
11	17-Jul-26	41,813,562	2,300,000	387,401	1,912,599	39,900,963
12	15-Aug-26	39,900,963	2,300,000	369,681	1,930,319	37,970,644
13	13-Sep-26	37,970,644	2,300,000	351,797	1,948,203	36,022,441
14	12-Oct-26	36,022,441	2,300,000	333,747	1,966,253	34,056,187
15	10-Nov-26	34,056,187	2,300,000	315,529	1,984,471	32,071,717
16	9-Dec-26	32,071,717	2,300,000	297,143	2,002,857	30,068,860
17	7-Jan-27	30,068,860	2,300,000	278,587	2,021,413	28,047,447
18	5-Feb-27	28,047,447	2,300,000	259,859	2,040,141	26,007,305
19	6-Mar-27	26,007,305	2,300,000	240,957	2,059,043	23,948,262
20	4-Apr-27	23,948,262	2,300,000	221,880	2,078,120	21,870,142
21	3-May-27	21,870,142	2,300,000	202,626	2,097,374	19,772,768
22	1-Jun-27	19,772,768	2,300,000	183,194	2,116,806	17,655,962
23	30-Jun-27	17,655,962	2,300,000	163,582	2,136,418	15,519,544
24	29-Jul-27	15,519,544	2,300,000	143,788	2,156,212	13,363,332
25	27-Aug-27	13,363,332	2,300,000	123,811	2,176,189	11,187,143
26	25-Sep-27	11,187,143	2,300,000	103,648	2,196,352	8,990,791
27	24-Oct-27	8,990,791	2,300,000	83,299	2,216,701	6,774,091
28	22-Nov-27	6,774,091	2,300,000	62,762	2,237,238	4,536,852
29	21-Dec-27	4,536,852	2,300,000	42,034	2,257,966	2,278,886
30	19-Jan-28	2,278,886	2,300,000	21,114	2,278,886	0

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 3: Konversi Perhitungan Anuitas ke Efektif

No Trans	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok Anuitas	Bunga Anuitas	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D=(In-1)	E=(Dn-1)xElR	F	G=p x i	H=E-G	I=D-F+H
0	1-Sep-25	(59,500,000)						59,500,000
1	30-Sep-25	2,300,000	59,500,000	585,255	1,744,102	555,898	29,357	57,785,255
2	29-Oct-25	2,300,000	57,785,255	568,388	1,760,261	539,739	28,649	56,053,643
3	27-Nov-25	2,300,000	56,053,643	551,356	1,776,570	523,430	27,926	54,304,999
4	26-Dec-25	2,300,000	54,304,999	534,156	1,793,030	506,970	27,186	52,539,155
5	24-Jan-26	2,300,000	52,539,155	516,787	1,809,642	490,358	26,429	50,755,941
6	22-Feb-26	2,300,000	50,755,941	499,246	1,826,408	473,592	25,655	48,955,188
7	23-Mar-26	2,300,000	48,955,188	481,534	1,843,330	456,670	24,864	47,136,722
8	21-Apr-26	2,300,000	47,136,722	463,647	1,860,408	439,592	24,055	45,300,369
9	20-May-26	2,300,000	45,300,369	445,584	1,877,645	422,355	23,229	43,445,953
10	18-Jun-26	2,300,000	43,445,953	427,344	1,895,041	404,959	22,385	41,573,297
11	17-Jul-26	2,300,000	41,573,297	408,924	1,912,599	387,401	21,523	39,682,221
12	15-Aug-26	2,300,000	39,682,221	390,323	1,930,319	369,681	20,642	37,772,544
13	13-Sep-26	2,300,000	37,772,544	371,539	1,948,203	351,797	19,742	35,844,082
14	12-Oct-26	2,300,000	35,844,082	352,570	1,966,253	333,747	18,824	33,896,653
15	10-Nov-26	2,300,000	33,896,653	333,415	1,984,471	315,529	17,885	31,930,067
16	9-Dec-26	2,300,000	31,930,067	314,071	2,002,857	297,143	16,928	29,944,139
17	7-Jan-27	2,300,000	29,944,139	294,537	2,021,413	278,587	15,950	27,938,676
18	5-Feb-27	2,300,000	27,938,676	274,811	2,040,141	259,859	14,952	25,913,486
19	6-Mar-27	2,300,000	25,913,486	254,891	2,059,043	240,957	13,934	23,868,377
20	4-Apr-27	2,300,000	23,868,377	234,775	2,078,120	221,880	12,895	21,803,152
21	3-May-27	2,300,000	21,803,152	214,461	2,097,374	202,626	11,834	19,717,612
22	1-Jun-27	2,300,000	19,717,612	193,947	2,116,806	183,194	10,753	17,611,559
23	30-Jun-27	2,300,000	17,611,559	173,231	2,136,418	163,582	9,649	15,484,790
24	29-Jul-27	2,300,000	15,484,790	152,312	2,156,212	143,788	8,524	13,337,102
25	27-Aug-27	2,300,000	13,337,102	131,187	2,176,189	123,811	7,376	11,168,288
26	25-Sep-27	2,300,000	11,168,288	109,854	2,196,352	103,648	6,205	8,978,142
27	24-Oct-27	2,300,000	8,978,142	88,311	2,216,701	83,299	5,012	6,766,453
28	22-Nov-27	2,300,000	6,766,453	66,556	2,237,238	62,762	3,795	4,533,009
29	21-Dec-27	2,300,000	4,533,009	44,588	2,257,966	42,034	2,554	2,277,597
30	19-Jan-28	2,300,000	2,277,597	22,403	2,278,886	21,114	1,289	0

BPR menghitung suku bunga efektif berdasarkan arus kas kontraktual dan membuat tabel perhitungan amortisasi biaya provisi dan biaya transaksi sesuai dengan suku bunga efektif.

- 1) Pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit, dicatat dalam jurnal:

Pencatatan provisi yang dibebankan kepada debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp600.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp600.000

- 2) Pada saat pencairan kredit dan pembukuan rekening administratif untuk fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah, dicatat dalam jurnal:

Saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit		
Db.	Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp60.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik	Rp60.000.000
Saat pencairan kredit seluruhnya kepada debitur		
Db.	Kredit yang diberikan	Rp60.000.000
Kr.	Kas/Rekening Debitur	Rp60.000.000
Db.	Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik	Rp60.000.000
Kr.	Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp60.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 3) Pada saat pembebanan bunga kepada debitur dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif, dicatat dalam jurnal:

Pada saat pembebanan tagihan bunga kepada debitur		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit yang diberikan	Rp555.898
Db.	Kredit yang Diberikan	Rp29.357
Kr.	Pendapatan bunga - Kredit yang diberikan	Rp585.255

Jurnal pembebanan bunga kepada debitur dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif setiap bulannya sama dengan jurnal angka 3) di atas sesuai dengan Tabel 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.

- 4) Pada saat pembayaran bunga dan pokok oleh debitur:

Pada saat menerima setoran bunga dari debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp2.300.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit yang diberikan	Rp555.898
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp1.744.102

- 5) Jika pada bulan ke-9 debitur melakukan pelunasan dipercepat maka BPR mengakui beban kerugian pelunasan dalam laba rugi, dicatat dalam jurnal:

Pada saat pelunasan dipercepat pada bulan ke-9		
Db.	Kas/Rekening debitur (Tabel 1)	Rp42.000.000
Db.	Beban kerugian pelunasan/ Pendapatan bunga	Rp.1.445.953
Kr.	Kredit yang diberikan (Tabel 3)	Rp43.445.953

- d. Kredit dengan Skema Penarikan dan Setoran Sewaktu-Waktu (tidak terjadwal)

Pada tanggal 1 Januari 2025 BPR memberikan kredit kepada nasabah dengan plafon sebesar Rp100.000.000, dengan skema penarikan dan setoran sewaktu-waktu (tidak terjadwal) dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, biaya provisi Rp1.000.000, biaya transaksi Rp250.000, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan perjanjian kredit, nasabah membayar bunga secara bulanan secara *flat*.

- 1) Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit, dicatat dalam jurnal:

Pencatatan provisi yang dibebankan kepada debitur tanggal 1 Januari 2025		
Db.	Kas	Rp1.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan - Biaya perolehan diamortisasi	Rp1.000.000
Pencatatan biaya transaksi terkait penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit tanggal 1 Januari 2025		
Db.	Kredit yang diberikan	Rp250.000
Kr.	Kas	Rp250.000
Saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit tanggal 1 Januari 2025		
Db.	Rekening lawan - Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Kr.	Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum ditarik	Rp100.000.000
2)	Pada saat terdapat penarikan dana sebesar Rp10.000.000 oleh debitur pada tanggal 16 Januari 2025, dicatat dalam jurnal:		
	Pencatatan penarikan fasilitas kredit tanggal 16 Januari 2025		
	Db.	Kredit yang diberikan	Rp10.000.000
	Kr.	Kas	Rp10.000.000
3)	Pada saat pengakuan pendapatan bunga dan amortisasi provisi dan biaya transaksi:		
	a. Pencatatan pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Januari 2025		
	Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit (15%*15/360*Rp10.000.000)=Rp62.500	Rp62.500
	Kr.	Pendapatan bunga	Rp62.500
	b. Pencatatan pengakuan provisi pada tanggal 31 Januari 2025		
	Db.	Kredit yang diberikan (Rp1.000.000/12-Rp250.000/12)=Rp62.500	Rp62.500
	Kr.	Pendapatan bunga *provisi dan biaya transaksi diakui secara garis lurus karena skema kredit tidak terjadwal	Rp62.500
4)	Pada saat menerima pembayaran bunga dari debitur:		
	Pencatatan pembayaran bunga dari debitur tanggal 31 Januari 2025		
	Db.	Kas	Rp62.500
	Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit	Rp62.500
5)	Pada saat terdapat penarikan dana sebesar Rp10.000.000 oleh debitur pada tanggal 1 Februari 2025, dicatat dalam jurnal:		
	Pencatatan penarikan fasilitas kredit tanggal 1 Februari 2025		
	Db.	Kredit yang diberikan	Rp10.000.000
	Kr.	Kas	Rp10.000.000
	Jurnal pengakuan pendapatan bunga dan amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan sama dengan angka (3) sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit.		
6)	Pada saat debitur melunasi kredit pada tanggal kredit jatuh tempo:		
	Pencatatan pelunasan kredit pada tanggal 31 Desember 2025		
	Db.	Kas	Rp20.129.167
	Kr.	Kredit yang diberikan	Rp20.000.000
	Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Kredit (15%*31/360*Rp20.000.000=Rp129.167)	Rp129.167

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

5.2. RESTRUKTURISASI KREDIT

5.2.1. DEFINISI

- a. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Restrukturisasi Kredit:
 - 1) penjadwalan kembali, antara lain dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau perubahan jangka waktu;
 - 2) persyaratan kembali, antara lain dilakukan melalui:
 - a) perubahan jumlah pembayaran atau angsuran;
 - b) perubahan jangka waktu;
 - c) penurunan suku bunga Kredit;
 - d) penghapusan sebagian kewajiban; atau
 - 3) penataan kembali, antara lain dilakukan melalui penambahan fasilitas Kredit BPR atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

5.2.2. PENJELASAN

- a. Pada umumnya, Restrukturisasi Kredit akan mengubah atau memodifikasi arus kas kontraktual awal atas kredit yang diberikan.
- b. Jika BPR merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya, BPR menyesuaikan jumlah tercatat aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk merefleksikan arus kas aktual dan estimasi arus kas yang direvisi. BPR menghitung ulang jumlah tercatat dengan menghitung nilai kini estimasi arus kas masa depan berdasarkan suku bunga efektif orisinal instrumen keuangan. BPR mengakui penyesuaian tersebut sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi pada tanggal revisi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.20)
- c. Dalam perhitungan nilai kini arus kas berdasarkan persyaratan yang baru, BPR wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit awal (*original interest rate*) sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Jika aset keuangan tersebut memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.20)

5.2.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Penyajian

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

5.2.4. ILUSTRASI JURNAL

Restrukturisasi Kredit dengan modifikasi persyaratan Kredit

Pada saat mengakui kerugian modifikasi
--

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Beban kerugian penurunan nilai
Kr.	Kredit yang diberikan
Pada saat amortisasi dan pengakuan akrual bunga	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Db/Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Pendapatan bunga
	Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.
Pada saat penerimaan angsuran dari debitur	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Kredit yang diberikan

5.2.5. CONTOH KASUS

- a. Restrukturisasi Kredit dengan Modifikasi Persyaratan Kredit
- BPR “ABC” menyalurkan kredit sebagai berikut:
- Plafond* : Rp100.000.000
- Jangka waktu : 01/01/2026 – 31/12/2027 (24 bulan)
- Suku bunga : 20%
- Provisi : 1% atau Rp1.000.000
- Biaya Transaksi : Rp500.000
- Angsuran Pokok : Rp4.166.667 per bulan
- Pada tanggal 31 Januari 2027, Kredit direstrukturisasi dengan penurunan suku bunga kontraktual dari 20% menjadi 15%. Restrukturisasi ini tidak mengubah tujuan pinjaman dan tidak mengubah tenor pinjaman selama 3 tahun. Adapun pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan sebagaimana Tabel 1. Restrukturisasi ini ditetapkan tidak menyebabkan penghentian pengakuan Kredit. Berdasarkan perhitungan dari tabel (lihat Tabel 1 dan Tabel 2), kerugian modifikasi adalah sebesar Rp1.252.517 (Rp49.861.345 – Rp48.608.829) yang akan diamortisasi sepanjang sisa tenor kredit.
- Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2027, sebagai berikut:

Pada saat pengakuan kerugian kredit modifikasian		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp1.252.517
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp1.252.517
Pada saat amortisasi dan pengakuan akrual bunga		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Kredit yang diberikan	Rp625.000
Db.	Kredit yang diberikan	Rp207.568
Kr.	Pendapatan bunga	Rp832.568
	Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga	
Pada saat menerima pembayaran dari debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp4.791.667

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Kredit yang diberikan	Rp625.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp4.166.667

Tabel 1. Estimasi Arus Kas sebelum Restrukturisasi

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D=(In-1)	E=(Dn-1)x EIR	F	G=p x i	H=E-G	I=D+E+F+G
0	01-Jan-26	(99.500.000)						99.500.000
1	31-Jan-26	5.833.333	99.500.000	1.704.228	4.166.667	1.666.667	37.561	95.370.895
2	28-Feb-26	5.763.889	95.370.895	1.633.505	4.166.667	1.597.222	36.283	91.240.511
3	31-Mar-26	5.694.444	91.240.511	1.562.760	4.166.667	1.527.778	34.982	87.108.827
4	30-Apr-26	5.625.000	87.108.827	1.491.993	4.166.667	1.458.333	33.660	82.975.820
5	31-May-26	5.555.556	82.975.820	1.421.203	4.166.667	1.388.889	32.314	78.841.468
6	30-Jun-26	5.486.111	78.841.468	1.350.390	4.166.667	1.319.444	30.946	74.705.747
7	31-Jul-26	5.416.667	74.705.747	1.279.554	4.166.667	1.250.000	29.554	70.568.634
8	31-Aug-26	5.347.222	70.568.634	1.208.694	4.166.667	1.180.556	28.138	66.430.106
9	30-Sep-26	5.277.778	66.430.106	1.137.810	4.166.667	1.111.111	26.698	62.290.138
10	31-Oct-26	5.208.333	62.290.138	1.066.901	4.166.667	1.041.667	25.234	58.148.705
11	30-Nov-26	5.138.889	58.148.705	995.966	4.166.667	972.222	23.744	54.005.783
12	31-Dec-26	5.069.444	54.005.783	925.007	4.166.667	902.778	22.229	49.861.345
13	31-Jan-27	5.000.000	49.861.345	854.021	4.166.667	833.333	20.688	45.715.366
14	28-Feb-27	4.930.556	45.715.366	783.009	4.166.667	763.889	19.120	41.567.820
15	31-Mar-27	4.861.111	41.567.820	711.970	4.166.667	694.444	17.526	37.418.679
16	30-Apr-27	4.791.667	37.418.679	640.904	4.166.667	625.000	15.904	33.267.917
17	31-May-27	4.722.222	33.267.917	569.810	4.166.667	555.556	14.255	29.115.505
18	30-Jun-27	4.652.778	29.115.505	498.688	4.166.667	486.111	12.577	24.961.415
19	31-Jul-27	4.583.333	24.961.415	427.537	4.166.667	416.667	10.870	20.805.619
20	31-Aug-27	4.513.889	20.805.619	356.357	4.166.667	347.222	9.135	16.648.087
21	30-Sep-27	4.444.444	16.648.087	285.147	4.166.667	277.778	7.369	12.488.790
22	31-Oct-27	4.375.000	12.488.790	213.907	4.166.667	208.333	5.574	8.327.697
23	30-Nov-27	4.305.556	8.327.697	142.636	4.166.667	138.889	3.747	4.164.777
24	31-Dec-27	4.236.111	4.164.777	71.334	4.166.667	69.444	1.890	(0)

EIR awal: 1,713% per bulan

Tabel 2. Estimasi Arus Kas setelah Restrukturisasi

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
0	01-Jan-26	(99.500.000)						99.500.000
1	31-Jan-26	5.833.333	99.500.000	1.704.228	4.166.667	1.666.667	37.561	95.370.895
2	28-Feb-26	5.763.889	95.370.895	1.633.505	4.166.667	1.597.222	36.283	91.240.511
3	31-Mar-26	5.694.444	91.240.511	1.562.760	4.166.667	1.527.778	34.982	87.108.827
4	30-Apr-26	5.625.000	87.108.827	1.491.993	4.166.667	1.458.333	33.660	82.975.820
5	31-May-26	5.555.556	82.975.820	1.421.203	4.166.667	1.388.889	32.314	78.841.468
6	30-Jun-26	5.486.111	78.841.468	1.350.390	4.166.667	1.319.444	30.946	74.705.747
7	31-Jul-26	5.416.667	74.705.747	1.279.554	4.166.667	1.250.000	29.554	70.568.634
8	31-Aug-26	5.347.222	70.568.634	1.208.694	4.166.667	1.180.556	28.138	66.430.106
9	30-Sep-26	5.277.778	66.430.106	1.137.810	4.166.667	1.111.111	26.698	62.290.138
10	31-Oct-26	5.208.333	62.290.138	1.066.901	4.166.667	1.041.667	25.234	58.148.705
11	30-Nov-26	5.138.889	58.148.705	995.966	4.166.667	972.222	23.744	54.005.783
12	31-Dec-26	5.069.444	54.005.783	925.007	4.166.667	902.778	22.229	49.861.345
			48.608.829					Total PV
13	31-Jan-27	4.791.667	48.608.829	832.568	4.166.667	625.000	207.568	44.649.730
14	28-Feb-27	4.739.583	44.649.730	764.757	4.166.667	572.917	191.840	40.674.904
15	31-Mar-27	4.687.500	40.674.904	696.677	4.166.667	520.833	175.843	36.684.080
16	30-Apr-27	4.635.417	36.684.080	628.322	4.166.667	468.750	159.572	32.676.986
17	31-May-27	4.583.333	32.676.986	559.689	4.166.667	416.667	143.022	28.653.341
18	30-Jun-27	4.531.250	28.653.341	490.772	4.166.667	364.583	126.189	24.612.863
19	31-Jul-27	4.479.167	24.612.863	421.567	4.166.667	312.500	109.067	20.555.264
20	31-Aug-27	4.427.083	20.555.264	352.069	4.166.667	260.417	91.652	16.480.249
21	30-Sep-27	4.375.000	16.480.249	282.272	4.166.667	208.333	73.939	12.387.522
22	31-Oct-27	4.322.917	12.387.522	212.172	4.166.667	156.250	55.922	8.276.778
23	30-Nov-27	4.270.833	8.276.778	141.764	4.166.667	104.167	37.597	4.147.708
24	31-Dec-27	4.218.750	4.147.708	71.042	4.166.667	52.083	18.958	(0)
								3.440.938

- b. Restrukturisasi Kredit dengan Modifikasi Jangka Waktu Kredit BPR “ASL” menyalurkan kredit sebagai berikut:
- Plafond : Rp60.000.000
- Jangka waktu : 01/01/2026 – 30/06/2028 (30 bulan)
- Suku bunga : 6%
- Provisi : 0.1% atau Rp600.000
- Biaya Transaksi : Rp100.000
- Angsuran : Rp2.300.000 per bulan
- Adapun tanggal 31 Desember 2026 diketahui debitur melakukan pembayaran terakhir sebelum dinyatakan menunggak pembayaran. Pada tanggal 31 Juli 2027, kredit direstrukturisasi sebagai berikut:
- 1) perubahan angsuran pokok menjadi Rp1.500.000 per bulan;

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 2) jangka waktu kredit diperpanjang 6 (enam) bulan sampai dengan 31 Desember 2028;
- 3) pelunasan kredit diakhir periode; dan
- 4) restrukturisasi ditetapkan tidak menyebabkan penghentian pengakuan Kredit.

Adapun pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan sebagaimana Tabel 1. Berdasarkan perhitungan dari tabel (lihat Tabel 1 dan Tabel 2), kerugian modifikasi adalah sebesar Rp3.158.178 (Rp37.772.544 – Rp34.614.366) yang akan diamortisasi sepanjang sisa tenor kredit.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2027, sebagai berikut

Pada saat pengakuan kerugian kredit modifikasian		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp3.158.178
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp3.158.178
Pada saat pengakuan akrual bunga di masa <i>grace period</i>		
Db.	Kredit yang diberikan	Rp340.474
Kr.	Pendapatan bunga	Rp340.474
Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga		
Pada saat menerima pembayaran dari debitur		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp1.500.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp1.500.000

Tabel 1. Estimasi Arus Kas sebelum Restrukturisasi

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
0	1-Jan-26	(59.500.000)						59.500.000
1	31-Jan-26	2.300.000	59.500.000	585.255	1.744.102	555.898	29.357	57.785.255
2	28-Feb-26	2.300.000	57.785.255	568.388	1.760.261	539.739	28.649	56.053.643
3	31-Mar-26	2.300.000	56.053.643	551.356	1.776.570	523.430	27.926	54.304.999
4	30-Apr-26	2.300.000	54.304.999	534.156	1.793.030	506.970	27.186	52.539.155
5	31-May-26	2.300.000	52.539.155	516.787	1.809.642	490.358	26.429	50.755.941
6	30-Jun-26	2.300.000	50.755.941	499.246	1.826.408	473.592	25.655	48.955.188
7	31-Jul-26	2.300.000	48.955.188	481.534	1.843.330	456.670	24.864	47.136.722
8	31-Aug-26	2.300.000	47.136.722	463.647	1.860.408	439.592	24.055	45.300.369
9	30-Sep-26	2.300.000	45.300.369	445.584	1.877.645	422.355	23.229	43.445.953
10	31-Oct-26	2.300.000	43.445.953	427.344	1.895.041	404.959	22.385	41.573.297
11	30-Nov-26	2.300.000	41.573.297	408.924	1.912.599	387.401	21.523	39.682.221
12	31-Dec-26	2.300.000	39.682.221	390.323	1.930.319	369.681	20.642	37.772.544
13	31-Jan-27	2.300.000	37.772.544	371.539	1.948.203	351.797	19.742	35.844.082
14	28-Feb-27	2.300.000	35.844.082	352.570	1.966.253	333.747	18.824	33.896.653
15	31-Mar-27	2.300.000	33.896.653	333.415	1.984.471	315.529	17.885	31.930.067
16	30-Apr-27	2.300.000	31.930.067	314.071	2.002.857	297.143	16.928	29.944.139
17	31-May-27	2.300.000	29.944.139	294.537	2.021.413	278.587	15.950	27.938.676
18	30-Jun-27	2.300.000	27.938.676	274.811	2.040.141	259.859	14.952	25.913.486
19	31-Jul-27	2.300.000	25.913.486	254.891	2.059.043	240.957	13.934	23.868.377
20	31-Aug-27	2.300.000	23.868.377	234.775	2.078.120	221.880	12.895	21.803.152
21	30-Sep-27	2.300.000	21.803.152	214.461	2.097.374	202.626	11.834	19.717.612
22	31-Oct-27	2.300.000	19.717.612	193.947	2.116.806	183.194	10.753	17.611.559
23	30-Nov-27	2.300.000	17.611.559	173.231	2.136.418	163.582	9.649	15.484.790
24	31-Dec-27	2.300.000	15.484.790	152.312	2.156.212	143.788	8.524	13.337.102
25	31-Jan-28	2.300.000	13.337.102	131.187	2.176.189	123.811	7.376	11.168.288
26	29-Feb-28	2.300.000	11.168.288	109.854	2.196.352	103.648	6.205	8.978.142
27	31-Mar-28	2.300.000	8.978.142	88.311	2.216.701	83.299	5.012	6.766.453
28	30-Apr-28	2.300.000	6.766.453	66.556	2.237.238	62.762	3.795	4.533.009
29	31-May-28	2.300.000	4.533.009	44.588	2.257.966	42.034	2.554	2.277.597
30	30-Jun-28	2.300.000	2.277.597	22.403	2.278.886	21.114	1.289	0

EIR awal: 0,984% per bulan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 2. Estimasi Arus Kas setelah Restrukturisasi

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit	
0	1-Jan-26	(59.500.000)						59.500.000	
1	31-Jan-26	2.300.000	59.500.000	585.255	1.744.102	555.898	29.357	57.785.255	
2	28-Feb-26	2.300.000	57.785.255	568.388	1.760.261	539.739	28.649	56.053.643	
3	31-Mar-26	2.300.000	56.053.643	551.356	1.776.570	523.430	27.926	54.304.999	
4	30-Apr-26	2.300.000	54.304.999	534.156	1.793.030	506.970	27.186	52.539.155	
5	31-May-26	2.300.000	52.539.155	516.787	1.809.642	490.358	26.429	50.755.941	
6	30-Jun-26	2.300.000	50.755.941	499.246	1.826.408	473.592	25.655	48.955.188	
7	31-Jul-26	2.300.000	48.955.188	481.534	1.843.330	456.670	24.864	47.136.722	
8	31-Aug-26	2.300.000	47.136.722	463.647	1.860.408	439.592	24.055	45.300.369	
9	30-Sep-26	2.300.000	45.300.369	445.584	1.877.645	422.355	23.229	43.445.953	
10	31-Oct-26	2.300.000	43.445.953	427.344	1.895.041	404.959	22.395	41.573.297	
11	30-Nov-26	2.300.000	41.573.297	408.924	1.912.599	387.401	21.523	39.682.221	
12	31-Dec-26	2.300.000	39.682.221	390.323	1.930.319	369.681	20.642	37.772.544	
								34.614.366	Total PV
13	31-Jan-27		34.614.366	340.474			340.474	34.954.840	
14	28-Feb-27		34.954.840	343.823			343.823	35.298.664	
15	31-Mar-27		35.298.664	347.205			347.205	35.645.869	-
16	30-Apr-27		35.645.869	350.621			350.621	35.996.489	-
17	31-May-27		35.996.489	354.069			354.069	36.350.559	-
18	30-Jun-27		36.350.559	357.552			357.552	36.708.111	-
19	31-Jul-27		36.708.111	361.069	1.500.000		361.069	35.569.180	1.400.666
20	31-Aug-27		35.569.180	349.866	1.500.000		349.866	34.419.046	1.387.023
21	30-Sep-27		34.419.046	338.553	1.500.000		338.553	33.257.599	1.373.513
22	31-Oct-27		33.257.599	327.129	1.500.000		327.129	32.084.728	1.360.134
23	30-Nov-27		32.084.728	315.592	1.500.000		315.592	30.900.320	1.346.886
24	31-Dec-27		30.900.320	303.942	1.500.000		303.942	29.704.263	1.333.767
25	31-Jan-28		29.704.263	292.178	1.500.000		292.178	28.496.440	1.320.776
26	29-Feb-28		28.496.440	280.297	1.500.000		280.297	27.276.737	1.307.911
27	31-Mar-28		27.276.737	268.300	1.500.000		268.300	26.045.037	1.295.171
28	30-Apr-28		26.045.037	256.185	1.500.000		256.185	24.801.222	1.282.556
29	31-May-28		24.801.222	243.950	1.500.000		243.950	23.545.172	1.270.063
30	30-Jun-28		23.545.172	231.595	1.500.000		231.595	22.276.768	1.257.692
31	31-Jul-28		22.276.768	219.119	1.500.000		219.119	20.995.887	1.245.442
32	31-Aug-28		20.995.887	206.520	1.500.000		206.520	19.702.407	1.233.310
33	30-Sep-28		19.702.407	193.797	1.500.000		193.797	18.396.204	1.221.298
34	31-Oct-28		18.396.204	180.949	1.500.000		180.949	17.077.153	1.209.402
35	30-Nov-28		17.077.153	167.975	1.500.000		167.975	15.745.128	1.197.622
36	31-Dec-28		15.745.128	154.872	15.900.000		154.872	(0)	12.571.136

5.3. HAPUS BUKU KREDIT

5.3.1. DEFINISI

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak.

5.3.2. PENJELASAN

- a. Hapus buku dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain POJK mengenai kualitas aset BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

5.3.3. PERLAKUAN AKUNTANSI Pengakuan dan Pengukuran

- a. Kredit serta tagihan lainnya yang dihapus buku dan bukan dalam rangka hapus tagih tetap dicatat secara *extra comptable (off- balance sheet)*.
- b. Pencatatan kredit dan tagihan lain yang telah dihapus buku dalam *extra comptable* dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha penagihan dan mendapat keputusan manajemen atau dilakukan hapus tagih.
- c. Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan.
- d. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Penyajian

- a. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif.
- b. Nilai Tercatat Kredit adalah nilai kredit neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit (*amortized cost*).

5.3.4. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat melakukan hapus buku kredit	
Db.	CKPN - Kredit yang diberikan
Kr.	Kredit yang diberikan
Pencatatan kredit yang dihapus buku pada rekening administratif	
Db.	Rekening administratif – Kredit yang dihapus buku
Kr.	Rekening lawan - Kredit yang dihapus buku (Tagihan bunga tercatat pada rekening administratif)
Pada saat penerimaan pembayaran untuk kredit yang telah dihapus buku	
Db.	Kas/rekening BPR
Kr.	Pendapatan hapus buku (pendapatan operasional lainnya)
Pencatatan penerimaan kredit yang dihapus buku pada rekening administratif	
Db.	Rekening lawan – Kredit yang dihapus buku
Kr.	Rekening administratif - Kredit yang dihapus buku

5.3.5. CONTOH KASUS

Hapus buku kredit dengan CKPN sudah terbentuk 100%. Pada tanggal 1 Januari 2025, manajemen BPR memutuskan untuk menghapus buku kredit dengan nilai sebesar Rp55.000.000, nilai CKPN sudah terbentuk 100%. Pada tanggal 1 Juni 2023, debitur melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000. Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat penghapusbukuan kredit dengan CKPN sudah terbentuk 100%		
Db.	CKPN - Kredit yang diberikan	Rp55.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp55.000.000
Pencatatan kredit yang dihapus buku pada rekening administratif		
Db.	Rekening administratif – Kredit yang dihapus buku	Rp55.000.000
Kr.	Rekening lawan - Kredit yang dihapus buku	Rp55.000.000
Pada saat BPR menerima setoran kas dari debitur hapus buku pada tahun berjalan		
Db.	Kas/rekening BPR	Rp5.000.000
Kr.	Pendapatan hapus buku (pendapatan operasional lainnya)	Rp5.000.000
Pencatatan penerimaan kredit yang dihapus buku pada rekening administratif		
Db.	Rekening lawan – Kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000
Kr.	Rekening administratif - Kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

6.1. DEFINISI

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. DASAR PENGATURAN

- a. SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.
- b. SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

6.3. PENJELASAN

- a. Entitas asosiasi adalah entitas, dimana investor memiliki pengaruh signifikan dan yang bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama, termasuk entitas tidak berbadan hukum seperti persekutuan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 14.2)
- b. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan kebijakan operasional entitas asosiasi tetapi tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut:
 - 1) jika investor memiliki, secara langsung atau tidak langsung (sebagai contoh, melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara entitas asosiasi, disimpulkan bahwa investor memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan secara jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan;
 - 2) sebaliknya, jika investor memiliki, secara langsung atau tidak langsung (sebagai contoh, melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara entitas asosiasi, maka disimpulkan bahwa investor tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan secara jelas; dan
 - 3) kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi investor dari memiliki pengaruh signifikan.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 14.3)
- c. BPR yang melakukan penyertaan modal tanpa pengaruh signifikan mengukur dan mencatat penyertaan modal dimaksud sesuai dengan SAK EP Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar.

6.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode:
 - 1) Model biaya
 - a) BPR mengukur investasi pada entitas asosiasi, selain yang memiliki kuotasi harga publikasian pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang diakui sesuai dengan SAK EP Bab 27 Penurunan Nilai Aset atau Bab XII tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 14.5)
 - b) BPR mengakui dividen dan distribusi lain yang diterima dari investasi sebagai penghasilan tanpa memperhatikan apakah distribusi adalah dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau setelah tanggal akuisisi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 14.6)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 2) Metode ekuitas
- Investasi ekuitas awalnya diakui pada harga transaksi (termasuk biaya transaksi) dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dari:
- a) Distribusi dan penyesuaian lain ke jumlah tercatat. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi jumlah tercatat investasi. Penyesuaian jumlah tercatat mungkin juga diperlukan sebagai konsekuensi perubahan dalam ekuitas entitas asosiasi yang timbul dari item penghasilan komprehensif lain.
 - b) Hak suara potensial.
 - c) *Goodwill* implisit dan penyesuaian nilai wajar.
 - d) Penurunan nilai.
 - e) Transaksi investor dengan asosiasi.
 - f) Tanggal laporan keuangan entitas asosiasi.
 - g) Kebijakan akuntansi entitas asosiasi.
 - h) Kerugian yang melebihi investasi.
 - i) Penghentian metode ekuitas.
- (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 14.8)
- b. Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

Penyajian

- a. Penyertaan modal disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar.
- b. BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

6.5. ILUSTRASI JURNAL

- a. Penyertaan modal yang diukur pada model biaya
- | | |
|--|--------------------|
| Pada saat melakukan penyertaan modal | |
| Db. | Penyertaan modal |
| Kr. | Kas/Rekening BPR |
| Pada saat pengumuman pembagian dividen | |
| Db. | Piutang dividen |
| Kr. | Pendapatan dividen |
| Pada saat pembayaran dividen | |
| Db. | Kas/Rekening BPR |
| Kr. | Piutang dividen |
| Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab XII tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | |
| Pada saat pelepasan penyertaan modal | |
| Db. | Kas/Rekening BPR |
| Kr. | Penyertaan modal |
- b. Penyertaan modal yang diukur melalui metode ekuitas
- | | |
|--|--|
| Pada saat melakukan penyertaan modal | |
| Db. | Penyertaan modal |
| Kr. | Kas/Rekening BPR |
| Pada saat pengakuan keuntungan/kerugian entitas anak yang mencerminkan bagian investor | |
| Db./Kr. | Penyertaan modal |
| Kr./Db. | Laba/Rugi dari investasi pada entitas anak |
| Pada saat pengumuman pembagian dividen | |
| Db. | Piutang dividen |

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Penyertaan modal
Pada saat pembayaran dividen	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Piutang dividen
Pada saat pelepasan penyertaan modal	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Penyertaan modal

6.6. CONTOH KASUS

- a. Penyertaan Modal dengan Pengaruh Signifikan yang Diukur pada Biaya Perolehan

Pada tanggal 16 Agustus 2026, BPR “MAS” melakukan penyertaan modal terhadap Lembaga Penunjang “QRS” sebesar Rp100.000.000. Penyertaan modal kepada Lembaga Penunjang “QRS” memiliki pengaruh signifikan. BPR “MAS” mencatat investasi pada Lembaga Penunjang “QRS” dengan menggunakan model biaya. Pada tanggal 5 Maret 2027, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham Lembaga Penunjang “QRS”, porsi dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham tahun 2027 adalah 20% dari laba bersih tahun 2026, adapun porsi pembagian dividen BPR “MAS” adalah sebesar Rp5.000.000. Dividen dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2027. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat melakukan penyertaan modal tanggal 16 Agustus 2026		
Db.	Penyertaan modal	Rp100.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR	Rp100.000.000
Pada saat pengumuman pembagian dividen tanggal 5 Maret 2027		
Dr.	Piutang dividen	Rp5.000.000
Kr.	Pendapatan dividen	Rp5.000.000
Pada saat pembayaran dividen tanggal 10 Maret 2027		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp5.000.000
Kr.	Piutang dividen	Rp5.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2027, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham Lembaga Penunjang “QRS”, ditetapkan bahwa Lembaga Penunjang “QRS” mengalami kerugian. BPR “MAS” menetapkan kualitas penyertaan modal dimaksud sebagai kualitas kurang lancar. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat melakukan penyertaan modal tanggal 31 Agustus 2026		
Db.	Penyertaan modal	Rp100.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR	Rp100.000.000
Pada saat penyertaan modal ditetapkan kualitas kurang lancar tanggal 31 Agustus 2026		
Dr.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp10.000.000
Kr.	CKPN – Penyertaan Modal (10%*Rp100.000.000=Rp10.000.000)	Rp10.000.000

- b. Penyertaan Modal yang Diukur melalui Metode Ekuitas
- Pada tanggal 1 Agustus 2026, BPR “MAS” melakukan penyertaan modal terhadap Lembaga Penunjang “QRS” sebesar Rp7.000.000.000. Penyertaan modal kepada Lembaga Penunjang “QRS” memiliki pengaruh signifikan. BPR “MAS” mencatat investasi pada Lembaga Penunjang “QRS” dengan menggunakan model

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

ekuitas. Adapun porsi kepemilikan BPR “MAS” pada Lembaga Penunjang “QRS” adalah 30%. Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Lembaga Penunjang “QRS”, laba bersih tahun 2026 adalah sebesar Rp3.250.000.000. Pada tanggal 5 Maret 2027, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham Lembaga Penunjang “QRS”, porsi dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham tahun 2027 adalah 20% dari laba bersih tahun 2026. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat melakukan penyertaan modal tanggal 1 Agustus 2026		
Db.	Penyertaan modal	Rp7.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR “MAS”	Rp7.000.000.000
Pada saat pengakuan keuntungan Lembaga Penunjang “QRS” yang mencerminkan bagian BPR “MAS”		
Dr.	Penyertaan modal	Rp975.000.000
Kr.	Laba/Rugi dari investasi pada entitas anak (Rp3.250.000.000*30%)=Rp975.000.000	Rp975.000.000
Pada saat pengumuman pembagian dividen tanggal 5 Maret 2027		
Db.	Piutang dividen	Rp195.000.000
Kr.	Penyertaan modal (Rp3.250.000.000*20%)*30%=Rp650.000.000*30% = 195.000.000	Rp195.000.000
Pada saat pembayaran dividen		
Db.	Kas/Rekening BPR “MAS”	Rp195.000.000
Kr.	Piutang dividen	Rp195.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB VII

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

7.1. DEFINISI

- a. Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)
- b. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.
- c. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar.
- d. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

7.2. DASAR PENGATURAN

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. PSAK 105 Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

7.3. PENJELASAN

- a. Agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BPR dapat dibagi:
 - 1) Penyelesaian kredit (AYDA)
 - a) Perjanjian kredit antara BPR dan debitur selesai;
 - b) BPR tidak berhak atas tambahan pembayaran jika nilai AYDA lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan;
 - c) BPR tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai AYDA lebih tinggi dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan.
 - 2) Proses penyelesaian kredit
 - a) Perjanjian kredit antara BPR dan debitur tidak berakhir ketika agunan dikuasai oleh BPR;
 - b) BPR berhak atas tambahan pembayaran jika nilai agunan lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan;
 - c) BPR berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai agunan lebih tinggi dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan.
- b. AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.
- c. BPR melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki, yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.
- d. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

7.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penyelesaian Kredit
 - 1) Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
 - 2) Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.
 - 3) Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
 - 4) Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.
 - 5) AYDA tidak dilakukan depresiasi.
 - 6) Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian nonoperasional.
- b. Proses penyelesaian kredit
Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.
- c. Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

Penyajian

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara:

- a. nilai tercatat kredit; atau
- b. nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

7.5. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat BPR memperoleh AYDA (penyelesaian kredit) Apabila nilai AYDA lebih besar dari nilai tercatat kredit yang diberikan, maka nilai AYDA maksimal diakui sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan	
Db.	AYDA
Kr.	Kredit yang diberikan
Pada saat BPR memperoleh AYDA (penyelesaian kredit) Apabila nilai AYDA lebih kecil daripada nilai tercatat kredit yang diberikan, maka BPR mengakui kerugian pada periode berjalan	
Db.	AYDA
Db.	Kerugian penyelesaian kredit
Kr.	Kredit yang diberikan
- Dalam waktu yang bersamaan dengan pengakuan AYDA, dilakukan jurnal balik atas tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian). - Provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (jika ada) diakui seluruhnya.	
Pada saat dilakukan koreksi atas penyisihan kerugian kredit	
Db.	CKPN – Kredit yang diberikan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Pendapatan operasional lainnya - Pemulihan CKPN
Pada saat terjadi penurunan nilai AYDA	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai - AYDA
Kr.	AYDA
Pada saat terjadi pemulihan nilai AYDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui	
Db.	AYDA
Kr.	Keuntungan peningkatan nilai - AYDA
Pada saat penjualan AYDA	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	AYDA
Db/Kr.	Keuntungan/Kerugian nonoperasional

7.6. CONTOH KASUS

Dalam rangka penyelesaian kredit macet dengan *outstanding* sebesar Rp180.000.000, pada tanggal 1 Agustus 2026, BPR “AMR” melakukan pengambilalihan agunan kredit berupa tanah dan bangunan yang diikat APHT sebesar Rp200.000.000. Dalam membentuk CKPN, Bank mempertimbangkan bahwa agunan dapat terealisasi 80% atau Rp160.000.000 (80%* Rp200.000.000) dalam waktu kurang dari 1 tahun (tidak dilakukan *present value*) sehingga CKPN yang dibentuk adalah Rp20.000.000 (Rp180.000.000-Rp160.000.000). Pada tanggal 1 Desember 2026, AYDA dimaksud berhasil dijual sebesar Rp170.000.000 dengan biaya-biaya transaksi sebesar Rp30.000.000, nilai realisasi bersih penjualan AYDA sebesar Rp140.000.000. Atas transaksi dimaksud, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat BPR memperoleh AYDA tanggal 1 Agustus 2026		
Db.	AYDA	Rp180.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan BPR juga melakukan jurnal balik atas tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian), serta mengakui seluruhnya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (jika ada).	Rp180.000.000
Pada saat dilakukan koreksi atas penyisihan kerugian kredit		
Dr.	CKPN – Kredit yang diberikan	Rp20.000.000
Kr.	Pendapatan operasional lainnya - Pemulihan CKPN	Rp20.000.000
Pada saat penjualan AYDA		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp140.000.000
Db.	Kerugian nonoperasional	Rp40.000.000
Kr.	AYDA	Rp180.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB VIII

ASET TETAP DAN INVENTARIS

8.1 DEFINISI

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang:

- a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
 - b. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2)

8.2 DASAR PENGATURAN

- a. SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap.
- b. SAK EP Bab 20 tentang Sewa.
- c. SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

8.3 PENJELASAN

- a. Suatu kelas aset tetap dan inventaris adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi BPR. Berikut adalah contoh dari kelas aset tetap dan inventaris:
 - 1) tanah;
 - 2) tanah dan bangunan;
 - 3) mesin;
 - 4) kendaraan bermotor;
 - 5) perabotan; dan
 - 6) peralatan kantor.
- b. Dalam hal aset tetap dan inventaris diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap dan inventaris adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan.
- c. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan diakui sebagai pendapatan nonoperasional.
- d. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari hadiah karena penempatan pada bank lain yang dapat diatribusikan dengan salah satu persyaratan penempatan pada bank lain dimaksud tidak dapat ditarik atau dicairkan dalam waktu tertentu, diakui sebagai aset tetap sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diterima BPR, sedangkan untuk pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang ditangguhkan dan diakui sesuai Bab IV Penempatan pada Bank Lain.
- e. Pertukaran Aset
Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset nonmoneter, atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter, diukur dengan biaya perolehan aset pada nilai wajar kecuali:
 - 1) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
 - 2) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya aset diukur pada jumlah tercatat aset diserahkan.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.14)
- f. Depresiasi
 - 1) Beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.17)
 - 2) Aset tetap dan inventaris dilakukan depresiasi secara sistematis selama umur manfaatnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.18)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 3) Depresiasi aset dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk dapat dioperasikan dengan cara yang diintensifkan manajemen. Depresiasi aset berhenti ketika aset dihentikan pengakuannya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.20)
 - 4) BPR memilih metode depresiasi yang merefleksikan manfaat ekonomik masa depan aset. Metode yang dapat digunakan mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode berdasarkan penggunaan seperti metode unit produksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.22)
 - 5) Aset Tetap tanah tidak dilakukan depresiasi, kecuali terpenuhi kondisi untuk dilakukannya depresiasi. Tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset yang terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. Bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas, oleh karenanya harus dilakukan depresiasi. Peningkatan nilai tanah dimana di atasnya didirikan bangunan tidak memengaruhi penentuan jumlah yang dapat dilakukan depresiasi dari bangunan tersebut.
- g. Perolehan melalui sewa pembiayaan (*financial lease*)
- 1) Aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa (*lease*) apabila sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 20.4)
 - 2) Kriteria klasifikasi sewa pembiayaan:
 - a) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa;
 - b) penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan;
 - c) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - d) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan; dan
 - e) aset sewaan bersifat khusus dan hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi besar.
- h. Penurunan Nilai
- 1) Penurunan nilai aset tetap dan inventaris terjadi jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset kurang dari jumlah tercatatnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 27.5)
 - 2) BPR segera mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi, kecuali aset dicatat pada jumlah revaluasi sesuai dengan model revaluasi. Untuk model revaluasi:
 - a) BPR memperlakukan kerugian penurunan nilai aset revaluasi sebagai penurunan revaluasi yang diakui dalam laba rugi.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b) Penurunan nilai pada huruf a) diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.
- c) Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagaimana huruf b) mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 27.6)
- 3) Pada setiap tanggal pelaporan BPR menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka BPR mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka tidak perlu untuk mengestimasi jumlah terpulihkan.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 27.7)
- 4) Indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai dapat mempertimbangkan sumber informasi eksternal dan internal dengan mengacu pada SAK EP paragraf 27.9.

8.4 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Bagian dari beberapa *item* aset tetap dan inventaris mungkin mensyaratkan penggantian secara teratur. BPR menambahkan ke jumlah tercatat *item* aset tetap dan inventaris jika biaya penggantian bagian dari *item* aset tetap dan inventaris tersebut diharapkan memberikan manfaat masa depan tambahan untuk BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.6)
- b. Pada saat pengakuan awal, BPR mengukur aset tetap dan inventaris pada biaya perolehan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.9)
- c. Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari seluruh hal berikut:
 - 1) harga beli, termasuk *fee* legal dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, setelah dikurangi diskon dagang dan rabat;
 - 2) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat dioperasikan sesuai dengan intensi manajemen. Hal ini mencakup biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penyerahan dan penanganan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsional;
 - 3) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.10)
- d. Biaya berikut bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan inventaris, dan BPR mengakui sebagai beban ketika terjadi:
 - 1) biaya pembukaan fasilitas baru;
 - 2) biaya pengenalan produk atau jasa baru;
 - 3) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau dengan kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
 - 4) biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain;
 - 5) biaya pinjaman.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.11)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- e. Pengukuran setelah pengakuan awal
BPR memilih model biaya atau model revaluasian sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh kelas aset tetap dan inventaris. BPR mengakui biaya perawatan sehari-hari item aset tetap dan inventaris dalam laba rugi dalam periode di mana biaya tersebut terjadi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.15)
- 1) Model Biaya
BPR mengukur aset tetap dan inventaris setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya setelah perolehan:
 - a) Biaya yang menambah manfaat ekonomik di masa depan atas aset tetap dan inventaris dikapitalisasi.
 - b) Biaya yang tidak menambah manfaat ekonomik di masa depan atas aset tetap dan inventaris dicatat sebagai beban.
 - 2) Model Revaluasi
 - a) BPR mengukur *item* aset tetap dan inventaris yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
 - b) Jika suatu aset tetap dan inventaris direvaluasi maka keseluruhan kelas aset tetap dan inventaris dalam kelas yang sama direvaluasi.
 - c) Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
 - d) Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
 - e) Surplus revaluasi dalam ekuitas, dapat:
 - (1) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya; atau
 - (2) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas seiring depresiasi aset tetap dan inventaris.
- f. Depresiasi untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode bersangkutan.
- g. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan.

- h. BPR menghentikan pengakuan aset tetap dan inventaris pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.27)

Penyajian

- a. Aset tetap dan inventaris disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar:
 - 1) biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model biaya; atau
 - 2) jumlah revaluasian dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model revaluasi.
- b. Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara:
 - 1) disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian (metode jumlah bruto/*gross method*); atau
 - 2) dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset, dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut (metode jumlah neto/*net-amount method*).

8.5 ILUSTRASI JURNAL

- a. Model Biaya

- 1) Pada saat perolehan

Pada saat perolehan aset tetap dan inventaris dengan cara pembelian	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Kas/rekening BPR
Aset yang diperoleh dari pertukaran aset	
Db.	Aset tetap dan inventaris (baru)
Db.	Akumulasi depresiasi (lama)
Kr.	Aset tetap dan inventaris (lama)
Kr/Db.	Keuntungan/Kerugian
Aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan	
Db.	Aset tetap dan inventaris – sewa pembiayaan
Kr.	Pinjaman yang diterima – sewa pembiayaan
Aset yang diperoleh dari sumbangan	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Modal sumbangan/pendapatan nonoperasional
Aset yang diperoleh dari undian	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Pendapatan nonoperasional
Aset yang diperoleh dari penempatan dana selama jangka waktu tertentu	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Accrued income (diamortisasi selama masa kontrak sebagai pendapatan bunga)

- 2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengakuan beban depresiasi	
Db.	Beban depresiasi

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Akumulasi depresiasi
Pembentukan beban kerugian penurunan nilai	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai
Kr.	Akumulasi kerugian penurunan nilai

3) Penghentian pengakuan

a) Penghapusbukuan aset tetap dan inventaris

Penghapusbukuan aset tetap dan inventaris	
Db.	Akumulasi depresiasi
Kr.	Aset tetap dan inventaris

b) Penjualan aset tetap dan inventaris

Penjualan	
Db.	Akumulasi depresiasi
Db.	Kas/Rekening BPR
Db/Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
Kr.	Aset tetap dan inventaris

b. Model Revaluasi

1) Pada saat perolehan

Pada saat perolehan aset tetap dan inventaris dengan cara pembelian	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Kas/rekening BPR
Aset yang diperoleh dari pertukaran aset	
Db.	Aset tetap dan inventaris (baru)
Db.	Akumulasi depresiasi (lama)
Kr.	Aset tetap dan inventaris (lama)
Kr/Db.	Keuntungan/Kerugian
Aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan	
Db.	Aset tetap dan inventaris – sewa pembiayaan
Kr.	Pinjaman yang diterima – sewa pembiayaan
Aset yang diperoleh dari sumbangan	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Pendapatan nonoperasional
Aset yang diperoleh dari undian	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Pendapatan nonoperasional
Aset yang diperoleh dari penempatan dana selama jangka waktu tertentu	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Accrued income (diamortisasi selama masa kontrak sebagai pendapatan bunga)

2) Pengukuran setelah pengakuan awal – Model Revaluasi dengan peningkatan nilai wajar

Pengakuan beban depresiasi	
Db.	Beban depresiasi
Kr.	Akumulasi depresiasi
Peningkatan nilai wajar	
Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap dan inventaris – Selisih nilai wajar
Jika sebelumnya terjadi penurunan nilai akibat revaluasi	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Aset tetap dan inventaris
Kr.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap dan inventaris – Selisih nilai wajar
Kr.	Kerugian pemulihan penurunan nilai akibat revaluasi aset tetap dan inventaris (laba rugi)

3) Pengukuran setelah pengakuan awal – Model Revaluasi dengan penurunan nilai wajar

Pengakuan beban depresiasi	
Db.	Beban depresiasi
Kr.	Akumulasi depresiasi
Penurunan nilai wajar	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laba rugi)
Kr.	Aset tetap dan inventaris
Jika sebelumnya terjadi peningkatan nilai akibat revaluasi	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Db.	Beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laba rugi)
Kr.	Aset tetap dan inventaris

4) Penghentian pengakuan

a) Penghapusbukuan aset tetap dan inventaris

Penghapusbukuan aset tetap dan inventaris	
Db.	Akumulasi depresiasi
Kr.	Aset tetap dan inventaris
Jika terdapat surplus revaluasi	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap dan inventaris – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

b) Penjualan aset tetap dan inventaris

Penjualan	
Db.	Akumulasi depresiasi
Db.	Kas/Rekening BPR
Db/Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
Kr.	Aset tetap dan inventaris
Jika terdapat surplus revaluasi	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap dan inventaris – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

8.6 CONTOH KASUS

BPR “GHI” memiliki aset tetap dan inventaris pada awal tahun 2027 sebagai berikut:

(dalam Rp ribu)

Jenis	Harga Perolehan	Umur Ekonomis *	Waktu Perolehan	Akumulasi	Metode Pengukuran	Nilai Wajar
Tanah	Rp1.500.000	-	Awal 2025	-		
Bangunan	Rp2.000.000	20 tahun	Awal 2025	Rp200.000	Model Revaluasi	Rp1.510.000 Rp1.534.000
Kendaraan	Rp500.000	5 tahun	Awal 2026	Rp100.000	Model Revaluasi	Rp430.000 Rp285.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

					2028	
Mesin	Rp300.000	5 tahun	Awal 2025	Rp120.000	Model Biaya	-

**tidak terdapat nilai residual di akhir masa depresiasi*

Atas informasi di atas, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Model Biaya

1) Tahun 2027

a) Perhitungan depresiasi per tahun:

- (1) Tanah tidak didepresiasi.
(2) Biaya depresiasi mesin per tahun = $\text{Rp}300.000.000 / 5$
= $\text{Rp}60.000.000$.

b) Jurnal pembukuan:

Perhitungan depresiasi per tahun		
Db.	Beban depresiasi aset tetap dan inventaris - Mesin	Rp60.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris - Mesin	Rp60.000.000

c) Penyajian pada akhir tahun 2027

Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Tanah	Rp1.500.000.000	-	Rp1.500.000.000
Mesin	Rp300.000.000	Rp180.000.000	Rp120.000.000

2) Tahun 2028

Perhitungan dan jurnal pembukuan sama dengan tahun 2027, namun penyajian akhir tahun 2028 menjadi:

Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Tanah	Rp1.500.000.000	-	Rp1.500.000.000
Mesin	Rp300.000.000	Rp240.000.000	Rp60.000.000

b. Model Revaluasi

1) Bangunan

a) Jurnal penyesuaian tahun 2027

Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*):

Pada penyesuaian nilai buku		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris - Bangunan	Rp200.000.000
Kr.	Aset tetap dan inventaris - Bangunan	Rp200.000.000
Pencatatan beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp90.000.000
Kr.	CKPN aset tetap dan inventaris	Rp90.000.000
<u>Cara perhitungan:</u>		
(a) Nilai buku bangunan tahun 2027 yaitu $\text{Rp}2.000.000.000 - \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}1.600.000.000$		
(b) Nilai wajar bangunan tahun 2027 = $\text{Rp}1.510.000.000$		
(c) Penurunan nilai bangunan = $\text{Rp}1.600.000.000 -$		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Rp1.510.000.000	=	
	Rp90.000.000		
Depresiasi tahun 2027			
Db.	Beban depresiasi aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp83.888.889
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp83.888.889
<u>Cara perhitungan</u>			
(a) Sisa umur ekonomis = 20 tahun – 2 tahun = 18 tahun			
(b) Depresiasi setahun =			
Rp1.510.000.000/18 =			
Rp83.888.889			

- b) Jurnal penyesuaian tahun 2028
Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*):

Pada penyesuaian nilai buku			
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp83.888.889
Kr.	Aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp83.888.889
Pada saat revaluasi			
Db.	Aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp107.888.889
Kr.	Keuntungan penurunan nilai akibat revaluasi		Rp90.000.000
Kr.	Penghasilan komprehensif lain – Surplus revaluasi – selisih nilai wajar		Rp17.888.889
<u>Cara perhitungan:</u>			
(a) Nilai wajar bangunan tahun 2027 = Rp1.510.000.000 – Rp83.888.889 = Rp1.426.111.111			
(b) Nilai wajar bangunan tahun 2028 = Rp1.534.000.000			
(c) Kenaikan nilai bangunan = Rp1.534.000.000 – Rp1.426.111.111 = Rp107.888.889			
(d) Sisa umur ekonomis = 18 tahun – 1 tahun = 17 tahun			
(e) Depresiasi setahun = Rp1.534.000.000/17 = Rp90.235.294			
(f) Surplus revaluasi = Rp107.888.889 – Rp90.000.000 = Rp17.888.889			
Depresiasi tahun 2028			
Db.	Beban depresiasi aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp90.235.294
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Bangunan		Rp90.235.294
<u>Cara perhitungan</u>			

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

(a) Sisa umur ekonomis = 18 tahun – 1 tahun = 17 tahun	
(b) Depresiasi setahun = Rp1.534.000.000/17 = Rp90.235.294	

c) Penyajian bangunan

Tahun	Nilai Wajar	Akumulasi Depresiasi	Nilai Wajar Neto
2027	Rp1.510.000.000	Rp83.888.889	Rp1.426.111.111
2028	Rp1.534.000.000	Rp90.235.294	Rp1.443.764.706

2) Kendaraan

a) Jurnal penyesuaian tahun 2027

Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*):

Pada penyesuaian nilai buku		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp100.000.000
Kr.	Aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp100.000.000
Pada saat revaluasi		
Db.	Aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp30.000.000
Kr.	Penghasilan komprehensif lain – Surplus revaluasi – selisih nilai wajar	Rp30.000.000
<u>Cara perhitungan:</u>		
(a) Nilai buku kendaraan tahun 2027 yaitu Rp500.000.000 – Rp100.000.000 = Rp400.000.000		
(b) Nilai revaluasi kendaraan tahun 2027 = Rp430.000.000		
(c) Surplus revaluasi = Rp430.000.000 – Rp400.000.000 = Rp30.000.000		
Depresiasi tahun 2027		
Db.	Beban depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp107.500.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp107.500.000
<u>Cara perhitungan</u>		
(a) Nilai revaluasi kendaraan tahun 2027 = Rp430.000.000		
(b) Surplus revaluasi = Rp430.000.000 – Rp400.000.000 = Rp30.000.000		
(c) Sisa umur ekonomis = 5 tahun – 1 tahun = 4 tahun.		
(d) Depresiasi per tahun = Rp430.000.000/ 4 tahun = Rp107.500.000.		

b) Jurnal penyesuaian tahun 2028

Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*):

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pada penyesuaian nilai buku		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp107.500.000
Kr.	Aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp107.500.000
Pada saat revaluasi		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp7.500.000
Db.	Penghasilan komprehensif lain – Surplus revaluasi – selisih nilai wajar	Rp30.000.000
Kr.	Aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp37.500.000
<u>Cara perhitungan:</u>		
(a) Nilai buku kendaraan tahun 2027 = Rp430.000.000 – Rp107.500.000 = Rp322.500.000		
(b) Nilai revaluasi tahun 2028 = Rp285.000.000		
(c) Penurunan nilai kendaraan = Rp322.500.000 – Rp285.000.000 = Rp37.500.000		
(d) Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi = Rp37.500.000 – Rp30.000.000 = Rp7.500.000		
Depresiasi tahun 2028		
Db.	Beban depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp95.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap dan inventaris – Kendaraan	Rp95.000.000
<u>Cara perhitungan</u>		
(a) Nilai revaluasi tahun 2028 = Rp285.000.000		
(b) Sisa umur ekonomis = 4 tahun – 1 tahun = 3 tahun		
(c) Depresiasi setahun = Rp285.000.000/3 = Rp95.000.000		

c) Penyajian kendaraan

Tahun	Nilai Wajar	Akumulasi Depresiasi	Nilai Wajar Neto
2027	Rp430.000.000	Rp107.500.000	Rp322.500.000
2028	Rp285.000.000	Rp95.000.000	Rp190.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB IX PROPERTI TERBENGKALAI

9.1. DEFINISI

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

9.2. Dasar Pengaturan

SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

9.3. PENJELASAN

- a. BPR melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- b. Properti Terbengkalai merupakan properti dan/atau bagian dari properti yang secara mayoritas selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR sejak properti dimiliki.
- c. Penetapan Properti Terbengkalai disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- d. BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR.

9.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi properti terbengkalai dalam hal aset tetap dimaksud memenuhi definisi properti terbengkalai.
- b. Sesaat sebelum pengakuan properti terbengkalai, jumlah tercatat properti terbengkalai diukur sesuai dengan standar akuntansi keuangan terkait.
- c. Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai, BPR mengukur properti terbengkalai pada biaya perolehan. (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 16.5)
- d. Pengukuran setelah pengakuan properti terbengkalai yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal tanpa biaya atau usaha yang berlebihan diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 16.7)
- e. BPR menerapkan model biaya pada properti terbengkalai yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa biaya atau usaha yang berlebihan (Hal ini mengacu pada SAK EP Bab 17.15). Selanjutnya BPR mencatat properti terbengkalai merujuk pada cara pencatatan di Bab VIII tentang Aset Tetap dan Inventaris yang meliputi depresiasi aset dan penurunan nilai untuk properti terbengkalai yang dicatat dengan model biaya.
- f. Jika BPR telah mengklasifikasikan properti terbengkalai, namun selanjutnya atas aset tersebut tidak memenuhi syarat properti terbengkalai maka BPR dapat menghentikan pengklasifikasian properti terbengkalai tersebut. Dalam hal BPR menggunakan kembali properti terbengkalai untuk kegiatan operasional BPR dan memenuhi definisi aset tetap, maka pengukuran dan pengakuan aset dimaksud merujuk pada Bab VIII tentang Aset Tetap dan Inventaris.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Penyajian

Properti terbengkalai disajikan dalam pos tersendiri dan terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar.

9.5. ILUSTRASI JURNAL

a. Properti Terbengkalai diukur dengan model biaya

Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai yang berasal dari aset tetap, maka dilakukan reklasifikasi aset tetap ke properti terbengkalai	
Db.	Properti terbengkalai
Db.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap
Kr.	Aset tetap
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai
Penyusutan properti terbengkalai (hanya diterapkan untuk properti terbengkalai yang dicatat dengan model biaya)	
Db.	Beban depresiasi - Properti terbengkalai
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai
Jika terjadi penurunan nilai properti terbengkalai	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai - Properti terbengkalai
Kr.	Properti terbengkalai
Pada saat penjualan properti terbengkalai	
Db.	Kas/Rekening BPR
Db.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai
Kr.	Properti terbengkalai
Db/Kr.	Keuntungan/Kerugian nonoperasional
Pada saat properti terbengkalai digunakan kembali, BPR mengklasifikasikan sebagai aset tetap	
Db.	Aset Tetap
Db.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai
Kr.	Properti terbengkalai
Kr.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap

b. Properti Terbengkalai diukur dengan nilai wajar

Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai yang berasal dari aset tetap, maka dilakukan reklasifikasi aset tetap ke properti terbengkalai	
Db.	Properti terbengkalai
Db.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap
Kr.	Aset tetap
Tidak melakukan pencatatan atas penyusutan	
Jika terjadi penurunan nilai properti terbengkalai	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai - Properti terbengkalai
Kr.	Properti terbengkalai
Pada saat properti terbengkalai mengalami peningkatan nilai wajar	
Db.	Properti terbengkalai
Kr.	Pemulihan beban kerugian penurunan nilai - Properti terbengkalai
Pada saat penjualan properti terbengkalai	
Db.	Kas/Rekening BPR
Kr.	Properti terbengkalai
Db/Kr.	Keuntungan/Kerugian nonoperasional

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pada saat properti terbengkalai digunakan kembali, BPR mengklasifikasikan sebagai aset tetap	
Db.	Aset tetap
Kr.	Properti terbengkalai
Kr.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap

9.6. CONTOH KASUS

- a. Properti Terbengkalai dengan Model Biaya yang Dijual
- BPR “TUV” memiliki gedung kantor yang sebelumnya digunakan sebagai gedung kantor cabang, namun tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional BPR. Gedung kantor tersebut dibeli pada tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp850.000.000 dengan asumsi manfaat ekonomi yang diterima selama 20 (dua puluh) tahun sehingga penyusutan per tahun sebesar Rp42.500.000 atau per bulan sebesar Rp3.541.667. BPR mencatat properti terbengkalai menggunakan model biaya.
- Pada tanggal 1 Agustus 2026, Direksi BPR “TUV” menetapkan gedung kantor tersebut sebagai Properti Terbengkalai dan memasarkan gedung kantor tersebut untuk dijual. Adapun nilai tercatat aset tetap sebesar Rp850.000.000 dengan akumulasi penyusutan aset tetap selama 13 (tiga belas) tahun sebesar Rp552.500.000. Pada tanggal 1 Agustus 2027, gedung kantor dimaksud berhasil terjual dengan nilai jual sebesar Rp900.000.000 dengan biaya transaksi sebesar Rp30.000.000.

Atas kondisi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Agustus 2026:

Jenis	Pengakuan Awal	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Bangunan	Rp850.000.000	Rp552.500.000	Rp297.500.000

Penyusutan sejak pengalihan dari aset tetap ke properti terbengkalai (1 Agustus 2026) sampai dengan gedung terjual (1 Agustus 2027): Rp42.500.000

Pada saat pengakuan awal tanggal 1 Agustus 2026		
Db.	Properti terbengkalai	Rp850.000.000
Db.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap	Rp552.500.000
Kr.	Aset tetap	Rp850.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp552.500.000
Pada saat penyusutan properti terbengkalai setiap bulan sejak 1 September 2026 sampai dengan 1 Agustus 2027		
Db.	Beban depresiasi - Properti terbengkalai	Rp3.541.667
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp3.541.667
Pada saat penjualan properti terbengkalai tanggal 1 Agustus 2027		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp870.000.000
Db.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp595.000.000
Kr.	Properti terbengkalai	Rp850.000.000
Kr.	Properti terbengkalai Keuntungan nonoperasional	Rp615.000.000

- b. Properti Terbengkalai dengan Model Biaya yang Digunakan Kembali sebagai Aset Tetap

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BPR “TUV” memiliki gedung kantor yang sebelumnya digunakan sebagai gedung kantor cabang. Gedung kantor tersebut dibeli pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan nilai perolehan sebesar Rp500.000.000 dengan asumsi manfaat ekonomi yang diterima selama 20 (dua puluh) tahun sehingga penyusutan per tahun sebesar Rp25.000.000 dan penyusutan per bulan sebesar Rp2.083.333. BPR mencatat Properti Terbengkalai menggunakan model biaya.

Pada tanggal 1 Agustus 2030, Direksi BPR “TUV” menetapkan gedung kantor tersebut sebagai Properti Terbengkalai karena gedung dimaksud tidak digunakan dalam kegiatan operasional BPR. Adapun nilai tercatat aset tetap sebesar Rp500.000.000 dengan akumulasi penyusutan aset tetap selama 5 (lima) tahun sebesar Rp125.000.000. Pada tanggal 1 Agustus 2031, gedung kantor dimaksud digunakan untuk gedung kantor dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan sebagai properti terbengkalai. BPR mencatat gedung kantor dimaksud sebagai aset tetap BPR.

Atas kondisi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Agustus 2030:

Jenis	Pengakuan Awal	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Bangunan	Rp500.000.000	Rp125.000.000	Rp375.000.000

Penyusutan sejak pengalihan dari aset tetap ke properti terbengkalai (1 Agustus 2030) sampai dengan gedung terjual (1 Agustus 2031): Rp25.000.000.

Pada saat pengakuan awal tanggal 1 Agustus 2030		
Db.	Properti terbengkalai	Rp500.000.000
Db.	Akumulasi depresiasi - Aset tetap	Rp125.000.000
Kr.	Aset tetap	Rp500.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp125.000.000
Pada saat penyusutan properti terbengkalai setiap bulan sejak tanggal 1 September 2030 sampai dengan 1 Agustus 2031		
Db.	Beban depresiasi - Properti terbengkalai	Rp2.083.333
Kr.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp2.083.333
Pada saat properti terbengkalai digunakan kembali sebagai gedung kantor tanggal 1 Agustus 2031		
Db.	Aset tetap	Rp500.000.000
Db.	Akumulasi depresiasi - Properti terbengkalai	Rp150.000.000
Kr.	Properti terbengkalai	Rp500.000.000
Kr.	Keuntungan nonoperasional	Rp150.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB X

ASET TAKBERWUJUD

10.1. DEFINISI

Aset Takberwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2)

10.2. PENJELASAN

- a. Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain *goodwill*.
- b. Suatu aset dapat diidentifikasikan apabila:
 - 1) dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari BPR dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
 - 2) timbul dari hak kontraktual atau hak legal lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya.

10.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.
- b. Biaya perolehan
 - 1) Akuisisi terpisah
Biaya perolehan terdiri dari harga beli, termasuk bea impor dan pajak pembelian tidak dapat dikreditkan, setelah dikurangi diskon dagang dan rabat; dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya.
 - 2) Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis
Biaya perolehan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi.
 - 3) Akuisisi melalui hibah pemerintah
Biaya perolehan adalah nilai wajar pada tanggal hibah diterima atau dapat diterima sesuai dengan ketentuan hibah.
 - 4) Pertukaran aset
Biaya perolehan adalah nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- c. Pengukuran setelah pengakuan
BPR mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- d. Aset takberwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode.
- e. Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

Penyajian

Aset takberwujud disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

10.4. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat perolehan	
Db.	Aset takberwujud
Kr.	Kas/rekening BPR
Pertukaran aset	
Db.	Aset takberwujud
Kr.	Aset terkait (lama)
Db/Kr.	Akumulasi penyusutan/amortisasi – Aset takberwujud
Pada saat pengakuan biaya yang tidak tergolong sebagai bagian biaya perolehan aset takberwujud – sebesar biaya operasional,	
Db.	Beban operasional
Kr.	Kas/rekening BPR
Pada saat amortisasi aset takberwujud	
Db.	Beban amortisasi – Aset takberwujud
Kr.	Akumulasi amortisasi – Aset takberwujud
Pada saat penurunan nilai aset takberwujud	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud
Kr.	Akumulasi penurunan nilai – Aset takberwujud

10.5. CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR membeli *software* kepada pihak ketiga senilai Rp120.000.000 dengan usia manfaat selama 60 bulan, maka BPR mencatat transaksi dimaksud sebagai berikut:

Pada saat membeli <i>software</i> tanggal 1 Januari 2025		
Db.	Aset takberwujud- <i>software</i>	Rp120.000.000
Kr.	Kas/rekening BPR	Rp120.000.000
Pada saat pengakuan amortisasi garis lurus) tanggal 31 Januari 2025 $(\frac{1}{60} \times \text{Rp}120.000.000) = \text{Rp}2.000.000$		
Db.	Beban amortisasi – Aset takberwujud	Rp2.000.000
Kr.	Akumulasi amortisasi – Aset takberwujud	Rp2.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XI
ASET LAINNYA

11.1. DEFINISI

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

11.2. PENJELASAN

Komponen aset lainnya, antara lain:

- a. Pajak dibayar dimuka.
- b. Biaya dibayar dimuka, contohnya premi penjaminan simpanan.
- c. Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah namun masih dalam masa tenggang pertukaran.
- d. Piutang dari perusahaan asuransi.
- e. Aset pajak tangguhan.
- f. Aset keuangan lainnya, merupakan pos yang mencakup aset keuangan BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos aset keuangan yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Contoh: tagihan *fraud* yang didukung dengan dokumen pendukung.
- g. Pendapatan bunga yang akan diterima.
- h. Lainnya, misalnya persediaan meterai, barang promosi/*souvenir*, barang cetakan seperti *bilyet* deposito, buku tabungan dan sejenisnya.

11.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Pada dasarnya, Aset Lainnya diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

Penyajian

Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

11.4. ILUSTRASI JURNAL

- a. Biaya dibayar dimuka

Pada saat pengakuan awal	
Db.	Aset lainnya - Biaya dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening BPR
Pada saat amortisasi	
Db.	Beban terkait
Kr.	Aset lainnya - Biaya dibayar dimuka
- b. Tagihan pengembalian kerugian akibat *fraud* berupa pencurian kas yang didukung dengan surat keputusan ganti rugi yang memiliki kekuatan hukum tetap

Pada saat diketahui terjadinya <i>fraud</i>	
Db.	Beban operasional - Kerugian akibat <i>fraud</i>
Kr.	Kas/Rekening BPR
Pada saat terdapat keputusan ganti rugi	
Db.	Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>
Kr.	Beban operasional - Kerugian akibat <i>fraud</i>
Pada saat pembentukan beban kerugian penurunan nilai (karena tagihan <i>fraud</i> tersebut merupakan aset keuangan)	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Beban kerugian penurunan nilai
Kr.	CKPN - Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>
Pada saat pelaku <i>fraud</i> melakukan pembayaran ganti rugi	
Db.	Kas/Rekening BPR
Db.	CKPN - Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>
Kr.	Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai

11.5. CONTOH KASUS

- a. Biaya dibayar dimuka
Pada tanggal 1 Januari 2025 BPR melakukan pembayaran sewa kendaraan untuk operasional kantor kepada pihak ketiga senilai Rp120.000.000 dengan masa sewa selama 12 bulan, maka BPR mencatat transaksi dimaksud sebagai berikut:

Pada saat pembayaran sewa dimuka tanggal 1 Januari 2025		
Db.	Sewa dibayar dimuka	Rp120.000.000
Kr.	Kas/rekening BPR	Rp120.000.000
Pada saat pengakuan beban sewa tanggal 31 Januari 2025 $(\frac{1}{12} \times \text{Rp}120.000.000) = \text{Rp}10.000.000$		
Db.	Beban sewa	Rp10.000.000
Kr.	Sewa dibayar dimuka	Rp10.000.000

- b. Tagihan pengembalian kerugian akibat *fraud*
Pada tanggal 15 Februari 2025, diketahui pegawai “A” melakukan *fraud* berupa pencurian kas BPR dengan total kerugian sebesar Rp58.000.000. BPR mengajukan tuntutan hukum atas kejadian *fraud* tersebut, dan pada tanggal 8 Desember 2025 diperoleh surat ketetapan hukum bahwa pegawai “A” harus melakukan ganti rugi atas kerugian dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2025, pegawai “A” memberikan jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa mobil dengan nilai sebesar Rp60.000.000. BPR memperhitungkan agunan tersebut dalam perhitungan cadangan tagihan *fraud* sebesar 80% ($80\% \times \text{Rp}60.000.000 = 48.000.000$), sehingga BPR membentuk cadangan sebesar Rp10.000.000 ($\text{Rp}58.000.000 - \text{Rp}48.000.000$).

Pada saat diketahui terjadinya <i>fraud</i> tanggal 15 Februari 2025		
Db.	Beban operasional - Kerugian akibat <i>fraud</i>	Rp58.000.000
Kr.	Kas/Rekening BPR	Rp58.000.000
Pada saat terdapat keputusan ganti rugi		
Db.	Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>	Rp58.000.000
Kr.	Beban operasional - Kerugian akibat <i>fraud</i>	Rp58.000.000
Pada saat pembentukan beban kerugian penurunan nilai (karena tagihan <i>fraud</i> tersebut merupakan aset keuangan)		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp10.000.000
Kr.	CKPN - Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>	Rp10.000.000
Pada saat pelaku <i>fraud</i> melakukan pembayaran ganti rugi		
Db.	Kas/Rekening BPR	Rp58.000.000
Db.	CKPN - Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>	Rp58.000.000
Kr.	Aset lainnya – Tagihan <i>fraud</i>	Rp58.000.000
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp58.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XII

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

12.1. DEFINISI

- a. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
- b. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

12.2. DASAR PENGATURAN

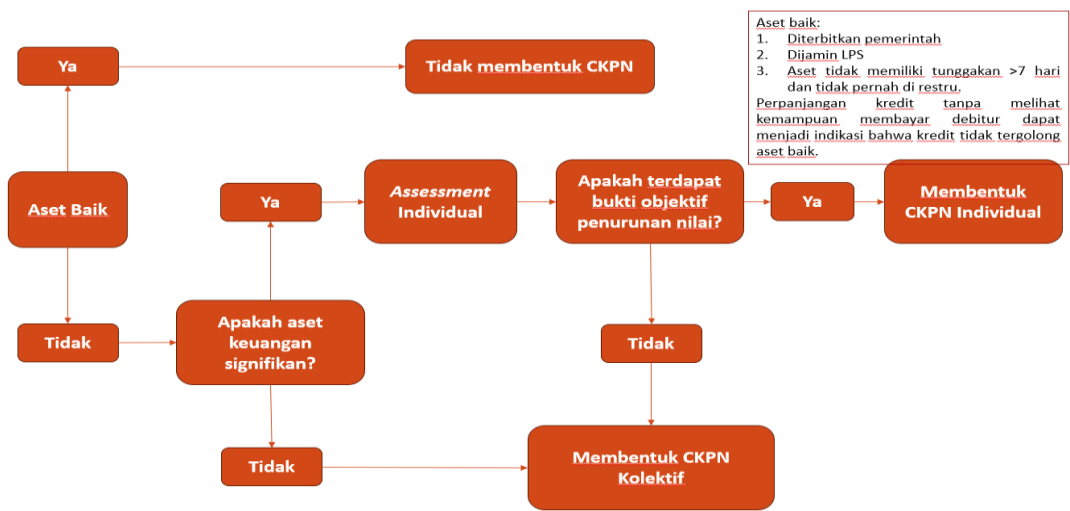
SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

- a. Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21)
- b. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:
 - 1) kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
 - 2) pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
 - 3) kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
 - 4) terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
 - 5) data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.22)
- c. Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.23)
- d. BPR menilai aset keuangan berikut secara individual untuk penurunan nilainya:
 - 1) seluruh instrumen ekuitas tanpa memperhatikan signifikansinya; dan
 - 2) aset keuangan lainnya yang secara individual signifikan.BPR menilai aset keuangan lain untuk aset keuangan baik secara individual atau kelompok berdasarkan karakteristik risiko kredit serupa. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.24)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- e. BPR mengukur kerugian penurunan nilai atas aset keuangan berikut yang diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut:
- 1) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini arus kas estimasian yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset. Jika aset keuangan tersebut memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak;
 - 2) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan estimasi terbaik (yang semestinya merupakan perkiraan) dari jumlah (yang mungkin nol) yang akan diterima oleh BPR atas aset jika aset dijual pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.25)
- f. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti peningkatan peringkat kredit debitur), BPR membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya baik secara langsung atau dengan menyesuaikan pos penyisihan. Pembalikan tidak mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan (dikurangi pos penyisihan) yang melebihi jumlah tercatat seandainya penurunan nilai sebelumnya tidak diakui. BPR mengakui jumlah pembalikan dalam laba rugi pada periode berjalan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.26)

12.3. ALUR PEMBENTUKAN CKPN



Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

- a. **Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik**
- 1) BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:
 - a) aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
 - b) aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau
 - c) aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- 2) Apabila:
 - a) aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut;
 - b) aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).
- b. **Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi**
BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:
 - 1) aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga);
 - 2) aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.
- c. **Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai**
 - 1) BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.
 - 2) Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila:
 - a) terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual;
 - b) tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

12.4. PENJELASAN

- a. Penurunan nilai sesuai bab ini berlaku untuk seluruh jenis aset keuangan yang dimiliki oleh BPR, antara lain surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal.
- b. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi.
- c. Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, BPR harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Sistematis dan konsisten sepanjang waktu
Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan BPR, yang antara lain mencakup:
 - a) periode evaluasi aset keuangan;
 - b) identifikasi bukti objektif penurunan nilai;
 - c) metode estimasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif;
 - d) penilaian agunan/jaminan;
 - e) pembentukan cadangan; dan
 - f) proses dokumentasi.
 - 2) Sejalan dengan kriteria yang bersifat objektif
 - a) Evaluasi, termasuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, harus sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud tidak hanya didasarkan pada aturan dan formula, namun juga mencakup gabungan antara ketentuan atau kebijakan dan *judgment*/diskresi manajemen.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b) Untuk membatasi *judgment*/diskresi yang cenderung bersifat subjektif, maka diperlukan suatu kerangka evaluasi yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang menekankan objektivitas dalam melakukan evaluasi penurunan nilai.
- 3) Didukung dengan dokumentasi yang memadai
 - a) Evaluasi harus disertai dengan dokumentasi yang bertujuan untuk mendorong kedisiplinan dalam proses estimasi dan memfasilitasi proses kaji ulang dan validasi.
 - b) BPR harus memiliki standar pendokumentasian atas seluruh analisis, asumsi, estimasi, keputusan dan proses evaluasi. Beberapa jenis dokumentasi yang terkait dengan evaluasi penurunan nilai dapat mencakup hal berikut:
 - (a) *internal rating* atau klasifikasi kredit yang digunakan;
 - (b) basis dalam mengidentifikasi kredit individual untuk melakukan evaluasi penurunan nilai;
 - (c) metodologi yang digunakan dalam evaluasi penurunan nilai dari kredit individual;
 - (d) basis dalam mengelompokkan suatu kredit dalam kategori kredit; dan
 - (e) metodologi yang digunakan untuk menerapkan estimasi kerugian pada kelompok kredit.
- d. Identifikasi bukti objektif
 - 1) BPR harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan tren historis (*experience credit judgment*), informasi yang tersedia, dengan disertai dengan analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan BPR.
 - 2) Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.
 - 3) Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan BPR dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (*delinquencies*) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit.
- e. Kriteria evaluasi penurunan nilai
 - 1) Secara Individual
 - (1) BPR menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik. Pada umumnya aset keuangan yang dinilai secara individu dihitung untuk eksposur yang besar. BPR menentukan nilai eksposur besar sesuai dengan kompleksitas usahanya.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- (2) Estimasi jumlah kerugian aset keuangan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgment*, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
 - (a) kinerja debitur;
 - (b) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*) termasuk kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup selama tenor kredit;
 - (c) jenis dan jumlah agunan termasuk aspek legalitas;
 - (d) ketersediaan garansi atau jaminan;
 - (e) prospek usaha debitur di masa mendatang.
 - (3) Frekuensi *rollover* kredit dapat menjadi indikator terdapat bukti objektif penurunan nilai.
- 2) Secara Kolektif
- a) BPR mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini:
 - (1) estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit;
 - (2) tipe (apakah modal kerja atau konsumsi);
 - (3) lokasi geografis;
 - (4) tipe jaminan;
 - (5) status tunggakan dan/atau jatuh tempo; atau
 - (6) sektor ekonomi.
 - b) Pengelompokkan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik.
- f. Periode evaluasi penurunan nilai
- 1) Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
 - 2) Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.
- g. Teknik evaluasi penurunan nilai
- BPR dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan teknik evaluasi penurunan nilai, BPR perlu mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis.
- Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formula*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgment* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.
- 1) Secara Individual
- BPR dapat menggunakan beberapa teknik evaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, antara lain:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- a) *Discounted cash flow*

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena BPR tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit. Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan *fee*) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit. Untuk kredit bersuku bunga mengambang (*variable interest rate*), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah. BPR dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya.
 - b) Estimasi nilai yang dapat direalisasikan dari agunan
 - (1) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*).
 - (2) Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, BPR dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - (a) kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
 - (b) sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau
 - (c) pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.
 - (3) Bukti dari estimasi nilai yang dapat direalisasikan merujuk pada harga pelepasan agunan (*net proceed*) setelah dikurangi biaya-biaya untuk pelepasan.
 - c) Dalam hal BPR telah menghitung CKPN individu dengan pendekatan *discounted cash flow*, dan kemudian diperoleh fakta bahwa debitur tidak memiliki kemampuan membayar, maka BPR menghitung CKPN individu dengan pendekatan agunan. CKPN yang dibentuk dengan pendekatan agunan minimal sama dengan CKPN yang telah dibentuk sebelumnya.
- 2) Secara Kolektif
- a) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- masa datang dan tingkat kerugian historis (*historical loss rate* atau *historical net charge-off rate*) dari kelompok kredit.
- b) Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal dalam melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (*recovery rate*), BPR dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini.
 - c) BPR dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis. Namun, dalam menetapkan periode tersebut, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, BPR harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 (tiga) tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti.
 - d) Dalam menetapkan tingkat kerugian untuk kelompok kredit, BPR perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) analisis penurunan nilai kelompok kredit;
 - (2) umur kredit dalam kelompok kredit (*aging of balance*);
 - (3) arus kas dari seluruh sisa umur kredit (tidak hanya tahun berikutnya);
 - (4) kondisi terkini, baik internal maupun eksternal;
 - (5) pengaruh nilai waktu dari uang (*time value of money*); dan
 - (6) tidak menghasilkan suatu tingkat kerugian historis yang mengharuskan pengakuan kerugian pada saat pengakuan awal kredit.
 - e) BPR dapat menggunakan pendekatan metode statistik dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu:
 - (1) *Probability of Default* (PD)
Probability of Default, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis*, *Roll Rates*, atau metode lainnya.
 - (2) *Loss Given Default*
Loss Given Default yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Expected Recoveries*, *Collateral Shortfall*, atau metode lainnya.
 - h. Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - 1) BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama;
 - 2) BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau
 - 3) BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi,yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

menggunakan *peer group data* sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

12.5. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi sebagai “beban kerugian penurunan nilai” pada laba rugi dan sebagai “CKPN” pada laporan posisi keuangan.
- b. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa tertentu setelah pengakuan penurunan nilai maka BPR memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui tersebut dengan menjurnal balik “beban kerugian penurunan nilai” pada laba rugi dan “CKPN” pada laporan posisi keuangan, yaitu paling tinggi sebesar CKPN yang telah dibentuk.

Penyajian

- a. CKPN kredit disajikan sebagai pos pengurang dari pos Kredit sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit tersebut.
- b. Kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional pada pos “beban kerugian penurunan nilai - kredit”.

12.6. PERHITUNGAN PD

Salah satu komponen yang dibentuk dalam perhitungan CKPN adalah *probability of default* (PD). Untuk membantu memahami mekanisme perhitungan PD, *excel* pembentukan PD tersedia pada situs web resmi OJK bagian Perbankan – Pedoman Akuntansi Perbankan.

12.6.1 PERHITUNGAN PD DENGAN *NET FLOW*

- a. Pendekatan ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit ke *bucket* yang lebih buruk dari bulan ke bulan selama periode waktu tertentu.
- b. Langkah perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) BPR terlebih dahulu harus mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit yang serupa misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, skema kredit, atau lainnya.
 - 2) Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan misalnya kelompok modal kerja, konsumtif, dan investasi maka BPR harus menghitung PD sesuai dengan kelompok kredit tersebut sehingga menghasilkan 3 (tiga) PD.
 - 3) Data yang digunakan adalah data *outstanding* kredit bulanan berdasarkan hari tunggakan pokok dan/atau bunga serta data kredit hapus buku bulanan. Contoh yang ditampilkan dalam panduan ini adalah 12 bulan untuk simplifikasi tampilan.
 - 4) Kelompokkan kredit berdasarkan *bucket* tunggakan pokok dan/atau bunga untuk setiap bulan. *Bucket* ditetapkan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

berdasarkan rentang tunggakan pokok dan/atau bunga misalnya *bucket* dengan 0 hari tunggakan, 1-30 hari tunggakan, 31-60 hari tunggakan, dan seterusnya sampai dengan *bucket* terburuk dalam portofolio kredit.

Contoh Ilustrasi Data

No. Bucket	Hari tunggakan	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26
0	0-7 hari	937.800.000	996.500.000	1.000.860.000	1.025.080.000	1.064.600.000	1.111.800.000	1.151.400.000	1.184.900.000	1.226.000.000	1.244.000.000	1.268.000.000	992.000.000	994.000.000
1	8-30 hari	47.400.000	38.400.000	39.300.000	43.800.000	36.300.000	35.700.000	34.700.000	33.900.000	35.100.000	27.800.000	35.500.000	30.000.000	24.150.000
2	31-60 hari	16.700.000	19.100.000	163.000.000	16.210.000	16.500.000	14.900.000	14.400.000	13.000.000	14.170.000	14.880.000	13.370.000	13.100.000	11.800.000
3	61-90 hari	12.300.000	13.700.000	15.600.000	13.100.000	12.500.000	12.900.000	11.700.000	12.100.000	11.000.000	11.500.000	12.700.000	8.600.000	9.700.000
4	91-120 hari	8.300.000	10.800.000	11.900.000	14.200.000	11.700.000	10.700.000	11.200.000	10.300.000	11.100.000	10.200.000	10.800.000	9.100.000	7.000.000
5	121-150 hari	8.500.000	6.600.000	9.600.000	10.500.000	12.500.000	10.000.000	9.700.000	10.000.000	8.900.000	9.700.000	8.800.000	8.600.000	8.800.000
6	151-180 hari	8.000.000	8.400.000	6.500.000	9.500.000	10.350.000	12.100.000	9.750.000	9.500.000	9.900.000	8.850.000	9.600.000	7.800.000	8.300.000
7	181-210 hari	7.000.000	7.600.000	8.000.000	6.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	9.000.000	9.200.000	9.500.000	8.500.000	9.000.000	7.500.000
8	211-240 hari	6.500.000	6.900.000	7.500.000	7.800.000	5.900.000	8.800.000	9.000.000	10.000.000	8.900.000	9.000.000	9.300.000	8.300.000	8.500.000
9	241-270 hari	6.400.000	6.300.000	6.500.000	7.400.000	7.800.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	8.000.000
10	271-300 hari	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	7.300.000	7.500.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000
11	301-330 hari	5.800.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000	6.300.000	7.200.000	7.000.000	4.000.000	7.500.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000	6.900.000
12	331-360 hari	5.600.000	5.700.000	5.600.000	5.700.000	5.900.000	6.200.000	7.000.000	8.000.000	3.500.000	7.400.000	7.000.000	8.000.000	6.500.000
13	>360+WO	5.500.000	5.600.000	5.500.000	5.500.000	5.400.000	5.600.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000	3.000.000	2.800.000	6.600.000	7.500.000
	WO													
	Recovery >360													
	Recovery write off													

- 5)
- BPR juga perlu memetakan perpindahan kredit sampai dengan kredit tersebut dilakukan hapus buku (*bucket* terburuk) untuk melihat *behavior* dari setiap kategori berdasarkan risiko atau karakteristik kredit serupa.
- 6)
- Hitung proporsi (%) perpindahan *outstanding* kredit dari masing-masing *bucket* per bulan dengan cara membandingkan *outstanding* kredit pada *bucket* yang lebih baik pada periode bulan t dengan *outstanding* kredit pada *bucket* yang lebih buruk pada periode bulan t+1. Perpindahan ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit.

Contoh Ilustrasi Data

Perpindahan Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
1 to 2	40,30%	424,48%	41,25%	37,67%	41,05%	40,34%	37,46%	41,80%	42,39%	48,09%	36,90%	39,33%
2 to 3	82,04%	81,68%	8,04%	77,11%	78,18%	78,52%	84,03%	84,62%	81,16%	85,35%	59,84%	74,05%
3 to 4	87,80%	86,86%	91,03%	89,31%	85,60%	86,82%	88,03%	91,74%	92,73%	93,91%	71,65%	87,50%
4 to 5	79,52%	88,89%	88,24%	88,03%	85,47%	90,65%	89,29%	86,41%	87,39%	86,27%	79,63%	96,70%
5 to 6	98,82%	98,48%	98,96%	98,57%	96,80%	97,50%	97,94%	99,00%	99,44%	98,97%	88,64%	96,51%
6 to 7	95,00%	95,24%	92,31%	94,74%	96,62%	99,17%	92,31%	96,84%	95,96%	96,05%	93,75%	96,15%
7 to 8	98,57%	98,68%	98,75%	98,33%	97,78%	90,00%	83,33%	98,89%	97,83%	97,89%	97,65%	94,44%
8 to 9	96,92%	94,20%	98,67%	98,73%	93,22%	96,59%	94,44%	95,00%	95,51%	94,44%	96,77%	96,39%
9 to 10	93,75%	98,41%	98,46%	98,65%	96,15%	90,91%	94,12%	94,12%	94,74%	94,12%	94,12%	94,44%
10 to 11	95,00%	96,67%	96,77%	98,44%	98,63%	93,33%	80,00%	93,75%	93,75%	94,44%	93,75%	106,25%
11 to 12	98,28%	98,25%	98,28%	98,33%	98,41%	97,22%	85,71%	87,50%	98,67%	93,33%	94,12%	86,67%
12 to 13	100,00%	96,49%	98,21%	94,74%	94,92%	88,71%	92,86%	91,67%	85,71%	37,84%	94,29%	93,75%

Sebagai contoh nilai 40,30% pada kolom Jan-25 tabel diatas didapatkan dari hasil pembagian nilai pada tabel nomor 4) yaitu 19.100.000 pada *bucket* 2 di Feb-25 dibagi dengan 47.400.000 pada *bucket* 1 di Jan-25.

- 7)
- Hitung PD dengan cara *compound flow to loss* untuk masing-masing *bucket* dan periode bulan lalu rata-ratakan hasil setiap *bucket* untuk mendapat PD akhir.
- (a)
- Pembentukan *compound flow to loss*
- Nilai *compound flow to loss* didapatkan oleh bank menggunakan nilai persentase perpindahan *bucket* yang telah dihitung di nomor 6) diatas. Perhitungan dilakukan untuk seluruh *bucket*.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, skema kredit, atau lainnya.

- 2) Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan misalnya kelompok modal kerja, konsumtif, dan investasi maka BPR harus menghitung PD sesuai dengan kelompok kredit tersebut sehingga menghasilkan 3 (tiga) PD.
- 3) Data yang digunakan adalah data *outstanding* kredit dari 1 periode tertentu (bulan “n” tahun “t”) berdasarkan kualitas kredit dan *outstanding* kredit dari periode (bulan “n” tahun “t+1”), data kredit yang dihapus buku, dan data pembayaran kredit.

Sebagai contoh data yang digunakan merupakan data kredit tahun 2023 dan 2024.

Maret 2023			Maret 2024		
No rekening	Kualitas	Baki debit	No rekening	Kualitas	Baki debit
A0246	5	8.800.000	A0246	5	8.800.000
A1357	1	22.000.000	A1357	Lunas	Lunas
A2468	2	2.000.000	A2468	2	2.000.000
A3579	1	7.000.000	A3579	3	5.000.000
A4680	1	28.000.000	A4680	1	20.000.000
A5791	2	4.500.000	A5791	Lunas	Lunas
A6802	1	2.000.000	A6802	1	2.000.000
A7913	4	5.600.000	A7913	5	5.600.000
A8024	1	1.000.000	A8024	1	600.000
A9135	3	5.300.000	A9135	4	5.300.000

- 4) Kelompokkan kredit berdasarkan kualitas kredit (*bucket* kualitas) pada bulan “n” tahun “t” (sebagai basis atau saldo awal). Petakan perpindahan kredit berdasarkan kualitasnya dari bulan “n” tahun “t” ke bulan “n” tahun “t+1”, termasuk perpindahan pada kredit yang dihapusbuku dan kredit yang telah dibayar.
- 5) Hitung proporsi (%) perpindahan *outstanding* kredit dari masing-masing *bucket* kualitas dengan cara membandingkan *outstanding* kredit pada masing-masing *bucket* kualitas dengan saldo awal posisi bulan “n” tahun “t”. Proporsi ini menunjukkan migrasi kredit dari 1 *bucket* kualitas ke *bucket* kualitas lainnya.

Contoh ilustrasi data

Posisi Maret 2020									
Kualitas	Saldo awal (31 Maret 2023)	posisi 31 Maret 2024						Hapus Buku	Pembayaran
		1	2	3	4	5			
1	64.556.976.812	5.544.533.966	5.284.097.492	230.675.588	258.669.401	92.436.631		53.146.563.734	64.556.976.812
2	31.665.605.230	274.348.538	3.112.296.246	120.768.017	279.326.818	549.692.577		27.329.173.034	31.665.605.230
3	4.211.132.481	85.092.279	12.055.279	22.142.410	36.869.435	2.116.424.613		1.938.548.465	4.211.132.481
4	2.363.302.378	-	22.219.886	1.500.000	97.091.648	1.278.816.304		963.674.540	2.363.302.378
5	6.003.786.354	14.608.323	-	-	-	3.989.488.616	61.073.061	1.938.616.354	6.003.786.354
	108.800.803.255								108.800.803.255

Kualitas	Saldo awal (31 Maret 2023)	posisi 31 Maret 2024						Hapus Buku	Pembayaran	TOTAL
		1	2	3	4	5				
1	64.556.976.812	8,6%	8,2%	0,4%	0,4%	0,1%	0,0%	82,3%		0,5%
2	31.665.605.230	0,9%	9,8%	0,4%	0,9%	1,7%	0,0%	86,3%		1,6%
3	4.211.132.481	2,0%	0,3%	0,5%	0,9%	50,3%	0,0%	46,0%		34,2%
4	2.363.302.378	0,0%	0,9%	0,1%	4,1%	54,1%	0,0%	40,8%		36,51%
5	6.003.786.354	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	66,4%	1,0%	32,3%		67,5%
	108.800.803.255									

- 6) Mekanisme perhitungan PD menggunakan perkalian *joint probability* yang dimulai dari *bucket* kualitas paling buruk.
- 7) Jika BPR menggunakan beberapa posisi bulan, maka untuk menghasilkan PD dapat dilakukan dengan menghitung *weighted average* PD pada setiap posisi. PD maksimal bernilai 100%.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Contoh Ilustrasi Data
Rata-rata PD berdasarkan PD Triwulanan

Kualitas	weighted average	Average
1	0,9%	0,9%
2	2,8%	2,7%
3	27,1%	22,5%
4	37,3%	40,7%
5	80,2%	79,4%

12.7. PERHITUNGAN LGD

- a. Dalam perhitungan penurunan nilai berdasarkan kolektif, BPR terlebih dahulu mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit serupa (misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, atau skema kredit). Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan modal kerja, konsumtif, dan investasi, maka BPR membentuk LGD sesuai dengan kelompok kredit tersebut yaitu sebanyak 3 jenis LGD. Jika data tidak mendukung, BPR dapat membuat LGD *all account*.
- b. Pedoman ini memperkenalkan dua cara perhitungan LGD yaitu perhitungan LGD menggunakan *expected recovery* dan perhitungan LGD menggunakan *collateral shortfall*.

12.7.1. PERHITUNGAN LGD DENGAN *EXPECTED RECOVERIES*

Perhitungan LGD dengan Metode *expected recoveries* menggunakan hasil dari *recovery* kredit yaitu kredit macet yang telah memenuhi kriteria *default* dan/atau hapus buku atas kredit yang telah dihapusbuku.
Contoh dalam panduan ini menggunakan *recovery* dari kredit yang telah dihapusbuku.

Langkah 1: BPR mengumpulkan data kredit berdasarkan kategori kredit yang dihapusbuku pertahun dan jumlah pembayaran kembali atas kredit yang dihapusbuku (termasuk data suku bunga efektif saat dihapusbuku).

Contoh Ilustrasi langkah 1

Tahun hapus buku 2019		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nama Nasabah	Balance hapus buku	year 1	year 2	year 3	year 4	year 5	year 6	suku bunga efektif
A	79.487.179,20	79.487.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	
	recovery	-	1.450.000,00	-	-	-	-	19,82%
B	102.067.926,00	100.628.226,00	99.861.797,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	
	recovery	1.439.700,00	766.429,00	150.012,00	-	-	-	18,03%
C	172.121.860,96	171.121.860,96	171.121.860,96	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	
	recovery	1.000.000,00	-	63.380,72	-	-	-	18,06%
D	156.186.979,50	156.186.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	
	recovery	-	4.500.000,00	-	-	-	-	18,07%
E	90.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	
	recovery	76.000.000,00	-	-	-	-	-	19,04%

Sebagai contoh BPR memiliki lima nasabah yang dihapus buku pada tahun 2019 dengan data *balance* hapus buku, jumlah penerimaan kembali setiap tahunnya, dan nilai suku bunga efektif ketika dihapus buku sebagaimana tabel diatas.

Langkah 2: BPR menghitung nilai *present value* pembayaran kembali yg melebihi 1 tahun dari kredit yang dihapusbuku dengan diskonto nilai pembayaran menggunakan suku bunga efektif kredit.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Contoh Ilustrasi Langkah 2

Tahun hapus buku 2019		2019	2020	2021	2022	2023	2024	suku bunga efektif	NPV atas recovery	Jumlah recovery
Nama Nasabah	Balance hapus buku	year 1	year 2	year 3	year 4	year 5	year 6			
A	79.487.179,20	79.487.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	-	-	-
	recovery	-	1.450.000,00	-	-	-	-	19,82%	1.210.104,32	1.210.104,32
B	102.067.926,00	100.628.226,00	99.861.797,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	-	-	-
	recovery	1.439.700,00	766.429,00	150.012,00	-	-	-	18,03%	757.032,53	2.196.732,53
C	172.121.860,96	171.121.860,96	171.121.860,96	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	-	-	-
	recovery	1.000.000,00	-	63.380,72	-	-	-	18,06%	45.474,87	1.045.474,87
D	156.186.979,50	156.186.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	-	-	-
	recovery	-	4.500.000,00	-	-	-	-	18,07%	3.811.255,53	3.811.255,53
E	90.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	-	-	-
	recovery	76.000.000,00	-	-	-	-	-	19,04%	-	76.000.000,00

Langkah 3: BPR menghitung *recovery rate*, yaitu persentase pembayaran kembali terhadap jumlah kredit yang dihapus buku untuk masing-masing posisi.

Contoh Ilustrasi Langkah 3

Tahun hapus buku 2019		2019	2020	2021	2022	2023	2024	suku bunga efektif	NPV atas recovery	Jumlah recovery	Recovery Rate
Nama Nasabah	Balance hapus buku	year 1	year 2	year 3	year 4	year 5	year 6				
A	79.487.179,20	79.487.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	-	-	-	-
	recovery	-	1.450.000,00	-	-	-	-	19,82%	1.210.104,32	1.210.104,32	1,52%
B	102.067.926,00	100.628.226,00	99.861.797,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	-	-	-	-
	recovery	1.439.700,00	766.429,00	150.012,00	-	-	-	18,03%	757.032,53	2.196.732,53	2,15%
C	172.121.860,96	171.121.860,96	171.121.860,96	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	-	-	-	-
	recovery	1.000.000,00	-	63.380,72	-	-	-	18,06%	45.474,87	1.045.474,87	0,61%
D	156.186.979,50	156.186.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	-	-	-	-
	recovery	-	4.500.000,00	-	-	-	-	18,07%	3.811.255,53	3.811.255,53	2,44%
E	90.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	-	-	-	-
	recovery	76.000.000,00	-	-	-	-	-	19,04%	-	76.000.000,00	84,19%

Nilai *recovery rate* nasabah A sebesar 1.52% didapat dari jumlah recovery dibagi *balance* hapus buku yaitu 1.210.104,32/79.487.179,20.

Langkah 4: Setelah BPR menghitung Langkah 2 dan 3 sampai dengan posisi tahun terkini, BPR menghitung pengembalian rata-rata (*expected recoveries*). Sebagai contoh, jika data yang dimiliki BPR dimulai dari tahun hapus buku 2019, maka BPR melakukan rata-rata *recovery rate* dari tahun hapus buku 2019 sampai dengan 2024 (posisi pedoman ini disusun), atau sampai dengan posisi terkini BPR melakukan perhitungan LGD.

Langkah 5: Nilai LGD = 1 – rata-rata *recovery rate*.

12.7.2. PERHITUNGAN LGD DENGAN COLLATERAL SHORTFALL

Perhitungan LGD Metode *Collateral shortfall* menggunakan data penerimaan dari hasil penjualan/eksekusi agunan yang telah dikuasai oleh BPR.

Langkah 1: BPR mengumpulkan data nilai penjualan agunan atas kredit (untuk yang belum dieksekusi menggunakan nilai estimasi agunan).

Contoh Ilustrasi Langkah 1

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminakan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00
Total	800.300.000					664.300.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Langkah 2: BPR menghitung nilai *present value* dari nilai agunan hasil eksekusi.

Contoh Ilustrasi Langkah 2

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminkan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya	NPV Nilai agunan hasil eksekusi pada kolom H
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000	78.036.884,62
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000	525.974.346,56
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000	9.000.000,00
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000	292.638,32
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	800.300.000					664.300.000	

Langkah 3: BPR menghitung kerugian/ *shortfall* yang merupakan selisih antara baki debit kredit yang belum dilunasi dengan nilai penjualan agunan. Nilai LGD akhir merupakan pembagian dari nilai kerugian dengan baki debit yang belum dilunasi.

Contoh Ilustrasi Langkah 3

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminkan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya	NPV Nilai agunan hasil eksekusi pada kolom H	shortfall (kerugian)
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000	78.036.884,62	21.963.115
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000	525.974.346,56	-
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000	9.000.000,00	191.000.000
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000	292.638,32	7.362
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Total	800.300.000					664.300.000		212.970.477

$LGD = 26,6\%$

Nilai kerugian bagi rekening 1 sebesar Rp21.963.115 didapatkan dari Rp100.000.000-Rp78.036.884,62. Rekening 2 tidak memiliki kerugian karena *present value* dari nilai agunan hasil eksekusi lebih besar dari baki debit yang belum lunas. Begitu pula bagi rekening 5 tidak memiliki kerugian dikarenakan agunan dari rekening 5 belum dieksekusi.

LGD 26.6% didapatkan dari nilai total kerugian/total baki debit yaitu Rp212.970.477/Rp800.300.00.

12.8. PERHITUNGAN CKPN

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan *outstanding* kredit (*exposure at default/EAD*).

Penurunan nilai = PD X LGD X EAD

- Contoh ilustrasi (menggunakan contoh PD dan LGD pada 12.6 dan 12.7)
- a. CKPN dengan Perhitungan PD menggunakan metode *netflow*
Jumlah cadangan yang harus dibentuk sebesar Rp43.903.658 yang berasal dari jumlah penurunan nilai *bucket* 1 sampai dengan penurunan nilai *bucket* 13.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Bucket	Hari Tunggakan	Baki Debet posisi Des 2025 (EAD)	PD	LGD	Penurunan Nilai
0	0 hari sd 7 hari	992.000.000	0%	66,75%	0
1	8- 30 hari	30.000.000	14,23%	66,75%	2.849.068
2	31 - 60 hari	13.100.000	33,00%	66,75%	2.885.369
3	61 - 90 hari	8.000.000	43,18%	66,75%	2.305.892
4	91 -120 hari	9.100.000	48,17%	66,75%	2.925.914
5	121 -150 hari	8.600.000	55,65%	66,75%	3.194.341
6	151 - 180 hari	7.800.000	58,92%	66,75%	3.067.752
7	181-210 hari	9.000.000	63,04%	66,75%	3.786.995
8	211-240 hari	8.300.000	67,38%	66,75%	3.732.837
9	241-270 hari	9.000.000	71,80%	66,75%	4.313.494
10	271-300 hari	8.000.000	77,22%	66,75%	4.123.493
11	301 -330 hari	7.500.000	82,84%	66,75%	4.147.429
12	331-360 hari	8.000.000	89,10%	66,75%	4.757.868
13	>360 hari	6.600.000	100,00%	66,75%	4.405.521
Jumlah cadangan yang harus dibentuk/jumlah penurunan nilai =					46.495.972

b. CKPN dengan Perhitungan PD menggunakan metode *migration*

Kualitas	Baki Debet Posisi Des 2021 (EAD)	PD	LGD	Penurunan Nilai
1	1.018.150.000	0,92%	66,75%	6.260.559
2	21.500.000	2,72%	66,75%	390.158
3	24.100.000	22,46%	66,75%	3.613.561
4	41.000.000	40,72%	66,75%	11.143.859
5	5.500.000	79,42%	66,75%	2.915.870
Jumlah cadangan yang harus dibentuk/jumlah penurunan nilai =				24.324.007

12.9. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat terjadi penurunan nilai	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset keuangan
Kr.	CKPN – Aset keuangan
Pada saat pemulihan penurunan nilai	
Db.	Pendapatan operasional lainnya - Pemulihan CKPN
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset keuangan

12.10. CONTOH KASUS

Perhitungan CKPN individual

Pada tanggal 1 Januari 2026, BPR “XYZ” memberikan kredit kepada debitur “ABC” dengan data sesuai perjanjian kredit berikut:

Plafon = Rp1.000.000.000
Jangka waktu = 2 tahun atau 24 bulan
Jenis Kredit = Investasi untuk pembelian mesin
Bunga = 15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi = 0.10% atau Rp1.000.000
Biaya transaksi = Rp500.000

Jadwal Angsuran Pokok

Semester 1 2026 = Rp250.000.000
Semester 2 2026 = Rp250.000.000
Semester 1 2027 = Rp250.000.000
Semester 2 2027 = Rp250.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan BPR sebesar Rp999.500.000 (Rp1.000.000.000 – Rp1.000.000 + Rp500.000). Estimasi arus kas masa datang sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi – Biaya Perolehan Diamortisasi

No.	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D=(In-1)	E=(Dn-1)x EIR	F	G=p x i	H=E-G	I=D+E+F+G
1	01-Jan-26	(999.500.000)						999.500.000
2	31-Jan-26	12.500.000	999.500.000	12.531.142		(12.500.000)	31.142	999.531.142
3	28-Feb-26	12.500.000	999.531.142	12.531.532		(12.500.000)	31.532	999.562.674
4	31-Mar-26	12.500.000	999.562.674	12.531.927		(12.500.000)	31.927	999.594.601
5	30-Apr-26	12.500.000	999.594.601	12.532.328		(12.500.000)	32.328	999.626.928
6	31-May-26	12.500.000	999.626.928	12.532.733		(12.500.000)	32.733	999.659.661
7	30-Jun-26	262.500.000	999.659.661	12.533.143	(250.000.000)	(12.500.000)	33.143	749.692.805
8	31-Jul-26	9.375.000	749.692.805	9.399.206		(9.375.000)	24.206	749.717.011
9	31-Aug-26	9.375.000	749.717.011	9.399.510		(9.375.000)	24.510	749.741.521
10	30-Sep-26	9.375.000	749.741.521	9.399.817		(9.375.000)	24.817	749.766.338
11	31-Oct-26	9.375.000	749.766.338	9.400.128		(9.375.000)	25.128	749.791.466
12	30-Nov-26	9.375.000	749.791.466	9.400.443		(9.375.000)	25.443	749.816.909
13	31-Dec-26	259.375.000	749.816.909	9.400.762	(250.000.000)	(9.375.000)	25.762	499.842.671
14	31-Jan-27	6.250.000	499.842.671	6.266.733		(6.250.000)	16.733	499.859.404
15	28-Feb-27	6.250.000	499.859.404	6.266.942		(6.250.000)	16.942	499.876.346
16	31-Mar-27	6.250.000	499.876.346	6.267.155		(6.250.000)	17.155	499.893.501
17	30-Apr-27	6.250.000	499.893.501	6.267.370		(6.250.000)	17.370	499.910.871
18	31-May-27	6.250.000	499.910.871	6.267.588		(6.250.000)	17.588	499.928.459
19	30-Jun-27	256.250.000	499.928.459	6.267.808	(250.000.000)	(6.250.000)	17.808	249.946.267
20	31-Jul-27	3.125.000	249.946.267	3.133.679		(3.125.000)	8.679	249.954.946
21	31-Aug-27	3.125.000	249.954.946	3.133.788		(3.125.000)	8.788	249.963.734
22	30-Sep-27	3.125.000	249.963.734	3.133.898		(3.125.000)	8.898	249.972.631
23	31-Oct-27	3.125.000	249.972.631	3.134.009		(3.125.000)	9.009	249.981.641
24	30-Nov-27	3.125.000	249.981.641	3.134.122		(3.125.000)	9.122	249.990.763
25	31-Dec-27	253.125.000	249.990.763	3.134.237	(250.000.000)	(3.125.000)	9.237	0
		1.187.500.000		188.000.000		(187.500.000)	500.000	

Suku bunga efektif : 1,2537%

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Berdasarkan evaluasi periodik yang dilakukan BPR, pada akhir September 2026 terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit, yaitu kegagalan debitur membayar kewajiban bunga pada tanggal 30 September 2026. Berdasarkan bukti objektif tersebut, BPR melakukan kembali estimasi arus kas masa datang yang mungkin akan diperoleh yang selanjutnya didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal untuk memperoleh nilai kini atas arus kas tersebut (Tabel 2). Adapun estimasi arus kas dimaksud ditetapkan berdasarkan *professional judgment* BPR. Selisih kurang antara nilai tercatat kredit sebelum terdapat bukti objektif penurunan nilai dan nilai kini estimasi arus kas masa datang merupakan CKPN yang harus dibentuk.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tabel 2. Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi– Biaya Perolehan Diamortisasi Setelah Terdapat Bukti Objektif Penurunan Nilai

No.	Tahun	Estimasi Arus Kas	Nilai Kini Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C		D=(In-1)	E=DxEIR	F	G=p x i	H=E-G	I=D+E+F+G
1	01-Jan-26	- 999,500,000							999,500,000
2	31-Jan-26	12,500,000		999,500,000	12,531,142		#####	31,142	999,531,142
3	28-Feb-26	12,500,000		999,531,142	12,531,532		#####	31,532	999,562,674
4	31-Mar-26	12,500,000		999,562,674	12,531,927		#####	31,927	999,594,601
5	30-Apr-26	12,500,000		999,594,601	12,532,328		#####	32,328	999,626,928
6	31-May-26	12,500,000		999,626,928	12,532,733		#####	32,733	999,659,661
7	30-Jun-26	262,500,000		999,659,661	12,533,143	- 250,000,000	#####	33,143	749,692,805
8	31-Jul-26	9,375,000		749,692,805	9,399,206		- 9,375,000	24,206	749,717,011
9	31-Aug-26	9,375,000		749,717,011	9,399,510		- 9,375,000	24,510	749,741,521
Terdapat Bukti Obyektif Penurunan Nilai									
10	30-Sep-26								
11	31-Oct-26								
12	30-Nov-26								
13	31-Dec-26	287,500,000	276,952,070						
14	31-Jan-27								
15	28-Feb-27								
16	31-Mar-27	5,000,000	4,639,846						
17	30-Apr-27								
18	31-May-27								
19	30-Jun-27	5,000,000	4,469,617						
20	31-Jul-27								
21	31-Aug-27								
22	30-Sep-27	5,000,000	4,305,634						
23	31-Oct-27								
24	30-Nov-27								
25	31-Dec-27	525,000,000	435,504,987						
			725,872,152						

Berdasarkan Tabel 2, perhitungan CKPN kredit tanggal 30 September 2026 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai

Nilai kini estimasi arus kas masa datang

CKPN

Rp749.741.521

Rp725.872.152

Rp 23.869.368

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pembebanan CKPN pada tanggal 30 September 2026		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – Kredit	Rp23.869.368
Kr.	CKPN – Kredit	Rp23.869.368

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XIII SIMPANAN

13.1. SIMPANAN PIHAK KETIGA BUKAN BANK

13.1.1. DEFINISI

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

13.1.2. PENJELASAN

- a. Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan, deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Bentuk-bentuk simpanan berupa:
 - 1) Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 2) Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu.
 - 3) Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- c. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Misalnya: hadiah dan *cash back* yang dapat diatribusikan secara langsung serta premi penjaminan simpanan. Hadiah dan *cash back* umumnya hanya dapat diatribusikan untuk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu.
- d. Contoh biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung adanya pemberian hadiah bagi nasabah yang membuka deposito dengan nominal penempatan tertentu atau hadiah bagi nasabah yang membuka rekening tabungan dengan nilai simpanan tertentu.

13.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

- a. Tabungan
 - 1) Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyeteroran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung.
 - 2) Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
 - 3) Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
 - 4) Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b. Deposito
 - 1) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
 - 2) Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
 - 3) Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito.
 - 4) Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga.

Penyajian

- a. Tabungan

Saldo tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- b. Deposito
 - 1) Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban.
 - 2) Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

13.1.4. ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat penerimaan setoran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening bank
Kr.	Tabungan/deposito – biaya perolehan diamortisasi
b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan:	
Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tabungan/deposito – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/rekening bank
Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Kas/rekening bank
c. Pada saat penarikan tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tabungan/deposito – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/rekening bank
d. Pengakuan beban bunga tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga - tabungan/deposito
Kr.	Utang bunga - tabungan/deposito
e. Amortisasi biaya transaksi yang diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Tabungan/deposito – biaya perolehan diamortisasi
f. Pembayaran bunga tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga - tabungan/deposito
Kr.	Rekening nasabah
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah

13.1.5. CONTOH KASUS

Pada tanggal 19 November 2024, seorang nasabah membuka rekening deposito sebesar Rp10.000.000 yang disetor secara tunai di BPR “XYZ” untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada saat nasabah membuka rekening deposito tanggal 19 November 2024, dicatat dengan jurnal:

Db.	Kas/rekening bank	Rp10.000.000
Kr.	Deposito – biaya perolehan diamortisasi	Rp10.000.000
	Asumsi tidak terdapat biaya yang diatribusikan.	

- b. Pengakuan beban bunga (setiap hari), dicatat dengan jurnal:

Db.	Beban bunga - deposito	Rp1.644
Kr.	Utang bunga - deposito	Rp1.644
	Bunga setiap hari = Rp10.000.000 x 1/365 x 6% = Rp1.644 Jumlah hari bunga dari tanggal 19 November 2024 s/d 19 Desember 2024 adalah 30 hari, sehingga total beban bunga deposito adalah Rp49.320 (30 x Rp1.644)	

- c. Pada saat deposito jatuh tempo tanggal 19 Desember 2024

1) Pembayaran bunga deposito, dicatat dengan jurnal:		
Db.	Utang bunga - deposito	Rp49.320
Kr.	Rekening nasabah	Rp39.456
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah	Rp9.864
	(Pajak = 20% x Rp49.320= Rp9.864, tarif pajak mengikuti ketentuan yang berlaku)	
2) Pembayaran nominal deposito, dicatat dengan jurnal:		
Db.	Deposito – biaya perolehan	Rp10.000.000
Kr.	diamortisasi Rekening nasabah	Rp10.000.000

13.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN

13.2.1. DEFINISI

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia.

13.2.2. PENJELASAN

- a. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito.
b. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

13.2.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Tabungan dari bank lain
1) Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain.
2) Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
3) Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
b. Deposito dari bank lain
1) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 2) Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- 3) Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito.

Penyajian

- a. Tabungan dari bank lain
Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.
- b. Deposito dari bank lain
 - 1) Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban.
 - 2) Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

13.2.4. ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat penerimaan setoran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening bank
Kr.	Simpanan dari bank lain - tabungan/deposito
b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan:	
Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tabungan/deposito – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/rekening bank
Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Kas/rekening bank
c. Pada saat pembebanan biaya administrasi (jika ada), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening
Kr.	Pendapatan operasional lain-lain (biaya administrasi)
d. Pada saat penarikan tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Simpanan dari bank lain – tabungan/deposito
Kr.	Kas/rekening bank
e. Pengakuan (pembayaran) bunga tabungan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga – tabungan
Kr.	Simpanan dari bank lain - tabungan
f. Pada saat pengakuan bunga deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga – tabungan/deposito
Kr.	Utang bunga – tabungan/deposito
g. Pembayaran bunga tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga – tabungan/deposito
Kr.	Kas/rekening/simpanan dari bank lain
Kr.	Liabilitas segera – pajak nasabah

13.2.5. CONTOH KASUS

Contoh kasus Simpanan dari Bank Lain mengacu pada contoh kasus pada Bab XIII tentang Simpanan subbab Simpanan Pihak Ketiga Bukan Bank.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XIV
LIABILITAS SEGERA

14.1. DEFINISI

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

14.2. PENJELASAN

- a. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain.
- b. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.
- c. Jenis liabilitas segera antara lain:
 - 1) penutupan rekening deposito jatuh tempo;
 - 2) titipan nasabah;
 - 3) selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah;
 - 4) dividen yang belum dibayarkan;
 - 5) liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar;
 - 6) sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan;
 - 7) gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.
- d. Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

14.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat:

- a. liabilitas telah jatuh tempo; atau
- b. liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

Penyajian

Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

14.4. ILUSTRASI JURNAL

a. Penutupan rekening tabungan atau deposito jatuh tempo	
1) Pada saat penutupan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Deposito
Db.	Beban bunga deposito
Kr.	Liabilitas segera - Simpanan (penutupan rekening)
2) Pada saat penyelesaian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas segera – Simpanan (penutupan rekening)
Kr.	Kas/Rekening
b. Titipan nasabah	
1) Pada saat penerimaan kiriman uang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Liabilitas segera - Kiriman uang
2) Pada saat dilakukan pembayaran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas segera - Kiriman uang
Kr.	Kas/Rekening
c. Selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah	
1) Pada saat penjualan agunan, dicatat dalam jurnal:	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Kas/Rekening
Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Pendapatan bunga (jika ada)
Kr.	Liabilitas segera - Selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah
2)	Pada saat penyelesaian, dicatat dalam jurnal:
Db.	Liabilitas segera - Selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah
Kr.	Kas/Rekening
d.	Dividen yang belum dibayarkan
1)	Pada saat ditetapkan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Saldo laba
Kr.	Liabilitas segera – Utang dividen
2)	Pada saat dibayarkan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Liabilitas segera – Utang dividen
Kr.	Kas/Rekening
e.	Potongan Pajak
1)	Pada saat potongan pajak dilakukan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Pos tertentu
Kr.	Liabilitas segera – Potongan pajak
2)	Pada saat disetorkan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Liabilitas segera – Potongan pajak
Kr.	Kas/Rekening
f.	Sanksi administratif berupa denda kepada otoritas terkait namun belum dibayarkan
1)	Pada saat timbul kewajiban, dicatat dalam jurnal:
Db.	Beban nonoperasional
Kr.	Liabilitas segera – Sanksi administratif berupa denda
2)	Pada saat disetorkan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Liabilitas segera – Sanksi administratif berupa denda
Kr.	Kas/rekening

14.5. CONTOH KASUS

Pada tanggal 31 Maret 2025, BPR “ABC” menetapkan pembagian dividen sebesar Rp10.000.000.000. Dividen tersebut akan dibayarkan kepada para pemegang saham BPR “ABC” pada tanggal 24 April 2025, dicatat dalam jurnal:

	Pada saat penetapan dividen tanggal 31 Maret 2025:	
Db.	Saldo Laba	Rp10.000.000.000
Kr.	Liabilitas segera – Utang dividen	Rp10.000.000.000
	Pada saat pembayaran dividen kepada pemegang saham tanggal 24 April 2025:	
Db.	Liabilitas segera – Utang dividen	Rp10.000.000.000
Kr.	Kas	Rp10.000.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XV
UTANG

15.1. UTANG BUNGA

15.1.1. DEFINISI

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

15.1.2. PENJELASAN

- a. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.
- b. Utang bunga antara lain terdiri dari:
 - 1) Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga).
 - 2) Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah.
 - 3) Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

15.1.3. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

Penyajian

Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

15.1.4. ILUSTRASI JURNAL

1) Pada saat pengakuan bunga akrual/jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga – Tabungan/deposito/pinjaman yang diterima/pos terkait
Kr.	Utang bunga
2) Pada saat pembayaran bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga
Kr.	Kas/rekening

15.1.5. CONTOH KASUS

Contoh kasus pengakuan dan pembayaran utang bunga mengacu pada contoh kasus bab liabilitas yang menghasilkan bunga seperti Bab XIII tentang Simpanan dan Bab XVI tentang Pinjaman.

15.2. UTANG PAJAK

15.2.1. DEFINISI

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

15.2.2. DASAR PENGATURAN

SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

15.2.3. PENJELASAN

Utang pajak mencakup:

- a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau
- b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

15.2.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara.

Penyajian

Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

15.2.5. ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat membayar angsuran PPh Badan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pajak dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening
b. Pada saat akhir tahun, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban pajak penghasilan
Kr.	Pajak dibayar dimuka
Kr.	Utang pajak
c. Pada saat pembayaran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang pajak
Kr.	Kas/Rekening

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XVI PINJAMAN

16.1. DEFINISI

- a. Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang.
- b. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

16.2. DASAR PENGATURAN

- a. Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13).
- b. Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

16.3. PENJELASAN

- a. Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain.
- b. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR.
- c. Jenis pinjaman yang diterima antara lain:
 - 1) pinjaman bilateral;
 - 2) pinjaman sindikasi;
 - 3) pinjaman subordinasi; dan
 - 4) pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka *linkage*.
- d. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
- e. Pinjaman yang diterima tidak termasuk:
 - 1) setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau
 - 2) dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

16.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto).
- b. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga.
- c. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga.

Penyajian

- a. Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi.
- b. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik.
- d. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

16.5. ILUSTRASI JURNAL

- a. Pinjaman yang diterima yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1) Pada saat realisasi pinjaman diterima:	
Db.	Kas/Rekening bank (sebesar perolehan)
Kr.	Pinjaman yang diterima
2) Pencatatan biaya transaksi	
a) apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima
Kr.	Kas/Rekening bank (sebesar biaya transaksi)
b) apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa
Kr.	Kas/Rekening bank (sebesar biaya transaksi)
3) Pada saat pengakuan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Pinjaman yang diterima
Kr.	Utang bunga - Pinjaman yang diterima
4) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga - Pinjaman yang diterima
Kr.	Kas/rekening bank
5) Penghentian pengakuan – pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima
Db.	Utang bunga - Pinjaman yang diterima
Kr.	Kas/rekening bank

- b. Pinjaman Subordinasi dengan sistem diskonto (bunga dibayar di muka)

1) Pada saat penerbitan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi (sebesar nominal penerbitan dikurangi bunga dibayar di muka)
2) Pencatatan biaya transaksi	
a) apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
b) apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
3) Pada saat amortisasi diskonto (bunga) dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Beban bunga
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi
4) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi
Kr.	Kas

c. Pinjaman Subordinasi dengan sistem bunga (*at par*)

1) Pada saat penerbitan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi (sebesar nominal penerbitan)
2) Pencatatan biaya transaksi	
a) apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
b) apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
3) Pada saat pengakuan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Utang bunga (sebesar bunga kontraktual)
4) Pada saat realisasi pembayaran bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
5) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan

16.6. CONTOH KASUS

a. Pinjaman yang Diterima yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada tanggal 1 Januari 2025 BPR “ABC” mendapatkan pinjaman sebesar Rp200.000.000 dengan suku bunga 7% per tahun. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2034. Bunga dibayarkan pada setiap akhir tahun (31 Desember). Dalam rangka pinjaman tersebut, BPR “ABC” mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan sebesar Rp5.000.000.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tanggal	Arus Kas	Saldo Awal	Pembayaran		Beban Bunga	Biaya transaksi yang diamortisasi	Saldo Akhir
			Pokok	Bunga			
1 Januari 2025	195,000,000						195,000,000
31 Desember 2025	(14,000,000)	195,000,000	-	(14,000,000)	14,355,748	355,748	195,355,748
31 Desember 2026	(14,000,000)	195,355,748	-	(14,000,000)	14,381,938	381,938	195,737,685
31 Desember 2027	(14,000,000)	195,737,685	-	(14,000,000)	14,410,055	410,055	196,147,741
31 Desember 2028	(14,000,000)	196,147,741	-	(14,000,000)	14,440,243	440,243	196,587,984
31 Desember 2029	(14,000,000)	196,587,984	-	(14,000,000)	14,472,654	472,654	197,060,638
31 Desember 2030	(14,000,000)	197,060,638	-	(14,000,000)	14,507,450	507,45	197,568,088
31 Desember 2031	(14,000,000)	197,568,088	-	(14,000,000)	14,544,808	544,808	198,112,897
31 Desember 2032	(14,000,000)	198,112,897	-	(14,000,000)	14,584,917	584,917	198,697,813
31 Desember 2033	(14,000,000)	198,697,813	-	(14,000,000)	14,627,978	627,978	199,325,791
31 Desember 2034	(214,000,000)	199,325,791	(200,000,000)	(14,000,000)	14,674,209	674,209	0

Suku bunga efektif

7.36%

1) Pengukuran awal

Pada saat penerimaan pinjaman (tanggal 1 Januari 2025), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp195.000.000
Kr.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi	Rp195.000.000

2) Pengukuran selanjutnya

a) Pada saat pengakuan biaya bunga, amortisasi biaya transaksi (tanggal 31 Desember 2025), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp14.355.748
Kr.	Pinjaman yang diterima – biaya perolehan diamortisasi	Rp355.748
Kr.	Utang Bunga – Pinjaman yang Diterima	Rp14.000.000
b) Pada saat realisasi pembayaran bunga (tanggal 31 Desember 2025), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Utang Bunga – Pinjaman yang Diterima	Rp14.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp14.000.000

3) Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pinjaman yang diterima – biaya perolehan diamortisasi	Rp200.000.000
Db.	Utang bunga – Pinjaman yang	Rp14.674.209
Kr.	Diterima Kas/Rekening Bank	Rp214.674.209

b. Pinjaman Subordinasi

Pada tanggal 1 Januari 2025 BPR “ABC” memiliki Pinjaman Subordinasi sebesar Rp100.000.000 dengan suku bunga 7%. Pinjaman Subordinasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Pada saat penerbitan Pinjaman Subordinasi, BPR “ABC” membayar biaya jasa penunjang dan konsultansi sebesar Rp1.250.000 (1,25% dari nominal penerbitan). Penyelesaian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2025. BPR “ABC” mencatat transaksi penerbitan Pinjaman Subordinasi menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

Asumsi:

- 1) Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/365 hari.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 2) Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank “ABC” sebesar Rp10.000.000

Tabel 1: Arus Kas

Tanggal	Arus Kas	Keterangan
a	b	c
1 Januari 2025	100.000.000	Penerimaan hasil penerbitan
1 Januari 2025	-1.250.000	Pembayaran biaya transaksi
31 Desember 2025	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2026	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2027	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2028	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2029	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2030	-7.000.000	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2030	-100.000.000	Pelunasan
Total	-43.250.000	

Suku Bunga Efektif 7.26%

Tabel 2: Amortisasi

Tahun	Tanggal Akuisisi/ Saldo Awal	Beban Bunga	Amortisasi Biaya Transaksi	Arus Kas	Saldo Akhir
d	e	f		g = b	h = e + f + g
2025	98.750.000	7.173.584	173.584	-7.000.000	98.923.584
2026	98.923.584	7.186.194	186.194	-7.000.000	99.109.778
2027	99.109.778	7.199.720	199.720	-7.000.000	99.309.498
2028	99.309.498	7.214.228	214.228	-7.000.000	99.523.726
2029	99.523.726	7.229.791	229.791	-7.000.000	99.753.517
2030	99.753.517	7.246.483	246.483	-	0
Total		43.250.000	1.250.000	107.000.000	

1) Pencatatan pembayaran biaya transaksi tanggal 1 Januari 2025, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi	Rp1.250.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp1.250.000
2) Pencatatan saat penerbitan tanggal 1 Januari 2025, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas	Rp100.000.000
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi	Rp100.000.000
3) Pengakuan bunga, amortisasi biaya transaksi pada tanggal 31 Desember 2025, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga – Pinjaman subordinasi	Rp7.173.584
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi	Rp173.584

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Kr.	Utang bunga	Rp7.000.000
4) Pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2025, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Utang bunga	Rp7.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp7.000.000
5) Pengakuan bunga, amortisasi biaya transaksi pada tanggal 31 Desember 2026, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga – Pinjaman subordinasi	Rp7.186.194
Kr.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi	Rp186.194
Kr.	Utang bunga	Rp7.000.000
6) Pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2026, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Utang bunga	Rp7.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp7.000.000
(Jurnal untuk pengakuan dan pembayaran bunga serta amortisasi selanjutnya sama dengan jurnal angka 3) sampai dengan poin 6) di atas)		
7) Pencatatan pelunasan Pinjaman subordinasi saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pinjaman yang diterima – Pinjaman subordinasi	Rp100.000.000
Db.	Utang bunga	Rp7.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp107.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XVII
DANA SETORAN MODAL

17.1. DEFINISI

- a. Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

17.2. DASAR PENGATURAN

POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat.

17.3. PENJELASAN

- a. DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter.
- c. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

17.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas.
- b. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas.

Penyajian

DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

17.5. ILUSTRASI JURNAL

1) Pada saat menerima dana setoran modal dan menempatkan dalam <i>escrow account</i> , dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penempatan pada Bank Lain/Kas/Rekening BPR
Kr.	DSM – Liabilitas
2) Pada saat dana setoran modal telah disetujui dan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, dicatat dalam jurnal:	
Db.	DSM – Liabilitas
Kr.	DSM – Ekuitas

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

17.6. CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2026, BPR “ABC” melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp1.000.000.000 dalam bentuk *escrow account*. Penambahan modal tersebut dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada Bank Lain	Rp1.000.000.000
Kr.	DSM – Liabilitas	Rp1.000.000.000
	Dalam hal dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	DSM - Liabilitas	Rp1.000.000.000
Kr.	DSM - Ekuitas	Rp1.000.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XVIII

LIABILITAS IMBALAN KERJA

18.1. DEFINISI

- a. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)
- b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja.

18.2. DASAR PENGATURAN

- a. Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:
 - 1) imbalan kerja jangka pendek;
 - 2) imbalan pascakerja;
 - 3) imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan
 - 4) pesangon.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)
- b. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
 - 1) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah Liabilitas imbalan kerja (selain pesangon) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1).
 - 2) Contoh imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:
 - a) upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;
 - b) cuti berbayar (*paid leave*) jangka pendek, seperti cuti tahunan dan cuti sakit, jika cuti tersebut diperkirakan terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan;
 - c) pembagian laba dan bonus terutang;
 - d) imbalan nonmoneter, seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil serta barang atau jasa yang diberikan secara gratis atau melalui subsidi.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.4)
- c. Liabilitas imbalan pascakerja
 - 1) Liabilitas imbalan pascakerja adalah Liabilitas imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah kontrak kerja selesai. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)
 - 2) Contoh imbalan pascakerja:
 - a) imbalan purnakarya atau pensiun;
 - b) imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa pensiun dan pelayanan kesehatan pensiun;
 - c) perjanjian atau pengaturan dimana BPR memberikan imbalan pascakerja.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.9)
 - 3) Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung pada syarat dan kondisinya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.10)
 - 4) Dalam program iuran pasti:
 - a) Kewajiban BPR terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada BPR (dana) terpisah. Jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- iuran yang dibayarkan BPR (dan mungkin juga oleh pekerja) ditambah dengan imbal hasil dari iuran tersebut.
- b) BPR tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar iuran lebih lanjut atau melakukan pembayaran imbalan secara langsung kepada pekerja jika BPR (dana) terpisah dimaksud tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.10)
- 5) Dalam program imbalan pasti:
- a) Kewajiban BPR adalah memberikan imbalan yang disepakati kepada pekerja ataupun mantan pekerja.
 - b) Risiko aktuarial (bahwa imbalan tersebut akan lebih besar atau lebih kecil dari yang diperkirakan) dan risiko investasi (bahwa imbal hasil atas aset yang disisihkan untuk mendanai imbalan akan berbeda dari yang diperkirakan) ditanggung, secara substansi, oleh BPR.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.10)
- d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya
- 1) Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah Liabilitas imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)
 - 2) Contoh imbalan kerja jangka panjang lainnya:
 - a) cuti jangka panjang yang dikompensasi seperti cuti besar;
 - b) imbalan pengabdian;
 - c) imbalan cacat permanen;
 - d) bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih;
 - e) kompensasi tangguhan yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.29)
- e. Pesangon
- Pesangon adalah imbalan kerja yang terutang sebagai akibat dari salah satu berikut:
- 1) keputusan BPR untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
 - 2) keputusan pekerja untuk menerima pengurangan kontrak kerja secara sukarela untuk dipertukarkan dengan pesangon.
- (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

18.3. PENJELASAN

Bagian jangka pendek liabilitas imbalan kerja termasuk dalam liabilitas jangka pendek, sementara liabilitas imbalan kerja jangka panjang termasuk dalam liabilitas jangka panjang.

18.4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.
- b. Liabilitas imbalan kerja diakui sebesar biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai iuran pada dana imbalan kerja. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.3)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c. Jika jumlah imbalan kerja yang dibayarkan melebihi liabilitas yang timbul dari jasa sebelum tanggal pelaporan, maka BPR mengakui kelebihan tersebut sebagai aset sepanjang pembayaran di muka dimaksud akan mengurangi pembayaran di masa depan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.3)
- d. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek:
 - 1) Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)
 - 2) Untuk cuti berbayar (*paid leave*) jangka pendek yang diakumulasi, seperti cuti tahunan yang tidak digunakan di tahun berjalan dan diakumulasi ke tahun berikutnya, diakui biaya ekspektasiannya ketika pekerja memberikan jasa yang meningkatkan hak mereka atas cuti berbayar di masa depan dimaksud. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.6)
 - 3) Untuk program bagi laba dan bonus, BPR mengakui biaya ekspektasian hanya jika:
 - a) BPR memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran tersebut; dan
 - b) estimasi atas kewajiban dapat dibuat secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.8)
- e. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).
- f. Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukur liabilitas pada total neto dari:
 - 1) jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi
 - 2) nilai wajar aset program (jika ada),pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.15 dan 28.30).
- g. Jika BPR mampu, tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, maka BPR menggunakan metode *projected unit credit* (PUC) untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. BPR dapat mempertimbangkan untuk menggunakan penyederhanaan yang diizinkan oleh SAK EP dalam menggunakan metode PUC tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.18, 28.19, dan 28.24)
- h. Khusus untuk pesangon:
 - 1) BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan. Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk:
 - a) melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau
 - b) memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)
 - 2) BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37)

Penyajian

- a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan.
- b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

18.5. ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat terjadinya kewajiban, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban tenaga kerja
Kr.	Liabilitas lainnya – Liabilitas imbalan kerja
b. Pada saat kewajiban dibayarkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas lainnya – Liabilitas imbalan kerja
Kr.	Kas/Rekening
c. Pada saat mengakui keuntungan/kerugian aktuarial, dicatat dalam jurnal:	
Db/Kr	Liabilitas lainnya- Liabilitas imbalan kerja
Db/Kr	Keuntungan/kerugian aktuarial

18.6. CONTOH KASUS

Pada tanggal 31 Januari 2025, BPR “ABC” mengakui liabilitas imbalan kerja berupa tunjangan cuti masa pengabdian setiap tahun sebesar Rp6.000.000. Imbalan kerja tersebut akan dibayarkan BPR “ABC” pada tanggal 31 Desember 2025 kepada pegawai terkait, dicatat dalam jurnal:

Pada saat pengakuan kewajiban setiap bulan:		
Db.	Beban tenaga kerja	Rp500.000
Kr.	Liabilitas lainnya – liabilitas imbalan kerja	Rp500.000
	$Rp6.000.000 / 12 = Rp500.000$	
31 Desember 2025 Pada saat pembayaran tunjangan cuti masa pengabdian kepada pegawai:		
Db.	Liabilitas lainnya – liabilitas imbalan kerja	Rp6.000.000
Kr.	Kas	Rp6.000.000
	$(Rp500.000 \times 12 \text{ bulan})$	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XIX
LIABILITAS LAINNYA

19.1 DEFINISI

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

19.2 PENJELASAN

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

19.3 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Penyajian

Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

19.4 ILUSTRASI JURNAL

Liabilitas lainnya berupa penerusan kredit tanpa risiko
Penerusan kredit tanpa risiko yang ditanggung oleh BPR dimana BPR hanya menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan.

a. Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Liabilitas lainnya – dana untuk penyaluran kredit
b. Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur:	
	BPR tidak menerima provisi kredit karena BPR berada pada posisi meneruskan kredit tanpa risiko. BPR tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun BPR mencatat kredit alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.
c. Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas lainnya – Dana untuk penyaluran kredit
Kr.	Kas/Rekening debitur
	Bersamaan dengan itu bank mencatat pada rekening administratif, yaitu rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan.

19.5 CONTOH KASUS

BPR “DEF” menerima dana dari Perusahaan Pembiayaan “GHI” untuk disalurkan kepada debitur (*end-user*) sebesar Rp500.000.000. Dana yang telah diterima namun belum disalurkan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

a. Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp500.000.000
Kr.	Liabilitas lainnya – Dana untuk penyaluran kredit	Rp500.000.000
Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur, dicatat dalam jurnal:		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Tidak ada jurnal		
b. Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas lainnya – Dana untuk penyaluran kredit	Rp500.000.000
Kr.	Kas/Rekening penyedia dana	Rp500.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XX MODAL

20.1 DEFINISI

- a. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.
- b. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.
- c. Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- d. DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- e. Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

20.2 DASAR PENGATURAN

- a. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

20.3 PENJELASAN

- a. Modal merupakan komponen pembentuk ekuitas BPR. Modal pada bab ini terbagi menjadi modal disetor dan tambahan modal disetor.
- b. BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas
 - 1) Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dengan demikian, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dilakukan dengan cara mengangsur.
 - 2) Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama dan saham biasa.
- c. BPR berbentuk hukum Koperasi
 - 1) Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri dan mengandung risiko. Modal sendiri terdiri dari:
 - a) simpanan pokok;
 - b) simpanan wajib;
 - c) simpanan lain yang dapat digunakan untuk proses bisnis koperasi antara lain dana cadangan dan sumbangan.
 - 2) Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
- d. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti agio saham, dana setoran modal yang diakui sebagai ekuitas, dan tambahan modal disetor lainnya.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- e. DSM - Ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos DSM – Liabilitas.

20.4 PERLAKUAN AKUNTANSI

a. MODAL DISETOR

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).
- 2) Modal disetor dicatat ketika telah memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a) Jumlah uang yang diterima.
 - b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non-kas menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.
- 4) Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun agio saham.

Penyajian

- 1) Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
- 2) Dalam hal terdapat penyeteran modal yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih yang diterima BPR, selisih tersebut disajikan sebagai pos terpisah sebagai Agio. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.10).

b. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pengakuan dan Pengukuran

BPR mengukur tambahan modal disetor pada nilai wajar kas atau sumber daya lain yang diterima (dalam hal tambahan modal disetor dalam bentuk non-kas) setelah dikurangi biaya transaksi (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

Penyajian

Tambahan modal disetor disajikan dalam pos tersendiri setelah pos Modal pada laporan posisi keuangan.

20.5 ILUSTRASI JURNAL

a. Modal Disetor

1) Pada saat penysetoran awal modal oleh pemilik secara tunai sebesar nilai nominal, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Modal – dana setoran modal*)
Db.	Modal – dana setoran modal
Kr.	Modal Disetor

2) Pada saat penysetoran awal modal oleh pemilik secara tunai di atas nilai nominal, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Modal – dana setoran modal*)
Db.	Modal – dana setoran modal
Kr.	Modal Disetor
Kr.	Agio saham

*) dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang. Dana setoran modal dicatat sebagai modal ketika telah memenuhi persyaratan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pada saat penysetoran modal dalam bentuk barang (*inbren*g), dicatat dalam jurnal:

Db.	Aset Tetap (nilai wajar)
Kr.	Modal disetor

b. Tambahan Modal Disetor

DSM – Ekuitas

a) Pada saat DSM - liabilitas telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, dicatat dalam jurnal:

Db.	DSM –Liabilitas
Kr.	DSM - Ekuitas

b) Pada saat DSM – Ekuitas telah memenuhi persyaratan modal disetor, dicatat dalam jurnal:

Db.	DSM – Ekuitas
Kr.	Modal Disetor

20.6 CONTOH KASUS

a. Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR “XYZ” melakukan setoran modal sebesar Rp100.000.000.000. Modal tersebut disetor dengan penyerahan aset (*inbren*g) dengan nilai wajar Rp25.000.000.000 dan sisanya dengan kas. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening BPR	Rp75.000.000.000
Db.	Aser Tetap	Rp25.000.000.000
Kr.	Modal – dana setoran modal	Rp100.000.000.000
	Jika dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan, dicatat dalam jurnal:	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Modal – dana setoran modal	Rp100.000.000.000
Kr.	Modal Disetor	Rp100.000.000.000

b. BPR “ABC” adalah bank yang baru dibentuk dengan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000, yang terdiri dari 2.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000. Sebanyak 50% dari modal dasar tersebut sudah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening BPR	Rp12.500.000.000
Kr.	Modal – dana setoran modal (2.500.000x50%xRp10.000)	Rp12.500.000.000
	Jika dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai peraturan perundang-undangan dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal – dana setoran modal	Rp12.500.000.000
Kr.	Modal Disetor	Rp12.500.000.000

Setelah berjalan selama 2 tahun, BPR berencana untuk menambah modal dengan melepas sisa dari lembar saham (1.250.000 lembar) dengan harga Rp12.000 per lembar. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening BPR (1.250.000x Rp12.000)	Rp15.000.000.000
Kr.	Modal disetor*)	Rp12.500.000.000
Kr.	Agio saham) asumsi telah memenuhi persyaratan permodalan	Rp2.500.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXI
SALDO LABA

21.1 DEFINISI

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

21.2 DASAR PENGATURAN DAN PENJELASAN

- a. Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:
 - 1) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
 - 2) Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
 - 3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - b) laba tahun berjalan.
- b. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

21.3 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
- b. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. Pembagian dividen dalam bentuk:
 - 1) tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
 - 2) aset non-kas diakui sebesar nilai wajar aset tersebut.
 - 3) saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan dengan selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai agio.
- c. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan.

Penyajian

Saldo laba disajikan tersendiri pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

21.4 ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ikhtisar laba rugi
Kr.	Saldo laba

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

b. Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Ikhtisar laba rugi

c. Pembagian dividen tunai	
Pada saat diumumkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Liabilitas segera – utang dividen
Pada saat dibayar, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas segera – utang dividen
Kr.	Kas/Rekening

d. Pada saat pembagian dividen saham, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Modal disetor
Kr.	Agio saham

e. Pada saat pembentukan cadangan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Cadangan tujuan
Kr.	Cadangan umum

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXII

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

22.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

22.1.1 DEFINISI

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR.

22.1.2 PENJELASAN

- a. Pendapatan operasional terdiri dari:
 - 1) pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan
 - 2) pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.
- b. Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berasal dari surat berharga yang dimiliki, penempatan pada bank lain, serta kredit yang diberikan. Pendapatan ini meliputi antara lain:
 - 1) pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
 - 2) provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan;
 - 3) biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan
 - 4) koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.
- c. Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:
 - 1) pendapatan jasa transaksi (seperti *payment point* dan ATM);
 - 2) keuntungan dari penjualan valuta asing;
 - 3) keuntungan penjualan surat berharga;
 - 4) penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
 - 5) pemulihan CKPN aset keuangan;
 - 6) dividen;
 - 7) keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*;
 - 8) keuntungan penjualan AYDA;
 - 9) pendapatan ganti rugi asuransi; dan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

10) pemulihan penurunan nilai AYDA.

22.1.3 PERLAKUAN AKUNTANSI
Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada umumnya, BPR mengakui pendapatan operasional jika memenuhi kriteria probabilitas manfaat ekonomik di masa depan dan keandalan pengukuran.
- b. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan
 - 1) BPR mengukur kredit yang diberikan dengan biaya perolehan diamortisasi. BPR mengakui total penghasilan bunga dengan metode suku bunga efektif.
 - 2) Metode perhitungan suku bunga efektif berdampak pada perhitungan provisi dan biaya transaksi: provisi dan biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit, namun tidak secara garis lurus.
 - 3) Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.
 - 4) Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.
 - 5) Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk *performing* atau *non-performing*. Pada saat kredit *non-performing*, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi dan biaya transaksi.
 - 6) Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.
- c. Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Penyajian

- a. Pendapatan operasional dibagi menjadi 2, yaitu:
 - 1) pendapatan bunga; dan
 - 2) pendapatan lainnya.
- b. Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) disajikan antara lain bunga kontraktual, provisi, biaya transaksi, dan koreksi atas pendapatan bunga.
- c. Pendapatan operasional lainnya disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

22.1.4 ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat pengakuan pendapatan bunga, BPR melakukan amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)
Db./Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Pendapatan bunga

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Pada saat debitor menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa BPR tidak dapat menerima Kembali pendapatan tersebut maka BPR melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.
b. Pada saat pengakuan pendapatan bunga dari amortisasi biaya transaksi dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Pendapatan bunga – biaya transaksi (laporan Laba Rugi) Kredit yang diberikan/Surat berharga (Laporan Posisi Keuangan)
c. Pada saat pengakuan pendapatan bunga dari amortisasi provisi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kredit yang diberikan/Surat berharga (Laporan Posisi Keuangan) Pendapatan bunga – Biaya transaksi (Laporan Laba Rugi)
d. Pada saat menerima setoran dari debitor dicatat dalam jurnal:	
Db. Db./Kr. Db./Kr.	Kas/Rekening Pendapatan bunga yang akan diterima Kredit yang diberikan

22.1.5 CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR ASA memberikan kredit kepada debitor “ADM” dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Plafon Kredit	Rp100.000.000
Jangka Waktu	2 tahun atau 24 bulan
Jenis Kredit	Investasi untuk pembelian mesin
Bunga	15% per tahun atau 1,25% per bulan
Provisi	0,1% atau Rp100.000
Jadwal Angsuran	Rp25.000.000 per semester
Beban BPR yang Dapat Diatribusikan	Rp20.000
Fee pengelolaan rekening	Rp20

BPR Menyusun tabel amortisasi sebagi berikut:

No Trans	Periode	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
	a	b	c = h (-1)	d=c*EIR	e	f = pokok * SBK	g = d - h	h
	01/01/2025	-Rp99.920.000	-					Rp99.920.000
1	31/01/2025	1.250.000	Rp99.920.000	1.254.982	-	1.250.000	4.982	Rp99.924.982
2	28/02/2025	1.250.000	Rp99.924.982	1.255.045	-	1.250.000	5.045	Rp99.930.027
3	31/03/2025	1.250.000	Rp99.930.027	1.255.108	-	1.250.000	5.108	Rp99.935.135
4	30/04/2025	1.250.000	Rp99.935.135	1.255.172	-	1.250.000	5.172	Rp99.940.307
5	31/05/2025	1.250.000	Rp99.940.307	1.255.237	-	1.250.000	5.237	Rp99.945.544
6	30/06/2025	26.250.000	Rp99.945.544	1.255.303	25.000.000	1.250.000	5.303	Rp74.950.847
7	31/07/2025	937.500	Rp74.950.847	941.373	-	937.500	3.873	Rp74.954.720
8	31/08/2025	937.500	Rp74.954.720	941.421	-	937.500	3.921	Rp74.958.641
9	30/09/2025	937.500	Rp74.958.641	941.471	-	937.500	3.971	Rp74.962.612
10	31/10/2025	937.500	Rp74.962.612	941.521	-	937.500	4.021	Rp74.966.632
11	30/11/2025	937.500	Rp74.966.632	941.571	-	937.500	4.071	Rp74.970.703
12	31/12/2025	25.937.500	Rp74.970.703	941.622	25.000.000	937.500	4.122	Rp49.974.825
13	31/01/2026	625.000	Rp49.974.825	627.677		625.000	2.677	Rp49.977.503
14	28/02/2026	625.000	Rp49.977.503	627.711		625.000	2.711	Rp49.980.213
15	31/03/2026	625.000	Rp49.980.213	627.745		625.000	2.745	Rp49.982.958
16	30/04/2026	625.000	Rp49.982.958	627.779		625.000	2.779	Rp49.985.738
17	31/05/2026	625.000	Rp49.985.738	627.814		625.000	2.814	Rp49.988.552
18	30/06/2026	25.625.000	Rp49.988.552	627.850	25.000.000	625.000	2.850	Rp24.991.402
19	31/07/2026	312.500	Rp24.991.402	313.889		312.500	1.389	Rp24.992.790
20	31/08/2026	312.500	Rp24.992.790	313.906		312.500	1.406	Rp24.994.197
21	30/09/2026	312.500	Rp24.994.197	313.924		312.500	1.424	Rp24.995.620
22	31/10/2026	312.500	Rp24.995.620	313.942		312.500	1.442	Rp24.997.062
23	30/11/2026	312.500	Rp24.997.062	313.960		312.500	1.460	Rp24.998.522
24	31/12/2026	25.312.500	Rp24.998.522	313.978	25.000.000	312.500	1.478	-Rp0

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat pengakuan pendapatan bunga tanggal 31 Januari 2025, BPR melakukan pembebanan tagihan bunga kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)	Rp1.250.000
Db.	Kredit yang diberikan	Rp4.982
Kr.	Pendapatan bunga)	Rp1.254.982
b. Pada saat menerima setoran dari debitur dicatat dalam jurnal: Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa data		
Db.	Kas/Rekening	Rp1.250.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp1.250.000
Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening	Rp25.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp25.000.000

22.2 BEBAN OPERASIONAL

22.2.1 DEFINISI

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

22.2.2 PENJELASAN

- a. Beban operasional dirinci menjadi:
- 1) beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban nonoperasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;
 - 2) beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;
 - 3) beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit yang diberikan;
 - 4) beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;
- 5) beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset takberwujud;
 - 6) beban administrasi dan umum, termasuk beban tenaga kerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset takberwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;
 - 7) beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan *equity method*, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.
- b. Beban bunga terdiri atas:
- 1) beban bunga kontraktual, yaitu berdasarkan perjanjian antara BPR dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank dalam antara lain tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima.
 - 2) biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan BPR untuk memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank, antara lain *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah. Beban operasional lainnya adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian dari penyertaan *equity method* kerugian akibat penjualan SBI.
- Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga. Apabila BPR mengamortisasi pendapatan dan biaya transaksi secara satu kesatuan dengan pendapatan bunga berdasarkan suku bunga efektif, maka BPR menyajikan gabungan pendapatan tersebut dalam beban bunga kontraktual.
- c. Beban administrasi umum memiliki karakteristik:
- 1) tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan;
 - 2) tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang;
 - 3) diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
- Beban administrasi terdiri atas beban tenaga kerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa operasi, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset takberwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan & perbaikan, beban barang & jasa, beban

penyelenggaraan teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak.

22.2.3 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR mengakui beban operasional jika kemungkinan besar arus kas keluar atau penurunan manfaat ekonomik akan terjadi dan pengukurannya dapat diandalkan.
- b. Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.
- c. Beban bunga:
 - 1) Beban bunga dikenakan antara lain atas beban bunga kontraktual dari tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima.
 - 2) BPR mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan biaya-biaya perolehan liabilitas yang tidak dapat diatribusikan secara langsung, sebagai contoh hadiah undian dan *merchandise* dengan nilai tidak material.
 - 3) Amortisasi atas beban perolehan liabilitas dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat liabilitas (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai liabilitas yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Periode amortisasi adalah sepanjang umur kontrak.
- d. Beban kerugian penurunan nilai:
 - 1) pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif.
 - 2) Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.
- e. Beban - beban lain
Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Penyajian

- a. Beban operasional disajikan dalam pos terpisah pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- b. Beban bunga dan beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional BPR yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

22.2.4 ILUSTRASI JURNAL

a.	Beban bunga
a. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan, apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga – biaya transaksi
Kr.	Kas/Rekening bank
b. Pengakuan beban bunga tabungan/deposito/pinjaman yang diterima, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga –tabungan/deposito/pinjaman
Kr.	Utang bunga – tabungan/deposito/pinjaman
c. Amortisasi biaya transaksi yang diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Tabungan/Deposito-biaya perolehan diamortisasi
d. Pembayaran bunga tabungan/deposito/pinjaman yang diterima, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang bunga - tabungan/deposito
Kr.	Kas/Rekening nasabah
Kr.	Liabilitas segera – Pajak penghasilan
b.	Beban kerugian penurunan nilai;
Pada saat penurunan nilai, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban CKPN
Kr.	CKPN
c.	Beban pemasaran;
Pada saat BPR mengakui beban pemasaran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban pemasaran
Kr.	Kas/Rekening
d.	Beban penelitian dan pengembangan;
1) Pada saat pengeluaran biaya penelitian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban penelitian dan pengembangan
Kr.	Kas/Rekening
	Pengeluaran aktivitas penelitian dan pengembangan yang dapat diakui sebagai beban contohnya pengeluaran sehubungan dengan aktivitas perintisan yang mencakup pengeluaran dalam rangka memulai operasi baru atau meluncurkan produk baru.
e.	Beban administrasi dan umum
Pada saat BPR mengakui beban administrasi dan umum, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban administrasi dan umum
Kr.	Kas/Rekening
f.	Beban lainnya
1) BPR mengakui beban penjaminan simpanan, pada saat pembayaran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Biaya premi penjaminan dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening Bank
2) Pada saat BPR mengakui amortisasi penjaminan simpanan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga – Biaya lainnya
Kr.	Biaya premi penjaminan dibayar dimuka

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

22.2.5 CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2025, seorang nasabah membuka deposito dengan nominal Rp20.000.000 (jangka waktu 1 bulan, suku bunga 6% per tahun) di BPR ASA. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp10.000. Pada tanggal 1 Februari 2025, deposito jatuh tempo dan nasabah mencairkan deposito tersebut suku bunga pada saat itu adalah 5,5% per tahun. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat nasabah membuka rekening deposito, BPR melakukan pengakuan atas beban bunga setiap hari, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp3.288
Kr.	Utang bunga deposito	Rp3.288
b. Pembayaran bunga deposito, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp98.640
Kr.	Kas/Rekening nasabah	Rp78.912
Kr.	Liabilitas segera-pajak penghasilan	Rp19.728
	(Pajak = 20% x Rp98.640 = Rp19.728, tarif pajak mengikuti ketentuan yang berlaku)	

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXIII

PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL

23.1 PENDAPATAN NONOPERASIONAL

23.1.1 DEFINISI

Pendapatan Nonoperasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

23.1.2 PENJELASAN

Pendapatan nonoperasional terdiri dari:

- a. keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR. Akun ini juga termasuk hasil suatu eksekusi atau penjualan atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA);
- b. pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Pada pos ini termasuk pemulihan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA);
- c. bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor. Pelaporan pendapatan bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).;
- d. selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- e. pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

23.1.3 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pendapatan nonoperasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.
- b. BPR mengakui pendapatan nonoperasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.
- c. Pemulihan penurunan nilai aset nonkeuangan
Ketika keadaan yang sebelumnya menyebabkan penurunan nilai aset keuangan tidak ada lagi atau ketika terdapat bukti yang jelas tentang kenaikan dari harga jual dikurangi biaya menjual karena perubahan kondisi ekonomik, maka BPR membalik jumlah penurunan nilai (yaitu, pembalikan terbatas pada jumlah awal sebelum kerugian penurunan nilai) sehingga jumlah tercatat baru adalah mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- d. Pendapatan ganti rugi asuransi
Diakui jika kondisi debitur *default* dan BPR melakukan klaim kepada perusahaan asuransi dan mendapatkan kepastian bahwa klaim akan dibayar.
- e. Bunga antar kantor merupakan pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor. Pelaporan pendapatan bunga antar kantor untuk kebutuhan laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).
- f. Selisih kurs
 - 1) Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.
 - 2) Pada akhir setiap periode laporan:
 - a) pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup;
 - b) pos-pos nonmoneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan
 - c) pos-pos nonmoneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan.
- g. pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah di hapus tagih

Penyajian

Pendapatan nonoperasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

23.1.4 ILUSTRASI JURNAL

a. Pada umumnya pendapatan nonoperasional, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Pendapatan nonoperasional yang terkait
b. Khusus untuk keadaan penghentian pengakuan aset keuangan dan jika terdapat AYDA yang dijual, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	AYDA
Db./Kr.	Pendapatan (beban) nonoperasional – Keuntungan (kerugian) penjualan
c. Pada saat BPR menerima klaim dari Perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Pendapatan ganti rugi asuransi

23.1.5 CONTOH KASUS

Pada tanggal 31 Januari 2025, BPR ASA mendapatkan keuntungan penjualan AYDA sebesar Rp10.000.000 atas penjualan AYDA yang semula bernilai Rp100.000.000.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Db.	Kas/Rekening	Rp110.000.000
Kr.	AYDA	Rp100.000.000
Kr.		Rp10.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

	Pendapatan nonoperasional – Keuntungan penjualan	
--	---	--

23.2 BEBAN NONOPERASIONAL

23.2.1 DEFINISI

Beban nonoperasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

23.2.2 PENJELASAN

Beban nonoperasional dirinci menjadi:

- a. kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR, termasuk penjualan atau kehilangan agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA);
- b. kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR, termasuk pada pos ini yaitu penurunan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA);
- c. bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antarkantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*);
- d. selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- e. beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

23.2.3 PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR mengakui beban nonoperasional jika memenuhi kriteria probabilitas manfaat ekonomik di masa depan dan keandalan pengukuran.
- b. Beban nonoperasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
- c. Pendapatan nonoperasional diakui secara akrual yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.
- d. Kerugian penjualan/kehilangan
 - 1) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dan inventaris harus diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional.
 - 2) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap dan inventaris harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.
- e. Kerugian penurunan nilai aset nonkeuangan
 - 1) BPR menilai setiap tanggap pelaporan apakah terdapat penurunan nilai atas aset nonkeuangan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 2) BPR membandingkan jumlah tercatat setiap item persediaan dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.
- f. Selisih kurs
 - 1) Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.
 - 2) Pada akhir setiap periode laporan:
 - a) pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup;
 - b) pos-pos nonmoneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan
 - c) pos-pos nonmoneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan.

Penyajian

Beban nonoperasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba-rugi.

23.2.4 ILUSTRASI JURNAL

Db.	Beban nonoperasional yang terkait
Kr.	Kas/Rekening

23.2.5 CONTOH KASUS

Pada tanggal 31 Januari 2025, BPR “ASA” mendapatkan kerugian penjualan AYDA sebesar Rp10.000.000 atas penjualan AYDA yang semula bernilai Rp100.000.000.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Db.	Kas/Rekening	Rp90.000.000
Kr.	Beban nonoperasional – Kerugian	Rp10.000.000
Kr.	penjualan AYDA	Rp100.000.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXIV

BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK TANGGUHAN

24.1 DEFINISI

- a. Beban pajak penghasilan adalah jumlah dari pajak kini terutang dan pajak tangguhan.
- b. Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)
- c. Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

24.2 DASAR PENGATURAN

- a. Pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak, termasuk pajak yang dipotong (atas distribusi kepada BPR pelapor) yang terutang oleh BPR anak, BPR asosiasi atau ventura bersama).
- b. BPR harus mengakui konsekuensi pajak kini dan masa depan atas transaksi dan peristiwa lain yang diakui dalam laporan keuangan. Jumlah pajak yang diakui terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1 dan 29.2)

24.3 PENJELASAN

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.
- b. Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.
- c. Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)
- d. Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.
- e. Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Penyajian

- a. Beban pajak penghasilan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan laba rugi.
- b. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus pada jumlah neto.

24.4 ILUSTRASI JURNAL

- a. Pada saat pembayaran angsuran pajak:

Db.	Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening
- b. Pada saat akhir tanggal pelaporan:
 - 1) Apabila pajak dibayar dimuka lebih besar daripada pajak terutang

Db.	Beban pajak
Kr.	Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka
 - 2) Apabila pajak dibayar dimuka lebih kecil daripada pajak terutang

Db.	Beban pajak
Kr.	Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka
Kr.	Utang pajak

24.5 CONTOH KASUS

- a. PT BPR ABC merupakan wajib pajak bank. Informasi akumulasi laba (rugi) dan angsuran pajak berdasarkan laporan keuangan bulanan tahun 2023 sebagai berikut:

Ket.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Laba sebelum pajak	20.000.000	55.000.000	95.000.000	150.000.000	210.000.000	275.000.000
PPH Terutang (25%)	5.000.000	13.750.000	23.750.000	37.500.000	52.500.000	68.750.000
PPH Pasal 22 (angsuran) sejak awal tahun	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	60.000.000
Angsuran PPH Pasal 25 yang masih harus dibayar (PPH terutang – Angsuran PPH Pasal 22 sejak awal tahun)	0	3.750.000	3.750.000	7.500.000	2.500.000	8.750.000

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Pada saat mengakui beban pajak setiap akhir bulan:		
Db.	Beban pajak	Rp5.000.000
Kr.	Hutang pajak (Tarif apajak 25% x laba setiap bulan. untuk bulan Februari dan seterusnya jurnal sama dengan nilai sesuai angsuran pajak)	Rp5.000.000
2) Pada saat pembayaran angsuran pajak (untuk bulan Januari) dan seterusnya:		
Db.	Aset lain-lain – Pajak Dibayar Dimuka	Rp5.000.000
Kr.	Kas/Rekening (untuk bulan Februari dan seterusnya jurnal sama dengan nilai sesuai angsuran pajak)	Rp5.000.000
3) Pada saat akhir tanggal pelaporan (asumsi bulan Juni)		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Hutang pajak	Rp68.750.000
Kr.	Aset pajak tangguhan	Rp60.000.000
Kr.	Kas-Rekening	Rp8.750.000

- b. Pada tahun 2026 BPR “XYZ” membeli satu *unit* komputer senilai Rp10.000.000. Adapun menurut akuntansi nilai komputer didepresiasi selama lima tahun tanpa nilai sisa (depresiasi dilakukan dengan metode garis lurus), sedangkan untuk tujuan pajak komputer termasuk kelompok 1 yang didepresiasi selama empat tahun. Adapun data pendapatan dan beban selama lima tahun ke depan sebagaimana terlihat pada table dibawah. Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi sebagai berikut (dalam ribuan):

- 1) Depresiasi menurut akuntansi yaitu sebesar $Rp10.000/5 = Rp2.000$

	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600
Beban operasi	700.000	770.000	847.000	931.700	1.024.870
Beban penyusutan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total beban	702.000	772.000	849.000	933.700	1.026.870
Laba sebelum pajak	298.000	428.000	591.000	794.300	1.046.730
Beban pajak	74.500	107.000	147.750	198.575	261.683
Laba setelah pajak	223.500	321.000	443.250	595.725	785.048

- 2) Depresiasi menurut pajak yaitu sebesar $Rp10.000/4 = Rp2.500$

	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600
Beban operasi	700.000	770.000	847.000	931.700	1.024.870
Beban penyusutan	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Total beban	702.500	772.500	849.500	934.200	1.024.870
Penghasilan kena pajak	297.500	427.500	590.500	793.800	1.048.730
Pajak terutang	74.375	106.875	147.625	198.450	262.183

- 3) Ilustrasi gabungan beban pajak menurut akuntansi dan pajak terutang menurut pajak

	2026	2027	2028	2029	2030
AKUNTANSI					
Laba sebelum pajak	298.000	428.000	591.000	794.300	1.046.730
Beban pajak	74.500	107.000	147.750	198.575	261.683
PAJAK					
Penghasilan kena pajak	297.500	427.500	590.500	793.800	1.048.730
Pajak terutang	74.375	106.875	147.625	198.450	262.183
PERBEDAAN					
Perbedaan laba	500	500	500	500	(2.000)
Perbedaan pajak	125	125	125	125	(500)
Liabilitas pajak tangguhan	125	250	375	500	0
BEBAN PAJAK (L/R)					
Beban pajak kini	74.375	106.875	147.625	198.450	262.183
Beban pajak tangguhan	125	125	125	125	(500)
Total beban pajak	74.500	107.000	147.750	198.575	261.683

Jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut (dalam ribuan):

- 1) Jurnal periode 2026-2029 sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Db.	Beban pajak tangguhan	Rp125
Kr.	Liabilitas pajak tangguhan	Rp125
2) Jurnal pada saat 2030 sebagai berikut:		
Db.	Liabilitas pajak tangguhan	Rp500
Kr.	Beban pajak tangguhan	Rp500

Pada awal tahun 2030, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar Rp500.
Pada akhir tahun 2030, setelah depresiasi dicatat, perbedaan menjadi tidak ada, sehingga nilai liabilitas pajak tangguhan sebesar 0.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXV

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

25.1. DEFINISI

Penghasilan komprehensif lain adalah *item* penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

25.2. PENJELASAN

- a. Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab 5 Paragraf 5.4 (b).
- b. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi.
- c. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXVI

LAPORAN ARUS KAS

26.1. PENDAHULUAN

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)
- b. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - 1) penerimaan kas dari penyediaan jasa, *fee*, komisi, dan pendapatan lainnya;
 - 2) pembayaran kas ke karyawan atau pajak penghasilan; dan
 - 3) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.4)
- c. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
 - 1) pembayaran kas untuk memperoleh atau penerimaan kas dari penjualan aset tetap dan inventaris, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
 - 2) pembayaran kas untuk memperoleh atau penerimaan kas dari penjualan instrumen ekuitas atau instrumen utang BPR lain;
 - 3) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; dan
 - 4) penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.5)
- d. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain dan dari pinjaman (pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lain);
 - 2) pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham BPR; dan
 - 3) pelunasan pinjaman.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.6)
- e. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.
- f. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Sebagai contoh, penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.2)

26.2. DASAR PENGATURAN

- a. BPR menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.3)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)
- c. Dalam metode langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi disajikan dengan mengungkapkan informasi mengenai kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Informasi tersebut dapat diperoleh dari:
 - 1) catatan akuntansi BPR; atau
 - 2) dengan menyesuaikan penjualan, beban penjualan dan pos lainnya dalam laporan laba rugi untuk:
 - a) perubahan dalam persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode;
 - b) pos nonkas lain; dan
 - c) seluruh pos lain yang berdampak pada arus kas investasi atau arus kas pendanaan.(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.9)
- d. BPR menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas agregat yang timbul dari akuisisi dan pelepasan BPR anak atau unit bisnis lainnya disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.10)
- e. Bunga dan Dividen
 - 1) BPR menyajikan arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan yang dibayarkan secara terpisah. BPR mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.14)
 - 2) BPR mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.15)
 - 3) BPR mengklasifikasikan dividen yang dibayarkan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen tersebut dibayarkan dari arus kas operasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.16)
- f. BPR menyajikan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka BPR mengungkapkan total jumlah pajak yang dibayarkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.17)
- g. BPR menyajikan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos ekuivalen yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi, BPR tidak disyaratkan untuk menyajikan rekonsiliasi ini jika jumlah kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan arus kas identik dengan jumlah dalam laporan posisi keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.20)
- h. BPR mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah saldo kas dan setara kas signifikan yang dimiliki oleh BPR namun tidak dapat digunakan BPR antara lain karena

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

adanya pembatasan hukum. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.21)

26.3. PENJELASAN

- a. Kas terdiri atas:
 - 1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
 - 2) rekening giro pada bank lain;
 - 3) tabungan pada bank atau BPR lain.
- b. Setara kas, antara lain:
 - 1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan pengguna laporan mengevaluasi perubahan dalam aset neto BPR, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
- d. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan bisnis BPR tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BPR serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.
- e. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.
- f. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, pelunasan pinjaman oleh BPR meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
- g. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BPR dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi BPR, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai arus kas historis bersama dengan informasi lain dapat berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.
- h. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BPR. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas BPR yang berasal dari aktivitas operasi adalah:
 - 1) pemberian dan pelunasan kredit;
 - 2) penerimaan dan pembayaran simpanan;
 - 3) penempatan dan penarikan deposito pada bank lain;
 - 4) penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diterima dari bank umum, BPR dan pihak lain.
- i. Arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari surat berharga diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kategori surat berharga dalam laporan arus kas.
- j. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas BPR yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
- 1) pembayaran kas untuk membeli surat berharga;
 - 2) pembayaran kas untuk membeli aset tetap dan inventaris;
 - 3) penerimaan kas dari penjualan surat berharga;
 - 4) penerimaan kas dari penjualan aset tetap dan inventaris.
- k. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal BPR. Beberapa contoh arus kas BPR yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
- 1) penerimaan dari emisi saham baru;
 - 2) penerimaan dan pembayaran pinjaman dari Bank Indonesia;
 - 3) penerimaan dan pembayaran pinjaman diterima dari bank umum, BPR dan pihak lain yang digunakan selain aktivitas operasi;
 - 4) penerimaan dan pembayaran pinjaman subordinasi.

26.4. ILUSTRASI LAPORAN ARUS KAS

Ilustrasi laporan arus kas sebagai berikut:

Metode Langsung	2026	2025
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	xxx	yyy
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	xxx	yyy
Penerimaan klaim asuransi	xxx	yyy
Pembayaran beban klaim asuransi		
Pembayaran beban bunga	xxx	yyy
Pendapatan operasional lainnya	xxx	yyy
Beban operasional lainnya	xxx	yyy
Beban gaji dan tunjangan	xxx	yyy
Beban umum dan administrasi	xxx	yyy
Pembayaran dividen		
Pendapatan nonoperasional	xxx	yyy
Pembayaran pajak penghasilan badan	xxx	yyy
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Penempatan pada bank lain	xxx	yyy
Kredit yang diberikan	xxx	yyy
Aset yang diambil alih	xxx	yyy
Aset lain-lain	xxx	yyy
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	xxx	yyy
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	xxx	yyy
Tabungan	xxx	yyy
Deposito	xxx	yyy
Simpanan dari bank lain	xxx	yyy

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Pinjaman yang diterima	xxx	yyy
Liabilitas imbalan kerja	xxx	yyy
Liabilitas lain-lain	xxx	yyy
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional	xxx	yyy
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	xxx	yyy
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	xxx	yyy
Pembelian/penjualan surat berharga	xxx	yyy
Pembelian/penjualan penyertaan modal	xxx	yyy
Penyesuaian lainnya	xxx	yyy
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	xxx	yyy
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi	xxx	yyy
Penerimaan/pembayaran modal pinjaman	xxx	yyy
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	xxx	yyy
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxx	yyy
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	xxx	yyy
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	xxx	yyy

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXVII

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

27.1. PENDAHULUAN

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, *item* penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

27.1. DASAR PENGATURAN

BPR menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. total penghasilan komprehensif untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik BPR induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b. untuk setiap komponen ekuitas, dampak dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan Bab 10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan; dan
- c. untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - 1) laba rugi;
 - 2) penghasilan komprehensif lain;
 - 3) jumlah investasi oleh, dan dividen serta distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, menampilkan secara terpisah penerbitan saham, transaksi saham treasury, dividen dan distribusi lain kepada pemilik dan perubahan dalam bagian kepemilikan pada BPR anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 6.3)

27.3. PENJELASAN

- a. Perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan.
- c. Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi:
 - 1) modal saham, misalnya penambahan modal saham;
 - 2) laba/rugi yang belum direalisasi dalam surat berharga;
 - 3) surplus revaluasi aset tetap;
 - 4) dana setoran modal - ekuitas;
 - 5) saldo laba (laba ditahan).

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

BAB XXVIII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

28.1. PENDAHULUAN

- a. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- b. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Dalam PA BPR ini diatur hal-hal yang harus diungkapkan mencakup namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
- d. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - 2) Informasi yang diwajibkan dalam SAK EP tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;
 - 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - 4) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;
 - 5) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan kredit, simpanan, pendapatan, dan beban harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- f. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan BPR lain maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
 - 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

28.2. DASAR PENGATURAN

- a. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu BPR. Penyajian wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam SAK EP Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK EP, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BPR.
Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EP tidak cukup bagi pengguna untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.2)
- b. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen BPR yang menggunakan SAK EP membuat penilaian atas kemampuan BPR melanjutkan kelangsungan usaha. BPR mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi BPR tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis lain selain melakukan hal tersebut. Dalam menilai apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas dari tanggal pelaporan. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari adanya ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan BPR untuk melanjutkan kelangsungan usaha, maka BPR harus mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan mengungkapkan alasan mengapa BPR tidak dipertimbangkan sebagai BPR yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.8 dan 3.9)
- c. BPR mengungkapkan informasi komparatif terkait dengan periode komparatif sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan berbeda oleh SAK EP. BPR memasukkan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika relevan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.14)
- d. BPR harus mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta membedakannya dari informasi lain dalam dokumen yang sama. Selain itu, BPR menyajikan informasi berikut ini secara jelas dan mengulangnya jika dibutuhkan untuk memahami informasi yang disajikan:
 - 1) nama BPR pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;
 - 2) apakah laporan keuangan mencakup BPR individual atau suatu kelompok BPR;
 - 3) tanggal akhir periode pelaporan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan;
 - 4) mata uang penyajian, seperti didefinisikan dalam Bab 30 Penjabaran Valuta Asing; dan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 5) level pembulatan, jika ada, yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 3.23)
- e. BPR mengungkapkan baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos yang disajikan berikut:
 - 1) aset tetap dan inventaris dalam klasifikasi yang sesuai untuk BPR;
 - 2) piutang usaha dan piutang lainnya yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang jatuh tempo dari pihak berelasi, jumlah yang jatuh tempo dari pihak lainnya dan piutang yang timbul dari akrual penghasilan yang belum ditagih;
 - 3) persediaan, menunjukkan secara terpisah jumlah persediaan:
 - a) yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal
 - b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; dan
 - c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau penyediaan jasa;
 - 4) utang usaha dan utang lainnya, menunjukkan secara terpisah jumlah utang usaha ke pemasok, utang ke pihak berelasi, penghasilan ditangguhkan dan akrual;
 - 5) provisi untuk imbalan kerja dan provisi lainnya;
 - 6) kelas ekuitas, seperti modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang sebagaimana disyaratkan oleh SAK EP, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan secara tersendiri dalam ekuitas. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 4.11)
- f. BPR dengan modal saham mengungkapkan hal-hal berikut, baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan:
 - 1) Untuk setiap kelompok modal saham:
 - a) jumlah saham modal dasar;
 - b) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - c) nilai nominal saham, atau bahwa saham tidak memiliki nilai nominal;
 - d) rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Rekonsiliasi ini tidak perlu disajikan untuk periode sebelumnya;
 - e) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas distribusi dividen dan pembayaran kembali atas modal;
 - f) saham BPR yang dimiliki oleh BPR atau oleh BPR anak atau BPR asosiasi;
 - g) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk syarat dan jumlah.
 - 2) Deskripsi mengenai cadangan dalam ekuitas. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 4.12)
- g. Akuntansi untuk ekuitas BPR bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan.
- h. BPR tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain maupun dalam catatan atas laporan keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 5.10)
- i. Catatan atas laporan keuangan harus:

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 – 8.7 dalam SAK EP;
 - 2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK EP yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
 - 3) menyediakan informasi tambahan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- j. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 8.3)
- k. Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:
- 1) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 8.5)
1. BPR mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi tentang asumsi utama yang berkaitan dengan masa depan, dan sumber utama lainnya tentang ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan, yang mempunyai risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian yang bersifat material pada jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus mencakup rincian atas:
- 1) sifat; dan
 - 2) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 8.7)

28.3. PENJELASAN

- a. SAK EP dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. SAK EP mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka BPR harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
- b. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal laporan posisi keuangan sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.
- c. Terdapat suatu keadaan ketika reklasifikasi guna menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.

- d. Dalam keadaan sangat luar biasa, BPR mungkin terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal laporan posisi keuangan. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan keuangan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan.
- e. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di laporan posisi keuangan atau di catatan atas laporan keuangan, bergantung pada persyaratan dari SAK EP dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
 - 1) sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - 2) fungsi pos-pos tersebut;
 - 3) jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- f. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
- g. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan BPR lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
 - 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan.Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.
- h. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pengakuan pendapatan bunga;
 - 2) pengakuan agunan yang diambil alih;

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 3) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud;
- 4) sewa;
- 5) pajak;
- 6) penyisihan;
- 7) imbalan kerja;
- 8) definisi kas dan setara kas.

28.4. UNSUR-UNSUR

a. Gambaran Umum BPR

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Pendirian.
- 2) Riwayat ringkas.
- 3) Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (d.h. Departemen Kehakiman) dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan.
- 4) Bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan.
- 5) Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha.
- 6) Tanggal mulai beroperasi. Apabila BPR melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, maka harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas usaha.
- 7) Kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan.
- 8) Direksi, komisaris dan karyawan
 - a) Nama anggota direksi dan dewan komisaris;
 - b) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan bahwa BPR menggunakan SAK EP.
- 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar.
 - b) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - c) Kebijakan akuntansi tertentu.
- 3) Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a) Konsep dasar pengukuran;
 - b) Kredit yang diberikan;
 - c) Penyisihan kerugian kredit;
 - d) Investasi di Sertifikat Bank Indonesia;
 - e) Agunan yang diambil alih;
 - f) Kas dan setara kas;
 - g) Aset tetap dan inventaris serta penyusutan;
 - h) Pengakuan pendapatan bunga;
 - i) Pengakuan beban bunga;
 - j) Pajak penghasilan;
 - k) Imbalan kerja.

c. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:

- 1) Transaksi hubungan istimewa
 - a) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan, dan beban;
 - b) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut;
 - c) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa;
 - d) Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa;
 - e) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
- 2) Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan
 - a) Perubahan estimasi akuntansi
 - (1) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 - (2) Jumlah perubahan estimasi yang memengaruhi periode berjalan;
 - (3) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Apabila penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan.
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi
 - (1) Hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
 - (2) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
 - (3) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif;
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
 - c) Kesalahan
 - (1) Hakikat kesalahan;
 - (2) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
 - (3) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif;
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- 3) Komitmen dan kontinjensi
 - a) Pengungkapan komitmen

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- (1) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian kredit dan pinjaman:
 - (a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - (b) Periode berlakunya komitmen;
 - (c) Nilai keseluruhan dan bagian yang telah direalisasi;
 - (d) Sanksi-sanksi.
- (2) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasanbatasan.
- b) Pengungkapan kontinjensi
 - (1) Untuk perkara/sengketa hukum:
 - (a) Pihak-pihak yang terkait;
 - (b) Jumlah yang diperkarakan;
 - (c) Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum;
 - (d) Probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
 - (2) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.
 - (3) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan
 - (a) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahunpajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya;
 - (b) Sikap BPR terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberatan, banding dan sebagainya.
- 4) Informasi penting lainnya
Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang memengaruhi kinerja BPR, seperti peristiwa atau keadaan yang memengaruhi kelangsungan hidupnya.
- 5) Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan.
- 6) Perkembangan terakhir SAK EP dan peraturan lainnya
 - a) Penjelasan mengenai SAK EP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan memengaruhi aktivitas BPR;
 - b) Estimasi dampak penerapan SAK EP dan peraturan baru tersebut.
- 7) Reklasifikasi
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

28.5. PENGUNGKAPAN

BPR mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain hal-hal berikut:

- a. Aset
 - 1) Kas
Rincian jumlah kas antara kas besar, kas kecil, dan kas dalam ATM.
 - 2) Kas dalam valuta asing
 - a) Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
 - b) Rincian nominal kas berdasarkan jenis valuta asing.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c) Jumlah selisih kurs pada akhir periode yang diakui dalam laporan laba rugi.
- d) Jumlah selisih kurs yang timbul selama periode dan diklasifikasikan dalam komponen terpisah ekuitas pada akhir periode.
- 3) Surat berharga
 - a) Jenis surat berharga.
 - b) Informasi surat berharga antara lain mencakup informasi penerbit surat berharga, peringkat surat berharga, Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat, dan jatuh tempo surat berharga.
 - c) Kualitas surat berharga.
- 4) Penempatan pada bank lain
 - a) Rincian penempatan pada bank lain berdasarkan jenis yaitu giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.
 - b) Penempatan pada bank lain yang memenuhi hubungan Istimewa.
 - c) Jumlah giro, tabungan, dan deposito yang diblokir dan alasannya.
 - d) Rincian penempatan dan pendapatan dari penempatan pada bank syariah.
 - e) Rincian penempatan pada bank lain dengan pembatasan penggunaan kas (contoh: *linkage program*).
- 5) Kredit
 - a) Pemberian Kredit
 - (1) Jenis dan jumlah kredit berdasarkan penggunaan dan sektor ekonomi.
 - (2) Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 - (3) Kedudukan BPR dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.
 - (4) Jumlah kredit yang dijamin, besarnya risiko yang ditanggung pihak penjamin, dan pihak penjaminnya.
 - (5) Jumlah kredit *channeling* dan *executing*.
 - (6) Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
 - (7) Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, kualitas dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata.
 - (8) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan dan penanganan kredit bermasalah.
 - (9) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit bermasalah.
 - (10) Kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portfolio kredit.
 - (11) Besarnya kredit bermasalah dan penyisihannya untuk setiap faktor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.
 - (12) Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.
 - (13) Agunan yang diambil alih, menurut nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
 - (14) Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- kredit dalam tahun berjalan, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun.
- b) Restrukturisasi Kredit
 - (1) Jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang dilakukan, dan alasan restrukturisasi.
 - (2) Data komparatif mengenai: (a) jumlah kredit bermasalah; (b) jumlah pendapatan yang diakui dengan basis kas selama periode timbulnya kredit bermasalah; (c) jumlah fasilitas kredit tambahan yang diberikan kepada debitur yang direstrukturisasi; (d) kerugian restrukturisasi kredit; dan (e) informasi lain atas kredit yang direstrukturisasi.
 - c) Hapus Buku Kredit
Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan Kredit dalam tahun berjalan, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku, dan saldo akhir tahun.
- 6) Penyertaan Modal
- a) Kebijakan akuntansi atas investasi pada BPR asosiasi.
 - b) Jumlah tercatat atas investasi pada BPR asosiasi.
 - c) Nilai wajar investasi pada BPR asosiasi, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yang memiliki kuotasi harga publikasian.
 - d) Untuk investasi pada BPR asosiasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya, investor mengungkapkan jumlah dividen dan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan.
 - e) Untuk investasi pada BPR asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, investor mengungkapkan secara terpisah bagiannya dalam laba rugi BPR asosiasi tersebut dan bagiannya dalam operasi yang dihentikan dari BPR asosiasi tersebut.
- 7) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- a) Deskripsi mengenai Agunan Yang Diambil Alih.
 - b) Nilai wajar Agunan Yang Diambil Alih.
 - c) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari Agunan Yang Diambil Alih, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh BPR) karena sifat Agunan Yang Diambil Alih tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.
 - d) Upaya penjualan yang dilakukan BPR.
 - e) Rugi penurunan nilai.
 - f) Keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan.
- 8) Properti Terbengkalai
- a) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar properti terbengkalai.
 - b) Sejauh mana nilai wajar properti terbengkalai (yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan) didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kelas

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- properti terbengkalai yang dinilai. Jika tidak ada penilaian tersebut, fakta tersebut diungkapkan.
- c) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti terbengkalai atau atas pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.
 - d) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti terbengkalai atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan properti investasi.
 - e) Rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti terbengkalai pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan secara terpisah :
 - (1) Penambahan, dengan pengungkapan terpisah penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis.
 - (2) Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian nilai wajar.
 - (3) Pengalihan ke dan dari properti terbengkalai yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilai.
 - (4) Pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri.
 - (5) Perubahan lain.
- 9) Aset Tetap dan Inventaris
- a) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
 - b) Metode depresiasi yang digunakan.
 - c) Umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan.
 - d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode pelaporan.
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan yang menunjukkan secara terpisah: (1) penambahan; (2) pelepasan; (3) perolehan melalui kombinasi bisnis; (4) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi berdasarkan paragraf 17.15B – 17.15D dan dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan Bab 27; (5) pengalihan ke dan dari properti investasi yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi (lihat paragraf 16.8); (6) rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam laba rugi sesuai dengan Bab 27; (7) depresiasi; dan (8) perubahan lain. Rekonsiliasi ini tidak perlu disajikan untuk periode sebelumnya.
 - f) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tetap dan inventaris yang BPR dibatasi hak kepemilikannya atau yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.
 - g) Jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tetap dan inventaris.
 - h) Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dan inventaris dalam menentukan substansi komersial.
 - i) Jika item aset tetap dan inventaris dinyatakan pada jumlah revaluasian, maka BPR mengungkapkan hal berikut: (1) tanggal efektif revaluasi; (2) apakah melibatkan penilai independen; (3) metode dan asumsi

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- signifikan yang diterapkan dalam mengestimasi nilai wajar item aset tetap dan inventaris; (4) untuk setiap kelas aset tetap dan inventaris revaluasian, jumlah tercatat aset tetap dan inventaris seandainya aset tetap dan inventaris tersebut dicatat dengan model biaya; dan (5) surplus revaluasi, yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.
- 10) Aset Takberwujud
- a) Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.
 - b) Metode amortisasi yang digunakan.
 - c) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode pelaporan.
 - d) Pos dalam laporan penghasilan komprehensif (dan dalam laporan laba rugi, jika disajikan) di mana amortisasi aset takberwujud termasuk didalamnya.
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan menunjukkan secara terpisah: (1) penambahan; (2) pelepasan; (3) akuisisi melalui kombinasi bisnis; (4) amortisasi; (5) rugi penurunan nilai; dan (6) perubahan lain. Rekonsiliasi tidak perlu disajikan untuk periode sebelumnya.
 - f) Deskripsi, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud yang material terhadap laporan keuangan BPR.
 - g) Aset takberwujud yang diakuisisi melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar (lihat paragraf 18.12):
 - (1) nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut; dan
 - (2) jumlah tercatatnya.
 - h) Keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang BPR memiliki kepemilikan terbatas atau yang dijamin sebagai liabilitas.
 - i) Jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud.
 - j) Jumlah agregat dari pengeluaran penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut (yaitu jumlah pengeluaran yang terjadi secara internal atas penelitian dan pengembangan yang tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset lain yang memenuhi kriteria pengakuan).
- 11) Aset Keuangan Lainnya
Rincian jumlah aset keuangan lainnya.
- 12) Aset lainnya
- a) Rincian aset lain-lain dan nominalnya.
 - b) Kebijakan akuntansi.
- 13) CKPN
- a) Jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan pos dalam laporan penghasilan komprehensif.
 - b) Jumlah pembalikan kerugian nilai yang diakui dalam laba rugi dan pos dalam laporan penghasilan komprehensif.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c) Jumlah kerugian penurunan nilai dapat diungkapkan terpisah untuk kerugian penurunan nilai individu dan kolektif.
 - d) Jumlah kerugian penurunan nilai dapat diungkapkan per kelompok kredit.
- b. Liabilitas
- 1) Liabilitas Segera
 - a) Rincian liabilitas segera.
 - b) Penjelasan untuk kredit yang diberikan bersaldo kredit.
 - 2) Utang Bunga
 - a) Rincian utang bunga yang berasal dari akrual bunga dan bunga jatuh tempo.
 - b) Rincian utang bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BPR.
 - 3) Utang Pajak
 - a) Kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi ke periode berikutnya.
 - b) Rincian komponen utama beban pajak penghasilan.
 - 4) Simpanan
 - a) Jumlah dan jenis simpanan, termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 - b) Komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu.
 - c) Jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.
 - d) Pemberian fasilitas istimewa kepada nasabah.
 - e) Jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan.
 - f) Jumlah deposito yang telah jatuh tempo.
 - 5) Simpanan dari Bank Lain
 - a) Jumlah dan jenis kewajiban pada bank lain, termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 - b) Komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu.
 - c) Jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.
 - d) Pemberian fasilitas istimewa kepada bank penyimpan.
 - e) Jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan.
 - 6) Pinjaman yang Diterima
 - a) Rincian pinjaman yang diterima mengenai:
 - (1) Jenis (sumber dana), jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo pinjaman diterima.
 - (2) Perikatan yang menyertainya.
 - (3) Nilai dan perikatan aset yang dijaminkan.
 - (4) Hubungan istimewa (hubungan keterkaitan keuangan, kepemilikan, dan kepengurusan).
 - b) Pinjaman dari pemerintah, Bank Indonesia, atau pihak lain sebagai bantuan kepada BPR termasuk pinjaman dalam rangka bantuan likuiditas.
 - 7) Dana Setoran Modal – Liabilitas
 - a) Rincian dana setoran modal dan pemilik dana.
 - b) Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 8) Liabilitas Imbalan Kerja
- a) SAK EP tidak mensyaratkan pengungkapan secara spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.39)
 - b) Imbalan pascakerja
 - (1) Imbalan pascakerja iuran pasti
Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.40)
 - (2) Imbalan pascakerja imbalan pasti
 - (a) Deskripsi umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
 - (b) Kebijakan akuntansi BPR untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan jumlah keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
 - (c) Penjelasan naratif jika BPR menggunakan penyederhanaan metode dalam mengukur kewajiban imbalan pasti.
 - (d) Tanggal penilaian aktuarial komprehensif terkini. Jika penilaian tidak dilakukan pada tanggal pelaporan, maka deskripsi mengenai penyesuaian yang dibuat untuk mengukur kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan.
 - (e) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah imbalan yang dibayarkan dan seluruh perubahan lain.
 - (f) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir nilai wajar aset program serta hak penggantian yang diakui sebagai aset.
 - (g) Total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti.
 - (h) Persentase atau jumlah setiap kelas utama aset program (seperti instrumen ekuitas, instrumen utang, properti, dan aset lainnya) yang membentuk nilai wajar dari total aset program.
 - (i) Jumlah yang termasuk dalam nilai wajar aset program untuk setiap kelas instrumen keuangan BPR sendiri dan setiap properta atau aset lainnya yang dikuasai atau digunakan oleh BPR.
 - (j) Imbal hasil aktual aset program.
 - (k) Asumsi aktuarial utama yang digunakan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.41)
 - (3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Sifat imbalan dan jumlah kewajiban dan status pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.42)
 - (4) Imbalan Pesangon
Sifat imbalan, jumlah kewajiban, dan status pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.43)

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- 9) Pinjaman Subordinasi
 - a) Rincian pinjaman subordinasi mengenai sumber dana, nilai pokok, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo pinjaman subordinasi.
 - b) Hubungan istimewa (apabila ada).
- 10) Liabilitas Lain-lain
 - Rincian kewajiban lain- lain.
- c. Ekuitas
 - 1) Modal Disetor
 - a) BPR dengan modal saham:
 - (1) Jumlah saham modal dasar.
 - (2) Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tapi tidak disetor penuh.
 - (3) Nilai nominal saham.
 - (4) Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode.
 - (5) Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
 - (6) Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
 - (7) Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
 - (8) Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
 - b) BPR tanpa modal saham mengungkapkan informasi yang ekuivalen sebagaimana huruf a) di atas yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap kategori ekuitas, hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kategori ekuitas.
 - 2) Tambahan modal disetor
 - a) Rincian dana setoran modal dan pemilik dana.
 - b) Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.
 - c) Dana setoran modal yang telah digunakan oleh BPR
 - d) Agio saham.
 - e) Rincian modal sumbangan.
 - f) Nama-nama penyumbang.
 - 3) Saldo Laba
 - Deskripsi mengenai setiap cadangan dalam ekuitas.

Lampiran : Panduan Penyesuaian Atas Pos-Pos Laporan Keuangan dan Penyajian Komparatif Di Tahun Penerapan Awal

Secara umum, pada awal penerapan BPR mulai menerapkan ketentuan dalam PA BPR ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK EP;
2. tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau liabilitas apabila SAK EP ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
3. mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, liabilitas, atau komponen ekuitas dalam SAK ETAP sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, liabilitas, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK EP;
4. menerapkan SAK EP dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui; dan
5. dampak penyesuaian di atas diakui secara langsung pada saldo laba periode sajian paling awal.

Penjelasan di atas mencerminkan pendekatan retrospektif, maka BPR harus melakukan:

- a. Perhitungan kembali akun-akun di Laporan posisi keuangan posisi saldo awal di tahun sebelum penerapan (1 Januari 2024) dengan membukukan selisih saldo awal (1 Januari 2024) dengan saldo akhir 2 (dua) tahun sebelum penerapan (31 Desember 2023) ke laba ditahan tahun sebelum penerapan (1 Januari 2024).
- b. Menyajikan kembali laporan laba rugi tahun sebelum penerapan (31 Desember 2024) dengan perhitungan menggunakan SAK EP. Selisih antara laba rugi sesuai SAK ETAP dengan SAK EP di tahun sebelum penerapan dibukukan sebagai penyesuaian ke laba ditahan tahun sebelum penerapan (31 Desember 2024).

Dalam melakukan penerapan awal SAK EP, BPR dapat menghadapi kondisi tidak praktis yaitu ketika BPR tidak dapat menerapkan suatu persyaratan pada SAK EP setelah melakukan segala upaya yang wajar untuk melakukannya (lihat sub-bab 1.3 tentang Tata Cara Penyesuaian Atas Pos-pos Laporan Keuangan). Kondisi tidak praktis dimaksud menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang tinggi untuk menghitung kembali angka saldo awal di tahun sebelum penerapan (1 Januari 2024) dan penyesuaian komponen laba rugi di tahun sebelum penerapan (31 Desember 2024). Sebagai contoh, untuk penerapan restrospektif di akun 'Kredit yang diberikan' bank menghadapi kesulitan yang tinggi antara lain:

1. tidak adanya informasi biaya atau pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung ke kredit seperti pendapatan provisi dan biaya administrasi yang dikenakan kepada debitur serta biaya yang dikeluarkan oleh BPR secara langsung untuk pemberian kredit ke debitur; dan
2. tidak terdapat sumber daya yang memadai untuk menghitung kembali penerapan SAK EP seakan-akan telah diterapkan sejak awal transaksi kredit itu diberikan, misalnya jumlah debitur bank yang dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun cukup banyak.

Mengacu kepada SAK EP Paragraf 35.1, jika terdapat kondisi tidak praktis bagi BPR untuk melakukan penyesuaian atau perhitungan dimaksud pada awal penerapan sesuai SAK EP, maka BPR menerapkan SAK EP secara prospektif untuk seluruh kontrak yang belum berakhir pada periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2025 (*dikutip dari PSAK 55 ketentuan transisi*). Mengacu kepada PSAK 208, BPR membuat penyesuaian

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh pada periode berjalan (tahun 2025).

(PSAK 208 Paragraf 25 - jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana penerapan restrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu.

Sebagai contoh untuk akun 'Kredit yang Diberikan' :

- 1) BPR menghitung suku bunga efektif sesuai SAK EP untuk tanggal 1 Januari 2025 dengan menggunakan nilai tercatat kredit dan akun terkait (misalnya pendapatan provisi atau beban yang belum diamortisasi) posisi 31 Desember 2024. Selanjutnya pengakuan pendapatan mengikuti suku bunga efektif tersebut ; dan
- 2) BPR mengungkapkan mengenai informasi ketidakpraktisan tersebut dalam laporan keuangan.

Tambahan CKPN yang perlu dibentuk BPR karena perubahan standar dari SAK ETAP menjadi SAK EP menjadi beban pada tahun penerapan awal SAK EP.

BPR melakukan penyesuaian terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas posisi pada awal penerapan SAK EP sebagai berikut :

A. Aset Keuangan

1. Kas
Tidak terdapat perbedaan pencatatan Kas di SAK EP dan SAK ETAP.
 - a. Reklasifikasi
BPR tidak melakukan reklasifikasi terhadap pos Kas.
 - b. Penyesuaian terhadap saldo awal
Saldo akhir 31 Desember 2024 menjadi saldo awal 1 Januari 2025.
 - c. Penyajian saldo komparatif di awal penerapan
BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sebagai angka komparatif untuk laporan keuangan 31 Desember 2025.
2. Surat Berharga/Penempatan pada Bank Lain/Kredit
BPR mencatat Surat Berharga yang akan dimiliki hingga jatuh tempo, Penempatan pada Bank Lain, dan Kredit dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi.
 - a. Reklasifikasi
BPR tidak melakukan reklasifikasi terhadap pos Surat Berharga/Penempatan pada Bank Lain/Kredit.
 - b. Penyesuaian terhadap saldo awal
 - 1) Penerapan restrospektif
 - a) BPR menghitung saldo awal penerapan (1 Januari 2025) dengan menghitung kembali Surat Berharga/Penempatan pada Bank Lain/Kredit dengan biaya perolehan diamortisasi seakan-akan penerapan suku bunga efektif sudah diterapkan sejak awal kepemilikan Surat Berharga /Penempatan pada Bank Lain/Kredit.
 - b) BPR membukukan selisih saldo akhir 31 Desember 2024 sesuai SAK ETAP dengan saldo perhitungan kembali sesuai SAK EP ke Laba ditahan 31 Desember 2024.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- c) Selanjutnya BPR menggunakan suku bunga efektif sebagaimana dimaksud di huruf a) di atas sebagai dasar untuk mengakui jumlah pendapatan bunga dan amortisasi pendapatan provisi serta biaya transaksi.
 - d) Ilustrasi penerapan restrospektif Kredit yang diberikan sebagaimana Contoh 1.
 - 2) Jika terdapat kondisi tidak praktis untuk melakukan penerapan restrospektif
 - a) BPR mendokumentasikan kondisi tidak praktis dan keputusan dari manajemen untuk kondisi tidak praktis.
 - b) Saldo penerapan awal 1 Januari 2025 menggunakan saldo tercatat 31 Desember 2024 dari Surat Berharga/Penempatan pada Bank Lain/Kredit, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan dikurangi pendapatan provisi yang belum diamortisasi.
 - c) Selanjutnya BPR menghitung suku bunga efektif menggunakan data sebagaimana dimaksud di huruf b) di atas sebagai dasar untuk mengakui jumlah pendapatan bunga dan amortisasi pendapatan provisi serta biaya transaksi.
 - d) Ilustrasi penerapan jika terdapat kondisi tidak praktis Kredit yang diberikan sebagaimana Contoh 2.
 - c. Penyajian saldo komparatif di awal penerapan
 - 1) Penerapan restrospektif
BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 yang telah dihitung kembali dengan suku bunga efektif sejak awal transaksi sebagaimana dimaksud di huruf b angka 2a) di atas sebagai angka komparatif untuk laporan keuangan 31 Desember 2025.
 - 2) Jika terdapat kondisi tidak praktis untuk melakukan penerapan restrospektif
BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sesuai SAK EP dengan menuliskan keterangan bahwa saldo dimaksud merupakan saldo sesuai SAK EP. Penyajian saldo menggunakan saldo tercatat 31 Desember 2024 dari Surat Berharga/Penempatan pada Bank Lain/Kredit, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan dikurangi pendapatan provisi yang belum diamortisasi.
3. Penurunan Nilai
- a. Penerapan restrospektif
 - 1) BPR menghitung kembali cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2023 dan selisih cadangan yang telah dibentuk sesuai SAK ETAP dengan cadangan yang wajib dibentuk sesuai SAK EP dibukukan dalam Laba Ditahan 2023. Selanjutnya biaya CKPN di tahun 2024 dihitung berdasarkan SAK EP.
 - 2) Dalam hal BPR tidak dapat menghitung kembali cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2023, namun dapat menghitung dan selisih cadangan yang telah dibentuk sesuai SAK ETAP dengan cadangan yang wajib dibentuk sesuai SAK EP dibukukan dalam Laba Ditahan 2024.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

3) Ilustrasi Jurnal

BPR ABC memiliki data historis kredit dari debitur tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk membentuk *probability of default* tahun 2023 serta data pemulihan kredit dari kredit hapus buku dan agunan tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 untuk membentuk *loss given default* tahun 2023, maka BPR menghitung kembali CKPN yang harus dibentuk berdasarkan kredit yang diberikan posisi 31 Desember 2023 dan biaya CKPN untuk tahun 2024.

a) Pembebanan selisih CKPN saldo 31 Des 2023 ke Laba Ditahan

Jika PPKA yang telah dibentuk lebih kecil dibandingkan CKPN

Db.	Laba Ditahan 31 Desember 2023	XXX	
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		XXX

Jika PPKA yang telah dibentuk lebih besar dibandingkan CKPN

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	XXX	
Kr.	Laba Ditahan 31 Desember 2023		XXX

b) Pembebanan selisih CKPN tahun 2024

Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR lebih kecil dibandingkan CKPN

Db.	Beban CKPN 2024	XXX	
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		XXX

Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat lebih besar dibandingkan CKPN

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	XXX	
Kr.	Beban CKPN 2024		XXX

c) Jika BPR hanya memiliki data *probability of default* dan untuk tahun 2024 saja, BPR melakukan pembebanan selisih CKPN tahun 2024

Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR lebih kecil dibandingkan CKPN

Db.	Beban CKPN 2024	XXX	
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		XXX

Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR lebih besar dibandingkan CKPN

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	XXX	
Kr.	Beban CKPN 2024		XXX

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- b. Jika terdapat kondisi tidak praktis untuk melakukan penerapan prospektif BPR menerapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai SAK EP di 1 Januari 2025 dan selisih biaya penurunan nilai menjadi beban tahun 2025.
- Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR lebih kecil dibandingkan CKPN

Db.	Beban CKPN 2025	XXX	
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		XXX

Jika penyisihan yang telah dibentuk sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR lebih besar dibandingkan CKPN

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	XXX	
Kr.	Beban CKPN 2025		XXX

- c. BPR melakukan penerapan perhitungan penurunan nilai untuk masing-masing akun. Sebagai contoh, BPR menerapkan restrospektif CKPN untuk akun penempatan pada bank lain, namun untuk akun “Kredit yang Diberikan” BPR memilih menerapkan SAK EP secara prospektif karena terdapat kondisi tidak praktis yaitu data historis yang dimiliki tidak memadai untuk menghitung *probability of default* untuk tahun 2023 dan 2024.

4. Agunan yang Diambil Alih
- Tidak terdapat perbedaan pencatatan Kas di SAK EP dan SAK ETAP
- a. Penyesuaian terhadap saldo awal
- Saldo akhir 31 Desember 2024 menjadi saldo awal 1 Januari 2025.
- b. Penyajian saldo komparatif di awal penerapan
- BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sebagai angka komparatif untuk laporan keuangan 31 Desember 2025.
- c. Lainnya
- BPR melakukan penilaian kembali apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai untuk agunan yang diambilalih sesuai dengan Bab 27 SAK EP Penurunan Nilai.
5. Aset Tetap dan Inventaris/Properti Terbengkalai
- Tidak terdapat perbedaan pencatatan Kas di SAK EP dan SAK ETAP
- a. Penyesuaian terhadap saldo awal
- Saldo akhir 31 Desember 2024 menjadi saldo awal 1 Januari 2025.
- b. Penyajian saldo komparatif di awal penerapan
- BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sebagai angka komparatif untuk laporan keuangan 31 Desember 2025.
- c. Lainnya
- Bagi BPR yang memilih untuk menggunakan kebijakan revaluasi aset tetap, BPR melakukan perubahan kebijakan di posisi 1 Januari 2025.
- BPR melakukan penilaian kembali apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai untuk Aset Tetap dan Inventaris/Properti Terbengkalai sesuai dengan Bab 27 SAK EP Penurunan Nilai.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

B. Liabilitas Keuangan

Simpanan/Utang /Pinjaman/Liabilitas segera

1. Penerapan Retrospektif
 - a. Penyesuaian terhadap saldo awal
BPR menyajikan kembali saldo awal dengan menggunakan saldo akhir 31 Desember 2023, ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi. BPR menghitung kembali suku bunga efektif dan amortisasinya sebagai dasar untuk melakukan pengakuan pendapatan bunga dan amortisasi Simpanan/Utang/Pinjaman/Liabilitas Segera.
 - b. Penyajian saldo komparatif di awal penerapan
BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sebagai angka komparatif untuk laporan keuangan 31 Desember 2025.
2. Kondisi tidak praktis
 - a. BPR mendokumentasikan kondisi tidak praktis dan keputusan dari manajemen untuk kondisi tidak praktis.
 - b. Saldo penerapan awal 1 Januari 2025 menggunakan saldo tercatat 31 Desember 2024 dari Simpanan/Utang/Pinjaman/Liabilitas segera, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.
 - c. Selanjutnya BPR menghitung suku bunga efektif menggunakan data sebagaimana dimaksud di huruf b) di atas sebagai dasar untuk mengakui jumlah biaya bunga dan amortisasi biaya transaksi.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Contoh 1 - Ilustrasi Penerapan Restrospektif Kredit yang diberikan

1. Ilustrasi

Pada tanggal 1 September 2023 Bank memberikan kredit sebesar Rp60.000.000 dengan suku bunga flat 6% per tahun dan tenor 30 (tiga puluh) bulan. Bank mengenakan provisi sebesar 1% dari plafond atau Rp600.000. Atas kredit ini, bank mengakui pendapatan dengan suku bunga flat sesuai cicilan dengan nasabah. Kredit ini masih berjalan dan kondisi lancar per 1 Januari 2025 pada saat BPR menerapkan SAK EP.

2. Tabel Awal Kredit yang diberikan sesuai SAK ETAP

Transaksi	Tanggal	Pembayaran Pokok	Bunga	Cicilan Bulanan	Amortisasi Provisi	Saldo Pinjaman Flat	Saldo Provisi
0	1-Sep-23					60,000,000	600,000
1	30-Sep-23	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	58,000,000	580,000
2	31-Oct-23	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	56,000,000	560,000
3	30-Nov-23	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	54,000,000	540,000
4	31-Dec-23	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	52,000,000	520,000
5	31-Jan-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	50,000,000	500,000
6	29-Feb-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	48,000,000	480,000
7	31-Mar-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	46,000,000	460,000
8	30-Apr-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	44,000,000	440,000
9	31-May-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	42,000,000	420,000
10	30-Jun-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	40,000,000	400,000
11	31-Jul-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	38,000,000	380,000
12	31-Aug-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	36,000,000	360,000
13	30-Sep-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	34,000,000	340,000
14	31-Oct-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	32,000,000	320,000
15	30-Nov-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	30,000,000	300,000
16	31-Dec-24	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	28,000,000	280,000
17	31-Jan-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	26,000,000	260,000
18	28-Feb-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	24,000,000	240,000
19	31-Mar-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	22,000,000	220,000
20	30-Apr-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	20,000,000	200,000
21	31-May-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	18,000,000	180,000
22	30-Jun-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	16,000,000	160,000
23	31-Jul-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	14,000,000	140,000
24	31-Aug-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	12,000,000	120,000
25	30-Sep-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	10,000,000	100,000
26	31-Oct-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	8,000,000	80,000
27	30-Nov-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	6,000,000	60,000
28	31-Dec-25	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	4,000,000	40,000
29	31-Jan-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	2,000,000	20,000
30	28-Feb-26	2,000,000	300,000	2,300,000	20,000	-	-

3. Informasi untuk perhitungan kembali sesuai SAK EP

	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Saldo tercatat	52.000.000	28.000.000
Provisi yang belum diamortisasi	520.000	280.000
Pendapatan Bunga tahun 2024 (Rp300.000 x 12)		3.600.000
Pendapatan Diskonto tahun 2024		240.000

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

4. Tabel Perhitungan Kembali Kredit yang diberikan sesuai SAK EP
- a. Bank melakukan konversi terlebih dahulu tabel flat ke tabel anuitas

TABEL ANUITAS / EFEKTIF						
	Tanggal	Saldo Pokok Awal	Cicilan Bulanan	Bunga Anuitas	Cicilan Pokok Anuitas	Saldo Pokok Akhir
0	1-Sep-23		(60,000,000)			60,000,000
1	30-Sep-23	60,000,000	2,300,000	555,898	1,744,102	58,255,898
2	31-Oct-23	58,255,898	2,300,000	539,739	1,760,261	56,495,637
3	30-Nov-23	56,495,637	2,300,000	523,430	1,776,570	54,719,067
4	31-Dec-23	54,719,067	2,300,000	506,970	1,793,030	52,926,037
5	31-Jan-24	52,926,037	2,300,000	490,358	1,809,642	51,116,395
6	29-Feb-24	51,116,395	2,300,000	473,592	1,826,408	49,289,987
7	31-Mar-24	49,289,987	2,300,000	456,670	1,843,330	47,446,656
8	30-Apr-24	47,446,656	2,300,000	439,592	1,860,408	45,586,248
9	31-May-24	45,586,248	2,300,000	422,355	1,877,645	43,708,603
10	30-Jun-24	43,708,603	2,300,000	404,959	1,895,041	41,813,562
11	31-Jul-24	41,813,562	2,300,000	387,401	1,912,599	39,900,963
12	31-Aug-24	39,900,963	2,300,000	369,681	1,930,319	37,970,644
13	30-Sep-24	37,970,644	2,300,000	351,797	1,948,203	36,022,441
14	31-Oct-24	36,022,441	2,300,000	333,747	1,966,253	34,056,187
15	30-Nov-24	34,056,187	2,300,000	315,529	1,984,471	32,071,717
16	31-Dec-24	32,071,717	2,300,000	297,143	2,002,857	30,068,860
17	31-Jan-25	30,068,860	2,300,000	278,587	2,021,413	28,047,447
18	28-Feb-25	28,047,447	2,300,000	259,859	2,040,141	26,007,305
19	31-Mar-25	26,007,305	2,300,000	240,957	2,059,043	23,948,262
20	30-Apr-25	23,948,262	2,300,000	221,880	2,078,120	21,870,142
21	31-May-25	21,870,142	2,300,000	202,626	2,097,374	19,772,768
22	30-Jun-25	19,772,768	2,300,000	183,194	2,116,806	17,655,962
23	31-Jul-25	17,655,962	2,300,000	163,582	2,136,418	15,519,544
24	31-Aug-25	15,519,544	2,300,000	143,788	2,156,212	13,363,332
25	30-Sep-25	13,363,332	2,300,000	123,811	2,176,189	11,187,143
26	31-Oct-25	11,187,143	2,300,000	103,648	2,196,352	8,990,791
27	30-Nov-25	8,990,791	2,300,000	83,299	2,216,701	6,774,091
28	31-Dec-25	6,774,091	2,300,000	62,762	2,237,238	4,536,852
29	31-Jan-26	4,536,852	2,300,000	42,034	2,257,966	2,278,886
30	28-Feb-26	2,278,886	2,300,000	21,114	2,278,886	0

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

b. Bank menghitung arus kas dengan suku bunga efektif akuntansi

TABEL SUKU BUNGA EFEKTIF AKUNTANSI

aksi	Tanggal	Arus Kas	Cicilan Pokok Anuitas	Cicilan Bunga Anuitas	Saldo Awal Akuntansi	Bunga Efektif Akuntansi	Amortisasi	Saldo Awal Akuntansi	
0	1-Sep-23	(59,400,000)						59,400,000	
1	30-Sep-23	2,300,000	1,744,102	555,898	59,400,000	591,106	35,208	57,691,106	
2	31-Oct-23	2,300,000	1,760,261	539,739	57,691,106	574,100	34,361	55,965,206	
3	30-Nov-23	2,300,000	1,776,570	523,430	55,965,206	556,925	33,495	54,222,132	
4	31-Dec-23	2,300,000	1,793,030	506,970	54,222,132	539,580	32,609	52,461,711	(c)
5	31-Jan-24	2,300,000	1,809,642	490,358	52,461,711	522,061	31,703	50,683,773	
6	29-Feb-24	2,300,000	1,826,408	473,592	50,683,773	504,368	30,777	48,888,141	
7	31-Mar-24	2,300,000	1,843,330	456,670	48,888,141	486,500	29,830	47,074,640	
8	30-Apr-24	2,300,000	1,860,408	439,592	47,074,640	468,453	28,861	45,243,093	
9	31-May-24	2,300,000	1,877,645	422,355	45,243,093	450,227	27,872	43,393,320	
10	30-Jun-24	2,300,000	1,895,041	404,959	43,393,320	431,819	26,860	41,525,139	
11	31-Jul-24	2,300,000	1,912,599	387,401	41,525,139	413,228	25,827	39,638,367	
12	31-Aug-24	2,300,000	1,930,319	369,681	39,638,367	394,452	24,771	37,732,820	
13	30-Sep-24	2,300,000	1,948,203	351,797	37,732,820	375,490	23,693	35,808,310	
14	31-Oct-24	2,300,000	1,966,253	333,747	35,808,310	356,339	22,592	33,864,648	
15	30-Nov-24	2,300,000	1,984,471	315,529	33,864,648	336,997	21,467	31,901,645	
16	31-Dec-24	2,300,000	2,002,857	297,143	31,901,645	317,462	20,319	29,919,107	(d)
17	31-Jan-25	2,300,000	2,021,413	278,587	29,919,107	297,733	19,146	27,916,840	
18	28-Feb-25	2,300,000	2,040,141	259,859	27,916,840	277,808	17,950	25,894,649	
19	31-Mar-25	2,300,000	2,059,043	240,957	25,894,649	257,685	16,728	23,852,334	
20	30-Apr-25	2,300,000	2,078,120	221,880	23,852,334	237,361	15,481	21,789,695	
21	31-May-25	2,300,000	2,097,374	202,626	21,789,695	216,835	14,209	19,706,530	
22	30-Jun-25	2,300,000	2,116,806	183,194	19,706,530	196,105	12,911	17,602,635	
23	31-Jul-25	2,300,000	2,136,418	163,582	17,602,635	175,169	11,587	15,477,804	
24	31-Aug-25	2,300,000	2,156,212	143,788	15,477,804	154,024	10,236	13,331,828	
25	30-Sep-25	2,300,000	2,176,189	123,811	13,331,828	132,669	8,858	11,164,497	
26	31-Oct-25	2,300,000	2,196,352	103,648	11,164,497	111,101	7,453	8,975,598	
27	30-Nov-25	2,300,000	2,216,701	83,299	8,975,598	89,319	6,019	6,764,916	
28	31-Dec-25	2,300,000	2,237,238	62,762	6,764,916	67,320	4,558	4,532,236	
29	31-Jan-26	2,300,000	2,257,966	42,034	4,532,236	45,102	3,068	2,277,338	
30	28-Feb-26	2,300,000	2,278,886	21,114	2,277,338	22,662	1,549	0	

suku bunga efektif =IRR(seluruh arus kas di atas) = 0,995% per bulan atau 11,94% per tahun

5. Jurnal Penyesuaian Penerapan SAK EP

Rekap perbandingan	SAK ETAP		SAK EP	
	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2023	31 Des 2024
Saldo Kredit	52,000,000	28,000,000		
Provisi yang belum diamortisasi	520,000	280,000		
Saldo Kredit baki debet net	51,480,000 (g)	27,720,000 (h)	52,461,711 (i)	29,919,107 (j)
Pendapatan bunga kredit		3,600,000		
Pendapatan amortisasi		240,000		
Pendapatan Bunga kredit + provisi		3,840,000	(k)	(l) 5,057,396

Selisih saldo awal kredit = (i) - (g)	981,711
selisih saldo akhir kredit = (j) - (h)	2,199,107
selisih pendapatan = (l) - (k)	1,217,396

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

a. Pembebanan selisih saldo 31 Desember 2023 ke Laba Ditahan

Db.	Kredit yang diberikan	981.711	
Kr.	Laba Ditahan 31 Desember 2023		981.711

b. Pembebanan selisih saldo 31 Desember 2024 ke Laba Ditahan

Db.	Kredit yang diberikan	2.199.107	
Kr.	Laba Ditahan 31 Desember 2024		2.199.107

c. Penyesuaian pendapatan di tahun 2024 ke Laba Ditahan

Db.	Laba Ditahan 31 Desember 2024	1.217.396	
Kr.	Pendapatan Bunga 2024		1.217.396

d. Penyesuaian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang diberikan

Db.	Laba Ditahan 31 Desember 2024	XXX.XXX	
Kr.	CKPN Kredit yang diberikan		XXX.XXX

6. Ilustrasi Angka Komparatif

	31 Des 2023	31 Des 2024	32 Des 2025
Kredit yang diberikan	52,461,711	29,919,107	4,532,236
Pendapatan bunga		5,057,396	2,213,129

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Contoh 2 - Ilustrasi Penerapan Kondisi Tidak Praktis Kredit yang diberikan

1. Ilustrasi
- Pada tanggal 1 September 2023 Bank memberikan kredit sebesar Rp60.000.000 dengan suku bunga flat 6% per tahun dan tenor 30 (tiga puluh) bulan. Bank mengenakan provisi sebesar 1% dari plafond atau Rp600.000. Atas kredit ini, bank mengakui pendapatan dengan suku bunga flat sesuai cicilan dengan nasabah. Kredit ini masih berjalan dan kondisi lancar per 1 Januari 2025 pada saat BPR menerapkan SAK EP.
2. Tabel Awal Kredit yang diberikan sesuai SAK ETAP

Transaksi	Tanggal	Pembayaran Pokok	Bunga	Cicilan Bulanan	Amortisasi Provisi	Saldo Pinjaman Flat	Saldo Provisi
0	1-Sep-23					60.000.000	600.000
1	30-Sep-23	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	58.000.000	580.000
2	31-Oct-23	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	56.000.000	560.000
3	30-Nov-23	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	54.000.000	540.000
4	31-Dec-23	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	52.000.000	520.000
5	31-Jan-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	50.000.000	500.000
6	29-Feb-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	48.000.000	480.000
7	31-Mar-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	46.000.000	460.000
8	30-Apr-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	44.000.000	440.000
9	31-May-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	42.000.000	420.000
10	30-Jun-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	40.000.000	400.000
11	31-Jul-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	38.000.000	380.000
12	31-Aug-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	36.000.000	360.000
13	30-Sep-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	34.000.000	340.000
14	31-Oct-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	32.000.000	320.000
15	30-Nov-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	30.000.000	300.000
16	31-Dec-24	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	28.000.000	280.000
17	31-Jan-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	26.000.000	260.000
18	28-Feb-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	24.000.000	240.000
19	31-Mar-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	22.000.000	220.000
20	30-Apr-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	20.000.000	200.000
21	31-May-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	18.000.000	180.000
22	30-Jun-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	16.000.000	160.000
23	31-Jul-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	14.000.000	140.000
24	31-Aug-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	12.000.000	120.000
25	30-Sep-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	10.000.000	100.000
26	31-Oct-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	8.000.000	80.000
27	30-Nov-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	6.000.000	60.000
28	31-Dec-25	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	4.000.000	40.000
29	31-Jan-26	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	2.000.000	20.000
30	28-Feb-26	2.000.000	300.000	2.300.000	20.000	-	-

3. Informasi untuk perhitungan kembali sesuai SAK EP
- Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR menghitung kembali saldo akun kredit setiap debitur dengan suku bunga efektif sesuai SAK EP. Dalam contoh di atas, bagi BPR yang sebelumnya menggunakan suku bunga flat dengan nasabah harus menghitung suku bunga anuitas sesuai dengan sisa kredit yang belum dibayarkan dan provisi yang belum diamortisasi.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

- a. Bank menghitung dari sisa kredit dengan suku bunga flat ke dalam suku bunga anuitas

ksi	Tanggal	Arusk Kas Anuitas	Saldo awal Anuitas	Cicilan Pokok Anuitas	Cicilan Bunga Anuitas	Saldo akhir Anuitas
		a	b=(e) bulan sebelumnya	c= (a) - (d)	d = (b) x suku bunga anuitas	e = (b)-(c)
0	31-Dec-24	(28.000.000)				28.000.000
1	31-Jan-25	2.300.000	28.000.000	1.762.147	537.853	26.237.853
2	28-Feb-25	2.300.000	26.237.853	1.795.996	504.004	24.441.858
3	31-Mar-25	2.300.000	24.441.858	1.830.495	469.505	22.611.362
4	30-Apr-25	2.300.000	22.611.362	1.865.657	434.343	20.745.705
5	31-May-25	2.300.000	20.745.705	1.901.495	398.505	18.844.210
6	30-Jun-25	2.300.000	18.844.210	1.938.021	361.979	16.906.190
7	31-Jul-25	2.300.000	16.906.190	1.975.248	324.752	14.930.942
8	31-Aug-25	2.300.000	14.930.942	2.013.191	286.809	12.917.751
9	30-Sep-25	2.300.000	12.917.751	2.051.862	248.138	10.865.888
10	31-Oct-25	2.300.000	10.865.888	2.091.277	208.723	8.774.612
11	30-Nov-25	2.300.000	8.774.612	2.131.448	168.552	6.643.164
12	31-Dec-25	2.300.000	6.643.164	2.172.391	127.609	4.470.773
13	31-Jan-26	2.300.000	4.470.773	2.214.121	85.879	2.256.652
14	28-Feb-26	2.300.000	2.256.652	2.256.652	43.348	0

suku bunga Anuitas =IRR(seluruh arus kas di atas) = 1,92% per bulan

- b. Arus kas dari suku bunga anuitas menjadi dasar dalam perhitungan suku bunga efektif akuntansi.

Transaksi	Tanggal	Arus Kas dengan provisi	Saldo Awal Akuntansi	Bunga Efektif Akuntansi	Cicilan Pokok Anuitas	Cicilan Bunga Anuitas	Amortisasi provisi	Saldo Awal Akuntansi
		d	e =(f) bulan sebelumnya	f = (e) x suku bunga ekuitas	g - dari (c) tabel anuitas	h- dari (d) tabel anuitas	l = (f) - (h)	j
0	31-Dec-24	(27.720.000)						27.720.000
1	31-Jan-25	2.300.000	27.720.000	572.050	1.762.147	537.853	34.197	25.992.050
2	28-Feb-25	2.300.000	25.992.050	536.391	1.795.996	504.004	32.387	24.228.441
3	31-Mar-25	2.300.000	24.228.441	499.996	1.830.495	469.505	30.491	22.428.437
4	30-Apr-25	2.300.000	22.428.437	462.850	1.865.657	434.343	28.507	20.591.287
5	31-May-25	2.300.000	20.591.287	424.937	1.901.495	398.505	26.432	18.716.224
6	30-Jun-25	2.300.000	18.716.224	386.242	1.938.021	361.979	24.262	16.802.465
7	31-Jul-25	2.300.000	16.802.465	346.748	1.975.248	324.752	21.996	14.849.213
8	31-Aug-25	2.300.000	14.849.213	306.439	2.013.191	286.809	19.630	12.855.653
9	30-Sep-25	2.300.000	12.855.653	265.299	2.051.862	248.138	17.161	10.820.951
10	31-Oct-25	2.300.000	10.820.951	223.309	2.091.277	208.723	14.586	8.744.261
11	30-Nov-25	2.300.000	8.744.261	180.453	2.131.448	168.552	11.901	6.624.714
12	31-Dec-25	2.300.000	6.624.714	136.712	2.172.391	127.609	9.104	4.461.426
13	31-Jan-26	2.300.000	4.461.426	92.069	2.214.121	85.879	6.190	2.253.495
14	28-Feb-26	2.300.000	2.253.495	46.505	2.256.652	43.348	3.157	(0)

suku bunga efektif =IRR(seluruh arus kas di atas) = 2,06% per bulan

4. Selanjutnya BPR mengakui pendapatan bunga dan amortisasi provisi sesuai dengan tabel di angka 3 huruf b.
5. Ilustrasi Angka Komparatif

	31 Des 2023	31 Des 2024	32 Des 2025
Kredit yang diberikan	52,000.000	28.000.000	4,461.426
Provisi yang belum diamortisasi	(520.000)	(280.000)	-
Pendapatan bunga		3.600.000	4.341.426

BPR menambahkan informasi kondisi tidak praktis dan bahwa angka 31 Desember 2024 disajikan sesuai dengan SAK ETAP.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK EP. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh PA BPR hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi